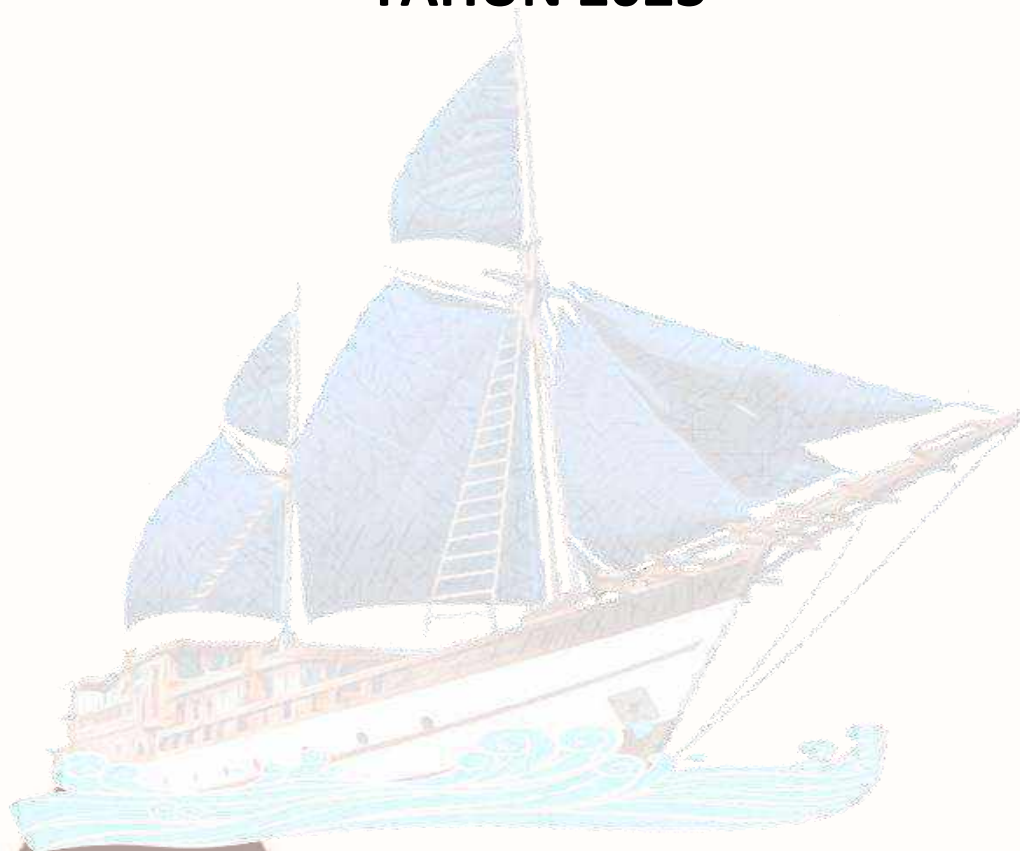




LAPORAN

KINERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024

Jl. Jend. Sudirman. No.1 Tlpn/Fax.0413 81004 Bulukumba 92511



<http://Setda.bulukumbakab.go.id>



@organisasiblk@gmail.com

REVIEW



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
INSPEKTORAT DAERAH

Jedung Pinisi Lantai III Jalan Dr. Sutomo Nomor 1 Bulukumba 92511 Sulawesi Selatan

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Bulukumba, 20 Maret 2024

PA INSPEKTUR DAERAH



Drs. Mannangkasi

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP. 19730715 199303 1 003



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se-Kabupaten Bulukumba, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai sasaran strategis.

Laporan Kinerja (LKj) berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta secara aktif baik dari aparatur pemerintah daerah, masyarakat umum maupun dunia usaha. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam menyusun laporan kinerja sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami telah berupaya secara maksimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan kinerja di tahun yang akan datang. Semoga pada penyampaian laporan tahun berikutnya dapat lebih terarah dan dapat memenuhi harapan sesuai ketentuan.

Wabillahi taufiq Walhidayah

Bulukumba, Maret 2024

PARAF HEIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KABAG ORGANISASI	



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023, yang diformulasikan dari hasil kinerja Perangkat Daerah. Hal ini dikarenakan setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak- pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Laporan kinerja tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini setiap Perangkat Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-pratek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Bulukumba tahun 2023. dilaksanakan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Laporan kinerja ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Laporan Kinerja Kabupaten Bulukumba tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban tahun pertama atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba 2021-2026. Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk mewujudkan “Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba menunjukkan beberapa kesimpulan:

Pertama: Terdapat 5 sasaran strategis yang mencapai hasil di atas 100 persen (sangat berhasil) yaitu sasaran strategis (5),(9),(10),(11),(12),(13); 0 sasaran tercapai dengan predikat berhasil; 4 sasaran tercapai dengan predikat cukup berhasil yaitu sasaran strategis (1), (2), (3), dan (4); dan 3 sasaran tercapai dengan predikat kurang berhasil yaitu sasaran strategis (6), dan (7); Dan 1 sasaran yang tidak berhasil yaitu sasaran strategis (8); Secara kumulatif, rata-rata capaian ke-13 sasaran strategis sebesar 128,83 persen atau dengan predikat Sangat Berhasil.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

Kedua: Dari 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD, maka terdapat 9 indikator kinerja yang telah memenuhi kriteria sangat berhasil atau 36 persen, 4 indikator kinerja yang telah memenuhi kriteria berhasil atau 16 persen, 8 indikator kinerja dengan kriteria cukup berhasil atau 32 persen, 4 indikator kinerja dengan kriteria kurang berhasil atau 8 persen dan 4 indikator kinerja lainnya dengan kriteria tidak berhasil atau 16 persen.

Ketiga: Dari 261 indikator sasaran strategis tahun 2023 terhadap target jangka menengah didapatkan hasil yaitu 200 indikator sasaran dengan notifikasi hijau (sudah tercapai/on track/on trend) atau 76.63 persen, 40 indikator sasaran dengan notifikasi kuning (butuh kerja keras) atau 15.33 persen, dan 21 indikator sasaran dengan notifikasi merah (sulit tercapai) atau 8.05 persen.

Keempat: Pendapatan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 1.557.182.937.302,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.501.267.117.490,04 atau 96,41 persen. Target pendapatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Target pendapatan tahun 2022 sebesar Rp 1.464.329.512.889,00 dan di tahun 2022 naik menjadi Rp 1.557.182.937.302,00 atau naik 6.34 persen. Sedangkan realisasi pendapatan mengalami peningkatan yaitu dari Rp 1.375.869.878.068,34 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi Rp 1.501.267.117.490,04 pada tahun 2023 atau meningkat 9.11 persen, Target belanja daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Target belanja tahun 2022 sebesar Rp 1.581.422.605.370,00 dan di tahun 2023 naik menjadi Rp 1.646.353.865.572,00 atau naik 4,10 persen. Sedangkan realisasi belanja mengalami peningkatan yaitu dari Rp 1.355.511.903.577,49 pada tahun 2021 dan turun menjadi Rp 1.344.950.356.924,50 pada tahun 2022 atau turun 0.79 persen. Alokasi Anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2023 sebesar Rp 1.646.353.865.572,00 terealisasi sebesar Rp 1.543.903.837.466,51 atau 93.78 persen, dengan rincian sebagai berikut: belanja operasi sebesar Rp. 1.072.850.880.759,00 terealisasi sebesar Rp 1.012.987.899.391,86 atau 94.42 persen, belanja modal sebesar Rp. 392.686.766.898,00 dan terealisasi sebesar Rp. 353.682.271.435,65 atau 90.07 persen, belanja tak terduga sebesar Rp. 1.133.752.969,00 dan terealisasi sebesar Rp. 66.830.500,00 atau 5.89 persen dan belanja transfer sebesar Rp.179.682.464.946,00 dan terealisasi sebesar Rp. 177.166.836.139,00 atau 98,60 persen.

Kelima: Anggaran belanja daerah sebesar Rp1.646.353.865.572 terealisasi sebesar Rp1.543.903.837.467 atau 93.78 persen dari anggaran. dari besaran belanja daerah tersebut, anggaran yang langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja daerah yang ada dalam RPJMD tahun 2023 sebesar Rp Rp 974.967.503.557 terealisasi sebesar Rp888.189.281.684 atau 91,10 persen dari anggaran, dan selebihnya merupakan belanja pendukung pada anggaran pokok (program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program dan kegiatan seluruh kecamatan) sebesar Rp

671.386.362.015 terealisasi sebesar Rp 655.714.555.782 atau 97,67 persen dari anggaran.

Keenam: Dari hasil kinerja pemerintah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023 telah berhasil meraih beberapa penghargaan yaitu:

PENGHARGAAN/PRESTASI TINGKAT NASIONAL:

1. Piala Adipura Kategori Kota Kecil Tahun 2022 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya kepada Bupati Bulukumba pada tanggal 28 Februari 2023 pada tingkat Nasional
2. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Amin Adab Bangun kepada Bupati Bulukumba pada tanggal 23 Mei 2023 pada tingkat Nasional
3. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Pratama oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Bupati Bulukumba pada tanggal 22 Juli 2022 pada tingkat Nasional
4. Tokoh Penggerak Koperasi Madya kepada Bupati Bulukumba oleh Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) kepada Bupati Bulukumba pada tanggal 23 Juli 2023 pada tingkat Nasional
5. Penghargaan Inovasi Administrasi Negara (INAGARA Award) Tahun 2023 oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto kepada Bupati Bulukumba pada tanggal 8 Agustus 2023 pada tingkat Nasional
6. Penghargaan Atas Dukungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba terkait Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih Tahun 2023 oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian kepada Wakil Bupati Bulukumba pada tanggal 8 September 2023 pada tingkat Nasional
7. Penghargaan sebagai Tertinggi Capaian Akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) IUD dan IMPLAN oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat, Mayjend TNI Dr. dr Sukirman kepada Kepala Dinas DPPKB dan PPA pada tanggal 23 Oktober 2023 pada tingkat Nasional
8. Penghargaan Pembina Program Kampung Iklim (Proklim) Tahun 2023 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya kepada Kepala DLHK pada tanggal 24 Oktober 2023 pada tingkat Nasional
9. Penghargaan Program Kampung Iklim Tahun 2023 Kategori Utama oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya kepada Kepala Desa Manyampa Kecamatan Ujungloe pada tanggal 24 Oktober 2023 pada tingkat Nasional
10. Penghargaan Kabupaten Sehat/ Swasti Saba Kategori Padapa oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin kepada Wakil Bupati Bulukumba pada tanggal 28 November 2023 pada tingkat Nasional

PENGHARGAAN/PRESTASI TINGKAT PROVINSI:

1. Penghargaan Kabupaten Bulukumba sebagai Daerah dengan Komitmen Tinggi dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender dan Inklusif oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman kepada Bupati Bulukumba pada tanggal 17 April 2023 pada tingkat Provinsi

PENGHARGAAN/PRESTASI TINGKAT PROVINSI:

1. Penghargaan Penyetor Pajak Pusat Tertinggi untuk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan Sulsebartra, Arridel Mindra kepada Bupati Bulukumba pada tanggal 8 Februari 2023 pada tingkat Regional
2. Penghargaan Penyalur Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Terbaik 2023 oleh Kepala KPPN Bantaeng, Moch Fajar Adcha kepada Kepala BPKPD pada tanggal 20 Desember 2023 pada tingkat Regional

Bulukumba, Maret 2024



PARAF HEIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KABAG ORGANISASI	

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
BABI Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Sejarah Singkat Kabupaten Bulukumba	2
1.4 Kondisi Geografis Daerah	3
1.5 Gambaran Demografi Daerah	6
1.6 Kondisi Perekonomian Daerah	9
1.7 Struktur Pemkab Bulukumba	14
1.8 Sumber Daya Manusia Pemkab Bulukumba	18
1.9 Metode Pengukuran Kinerja	21
1.10 Permasalahan Utama	22
1.10 Sistematika Penulisan	22
BAB II Perencanaan Kinerja	
2.1 RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021	24
2.2 Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran	31
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Capaian Kinerja IKU	47
3.2 Capaian Kinerja IKD	49
3.3 Realisasi Anggaran	163
BAB IV Penutup	170
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rata-rata PDRB Perkapita Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2023 (Juta Rupiah).....	10
Tabel 2	Perkembangan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2014-2023	11
Tabel 3	Peranan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2019 -2023.....	12
Tabel 4	Laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2019-2023 (persen)	13
Tabel 5	Rata-rata PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014-2023 (juta rupiah)	14
Tabel 6	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemkab Bulukumba Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2023	19
Tabel 7	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemkab Bulukumba Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2022.	19
Tabel 8	Rencana Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023.....	42
Tabel 9	Alokasi Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	43
Tabel 10	Ringkasan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023	163
Tabel 11	Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	167

Daftar Gambar

Gambar 1	Peta Administrasi (Desa/Kelurahan) per kecamatan Kabupaten Bulukumba	3
Gambar 2	Luas wilayah Kabupaten Bulukumba menurut kecamatan (Km ²) Tahun 2023.....	4
Gambar 3	Jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba menurut kecamatan (jiwa) Tahun 2023	6
Gambar 4	Persentase jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba berdasarkan jenis kelamin Tahun 2023.....	6
Gambar 5	Relevansi perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulukumba (metode baru) dengan IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan IPM nasional (Indonesia) Tahun 2019 - 2023.....	7
Gambar 6	Perkembangan IPM Kabupaten Bulukumba metode lama dengan metode baru Tahun 2013 – 2023	8
Gambar 7	Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 – 2023 (jiwa)	9
Gambar 8	PerkembanganTingkat kemiskinan Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 – 2023 (persen)	9
Gambar 9	Pertumbuhan PDRB Kab.Bulukumba Tahun 2014- 2022 ADHB dan ADHK	11
Gambar 10	Rata – Rata PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 – 2023 (Juta Rupiah)	14
Gambar 11	Persentase jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Berdasarkan jenis kelamin	18
Gambar 12	Persentase jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) Pemkab. Bulukumba Tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin	18
Gambar 13	Persentase jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kab. Bulukumba Tahun 2023 berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan	19
Gambar 14	Persentase jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) Pemerintah Kab. Bulukumba Tahun 2023 berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan	20
Gambar 15	Persentase jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bulukumba berdasarkan golongan Tahun 2023	20
Gambar 16	Persentase jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja Kabupaten Bulukumba berdasarkan Golongan Tahun 2023	21
Gambar 17	Perbandingan antara target dan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023	165
Gambar 18	Perbandingan antara target dan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020- 2021	166

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semangat reformasi dan otonomi daerah telah menimbulkan perubahan yang strategis dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintah semakin menjadi sorotan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), sedikitnya harus terdapat 3 prinsip utama yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan tersebut yaitu: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Berdasarkan prinsip tersebut, maka penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam mengukur keberhasilan/kegagalan proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuannya memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani di awal tahun dengan fokus utama pada pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas atas penggunaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maka laporan kinerja tingkat pemerintah kabupaten disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPPN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba selama tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi.

Tujuan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberimandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Sejarah Singkat Kabupaten Bulukumba

Bulukumba lahir dari suatu proses perjuangan panjang yang mengorbankan harta, darah, dan nyawa. Perlawanan rakyat Bulukumba terhadap Kolonial Belanda dan Jepang menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 diawali dengan terbentuknya “Barisan Merah Putih” dan “Laskar Brigade Pemberontakan Bulukumba Angkatan Rakyat”.

Organisasi yang terkenal dalam sejarah perjuangan ini, melahirkan pejuang yang berani mati menerjang gelombang dan badai untuk merebut cita-cita kemerdekaan sebagai wujud tuntutan hak asasi manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Dari sisi budaya Bulukumba telah tampil menjadi sebuah “legenda modern”, dalam kancah percaturan kebudayaan nasional. Bahkan melalui industri budaya dalam bentuk perahu baik itu perahu jenis *Pinisi*, *Padewakkang*, *Lambo*, *Pajala*, maupun jenis *Lepa-lepa* yang telah berhasil mencuatkan nama Bulukumba di dunia internasional. Kata layar memiliki pemahaman terhadap adanya subyek yang bernama perahu sebagai suatu refleksi kreativitas masyarakat Bulukumba.

Masyarakat Bulukumba juga telah bersentuhan dengan ajaran agama Islam sejak awal abad ke-17 Masehi, yang diperkirakan tahun 1605 M. Ajaran Agama Islam ini dibawa oleh 3 ulama besar dari Pulau Sumatera yang masing-masing bergelar Dato Tiro (Bulukumba), Dato Ribandang (Makassar), dan Dato Patimang (Luwu). Ajaran Agama Islam yang berintikan tasawwuf ini menumbuhkan kesadaran religius bagi penganutnya dan menggerakkan sikap keyakinan mereka untuk berlaku zuhud, sucilahir batin selamat dunia dan akhirat dalam kerangka tauhid “*appasewang*” atau meng-Esakan Allah SWT.

Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978 tentang Lambang Daerah. Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya), maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Hari Jadi Kabupaten Bulukumba. Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan Bupati pertama yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960.

1.4. Kondisi Geografis Daerah

1.4.1. Batas Administrasi

Kabupaten Bulukumba berjarak ± 153 km dari Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan) terletak di bagian selatan dari jazirah Sulawesi Selatan, berada diantara 05°20'-05°40' LS dan 119°58'-120°28' BT dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Sinjai;
- Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone;
- Sebelah Selatan berbatasan Pulau Selayar;
- Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Bantaeng;



Gambar 1.

Peta Administrasi (Desa/Kelurahan) per kecamatan Kabupaten Bulukumba.

sumber : Perda RTRW Kab.Bulukumba tahun 2012-2032

Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan, 109 desa, dan 27 kelurahan, dengan perincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (km ²)
1	Gantarang	18	3	15,03	21	173,51
2	Ujungbulu	0	9	1,25	9	14,44
3	Ujung Loe	12	1	12,50	13	144,31

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (km ²)
4	Bontobahari	4	4	9,40	8	108,60
5	Bontotiro	12	1	6,78	13	78,34
6	Herlang	6	2	5,96	8	68,79
7	Kajang	17	2	11,18	19	129,06
8	Bulukumba	14	3	14,84	17	171,33
9	Rilau Ale	14	1	10,18	15	117,53
10	Kindang	12	1	12,88	13	148,67
Bulukumba		109	27	100,00	136	1.154,58

Dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba, 7 kecamatan diantaranya termasuk daerah pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, dan Kecamatan Herlang. Sedangkan 3 kecamatan lainnya merupakan sentra pengembangan pertanian dan perkebunan yaitu: Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, dan Kecamatan Bulukumba.

Selain itu Kabupaten Bulukumba juga mempunyai 2 buah pulau yang terdapat di Kecamatan Bontobahari yakni Pulau Liukang Loe (berpenghuni) dan Pulau Kambing (tidak berpenghuni).

Panjang garis pantai Kabupaten Bulukumba yakni 128 km dengan luas laut ± 204,83 km² menjadikan Kabupaten Bulukumba sebagai daerah bahari/maritim dengan salah satu potensi unggulannya di bidang perikanan dan kelautan.

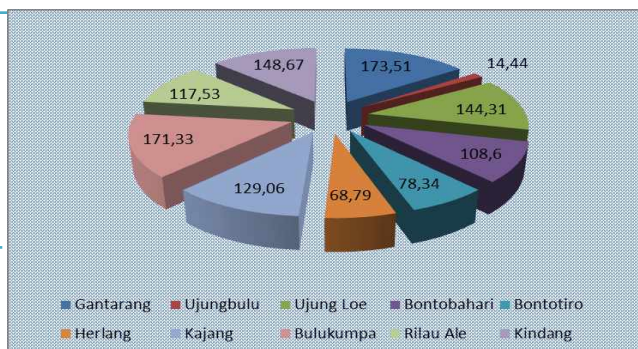
1.4.2. Luas Wilayah

Kabupaten Bulukumba tercatat memiliki luas 1.154,58 km² atau 1,85 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditinjau dari segi luas wilayah maka Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Bulukumba merupakan dua wilayah kecamatan terluas masing-masing seluas 173,51 km² dan 171,33 km² atau sekitar 30 persen dari luas kabupaten. Kemudian disusul kecamatan lainnya dan yang terkecil adalah Kecamatan Ujung bulu yang merupakan pusat kota kabupaten dengan luas 14,44 km² atau hanya sekitar 1 persen.

Gambar 2.

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba menurut kecamatan

Sumber: BPS Kab. Bulukumba
(Bulukumba Dalam Angka Tahun 2023)



1.4.3. Kondisi Topografi

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapaisekitar 50,28 persen maka dataran tinggi mencapai 49,72 persen.

Berdasarkan ketinggian tempat maka wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki topografi yang bervariasi antara 0 meter hingga di atas 1.000 meter dari permukaan laut (mdpl) yang dapat dibagi ke dalam 3 satuan ruang morfologi yaitu:

- **Morfologi Daratan**

Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s.d. 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, dan Kecamatan Herlang.

- **Morfologi Bergelombang**

Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s.d. 100 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa, dan Kecamatan Rilau Ale.

- **Morfologi Perbukitan**

Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke Utara dengan ketinggian 100 s.d. diatas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa, dan Kecamatan Rilau Ale.

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C–27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan dengan klasifikasi iklim lembab atau agak basah.

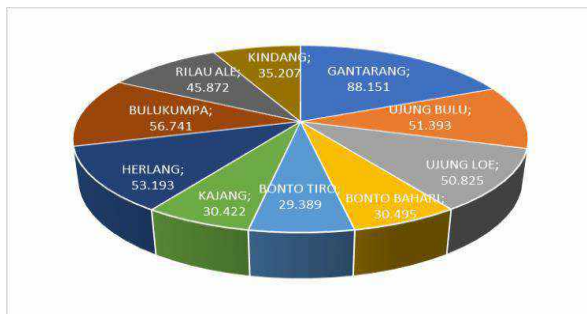
Tanah di Kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah *Latosol* dan *Mediteran*. Secara spesifik terdiri atas tanah *Alluvial Hidromorf* coklat kelabu dengan bahan induk endapan liat pasir terdapat di pesisir pantai dan sebagian di daratan bagian utara. Sedangkan tanah *regosol* dan *mediteran* terdapat pada daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat.

1.5. Gambaran Demografi Daerah

1.5.1. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulukumba berjumlah 471.688 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan.

Dari 10 kecamatan tersebut, Kecamatan Gantarang mempunyai jumlah penduduk terbesar yaitu 88.151 jiwa atau 18,7% dan Kecamatan Bontotiro tercatat memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 29.389 jiwa atau 6.2%.



Gambar 3.

Jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba menurut kecamatan

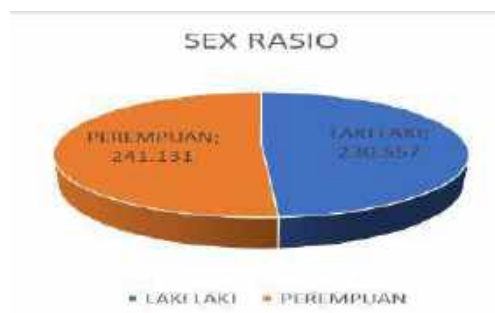
Sumber: BPS Kab. Bulukumba

Terjadi peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba jika dibandingkan dengan tahun lalu yaitu dari 443.292 jiwa tahun 2022 menjadi 471.688 jiwa di Tahun 2023, sehingga bertambah sebanyak 28.396 jiwa dibandingkan tahun lalu.

Penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin laki-laki yaitu 230.557 atau 48,88 persen jiwa sedangkan perempuan sebesar 241.131 atau 51,12 persen, dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) 95,6, yang berarti dalam setiap 100 orang penduduk perempuan maka terdapat 95 orang penduduk laki-laki.

Gambar 4.

Persentase jumlah penduduk Kab. Bulukumba berdasarkan jenis kelamin Tahun 2023.

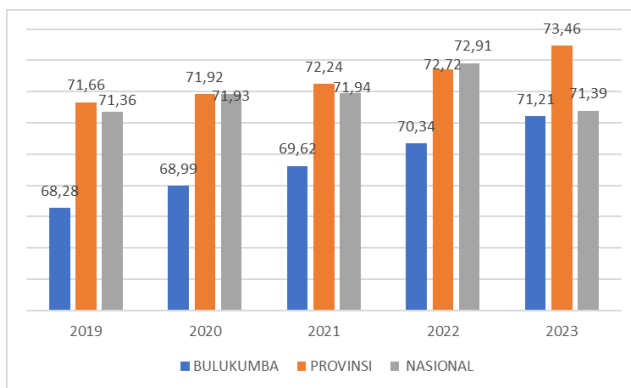


Sumber: BPS Kab. Bulukumba (Bulukumba Dalam Angka Tahun 2024)

Kepadatan penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2023 yaitu 403,12 jiwa per/km². Kepadatan Penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Ujung bulu dengan kepadatan sebesar 3.559,07 jiwa/km², hal ini disebabkan karena kecamatan tersebut merupakan ibukota Kabupaten Bulukumba dan Kecamatan terendah di Kecamatan Bonto Bahari sebesar 235.39 jiwa/km².

1.5.2. Kondisi IPM

Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana yang ada di Provinsi Sulawesi selatan yaitu 72.82. IPM tertinggi Tahun 2022 ditempati oleh Kota Makassar yaitu sebesar 83.12 sedangkan IPM yang terendah masih ditempati oleh Kabupaten Jeneponto yaitu sebesar 65,13.



Gambar 5.

Relevansi perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulukumba (metode baru) dengan IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan IPM Indonesia (Nasional) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi Sulsel tahun 2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71.21. Angka ini tumbuh sebesar 0.87 persen dibandingkan dengan IPM tahun 2022 yang sebesar 70.34. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 menduduki peringkat ke 14 dari 24 kabupaten/kota

Trend peningkatan IPM Kabupaten Bulukumba dari tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan dan perkembangannya relevan dengan peningkatan IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan IPM Nasional. Posisi IPM Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 yaitu 71.21 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 70.34, angka tersebut masih di bawah IPM Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 73.46 dan IPM Indonesia secara nasional yaitu 71.39 meningkat 1.48 poin (2.03 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Saat ini perhitungan IPM oleh BPS di Indonesia menggunakan metode baru. Metode tersebut mengadopsi teknik perhitungan IPM yang telah digunakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam penyusunan laporan tahunan pembangunan manusia (*Human Development Report*) sejak Tahun 2010.

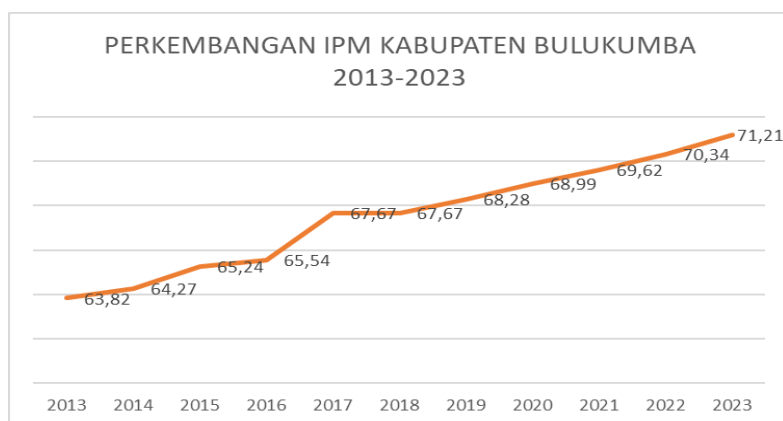
Penggunaan metode baru dalam perhitungan IPM memberi sejumlah konsekuensi yang patut diperhatikan oleh para pengguna data, terutama ketika IPM dengan metode baru dijadikan dasar perencanaan dan evaluasi capaian pembangunan manusia. Pertama, perubahan metode perhitungan berdampak penurunan level IPM. Secara umum, skor IPM dengan metode baru lebih rendah dibanding skor IPM dengan metode lama untuk tahun yang

sama. Kedua, peringkat IPM menurut provinsi juga mengalami perubahan. Karena itu, perbandingan peringkat antar waktu dengan menggunakan metode IPM yang berbeda tidak bisa dilakukan.

Walaupun memberi sejumlah konsekuensi berbeda, IPM dengan metode baru tetap memberi gambaran yang sama ihwal tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memacu capaian pembangunan manusia.

Salah satu tantangan tersebut adalah tingginyadisparitasatau kesenjangan capaian pembangunan manusia antarwilayah, baik antarprovinsi, maupun antarkabupaten/kota dalam provinsi. Kesenjangan tidak hanya terjadi secara agregat tapi juga pada masing-masing komponen pembangunan manusia (kesehatan, pendidikan, dan standar hidup). Karena itu, pemerataan pembangunan, baik antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat, merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena tanpa pemerataan pembangunan, pembangunan manusia Indonesia akan sulit ditingkatkan.

perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulukumba berikut akan kami gambarkan perbandingan IPM Kabupaten Bulukumba mulai tahun 2013-2023 sebagai berikut:



Gambar 6. Perkembangan IPM Kab. Bulukumba Tahun 2013-2023

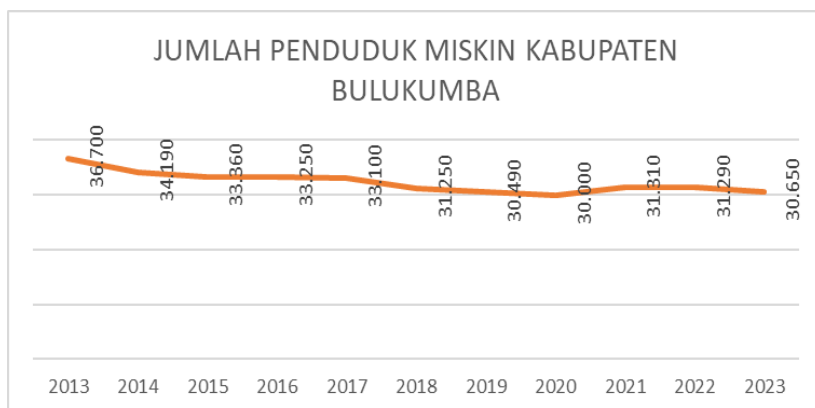
Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba (Indeks Pembangunan Manusia Kab. Bulukumba Tahun 2023)

1.5.3. Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023 sebesar 7,22 persen atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 7,39 persen. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023 mencapai 30.650 jiwa. Jumlah ini menurun sebanyak 640 jiwa dibandingkan tahun 2022. Secara umum selama 5 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulukumba terus mengalami kenaikan baik dari sisi persentase penduduk miskin maupun jumlah penduduk miskin.

Selama kurun waktu 2014-2023 terjadi naik turun (fluktuatif) jumlah penduduk miskin Kabupaten Bulukumba tetapi hal tersebut berlaku secara umum hampir diseluruh wilayah Indonesia, hal tersebut lebih disebabkan oleh perkembangan dinamika kebijakan nasional seperti kenaikan harga BBM

yang memicu naiknya inflasi barang kebutuhan pokok yang berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin Tingkat kemiskinan Kabupaten Bulukumba



Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2013-2023 (jiwa)

Sumber: bulukumba dalam angka 2024/ bps kabupatenbulukumba

tahun 2023 sebesar 7,22 persen jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan penurunan kemiskinan Kabupaten Bulukumba tahun 2022 yaitu 7,39 persen, atau mengalami penurunan sebesar 0,17 persen.



Gambar 8.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kab. Bulukumba Tahun 2013-2023 (persen)

Sumber: BPS Kab. Bulukumba. 2024)

Tingkat kemiskinan Kabupaten Bulukumba tahun 2023 masih lebih rendah yaitu 7,22 persen jika dibandingkan dengan persentase tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 8,70 persen dan persentase tingkat kemiskinan Indonesia (Nasional) yaitu 9,36 persen.

Jika diurut berdasarkan rendahnya persentase tingkat kemiskinan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, maka persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Bulukumba tahun 2023 berada pada urutan ke 6 (enam) terendah dengan persentase 7,22 persen, tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Makassar dengan 5,07 persen dan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Pangkep dengan nilai persentase yang sama yaitu 13,4 persen.

1.6. Kondisi Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian suatu daerah/wilayah sangat tergantung pada indikator ekonomi yang merupakan cermin dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor serta pergeseran struktur perekonomian daerah, maka diperlukan penghitungan PDRB Kabupaten.

BPS melakukan adaptasi pencatatan statistik nasional dengan melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 menjadi tahun 2010. Perubahan tahun dasar PDB mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *System of National Account* (SNA 2008). SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan perhitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Manfaat perubahan tahun dasar PDRB menyebabkan informasi perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas data PDRB, dan menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional. Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha metode baru menggunakan KBLI 2009, sebelumnya PDRB dengan Tahun dasar 2000 terdiri dari 9 klasifikasi jenis usaha dan PDRB dengan Tahun dasar 2010 menjadi 17 klasifikasi jenis usaha.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, lapangan usaha Industri Pengolahan menempati posisi pertama dalam hal Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian sebesar 6,54 persen. Beberapa lapangan usaha tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan Besardan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Keuangan, Jasa Perusahaan, dan lapangan usaha jasa lainnya, PDRB perkapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk dan sering digunakan sebagai indikator dalam mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Untuk lebih jelasnya perbandingan pendapatan perkapita tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

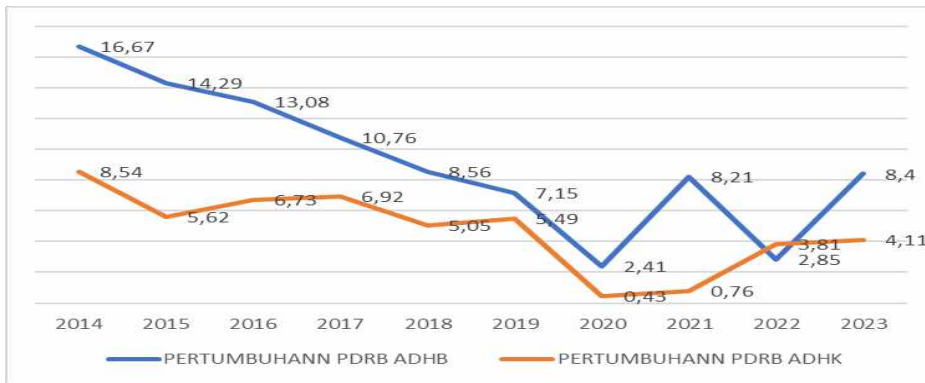
Rata-rata PDRB Perkapita

Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2023 (Juta Rupiah)

Tahun	Kabupaten Bulukumba	Provinsi Sulawesi Selatan
2014	20,54	35,34
2015	23,36	39,95
2016	26,72	43,86
2017	29,03	47,82
2018	31,55	52,64
2019	33,96	57,18
2020	33.34	55.68
2021	36.06	39.66
2022	38.66	65.35
2023	41.90	69.70

Sumber: PDRB Kab/Kota se Prov. Sulsel menurut Lapangan Usaha 2014-2023

Grafik perkembangan pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulukumba tahun 2014-2023 berdasarkan harga berlaku dan harga konstan, dapat kita gambarkan sebagai berikut:



Gambar 9.
Pertumbuhan PDRB
Kab. Bulukumba
Tahun 2014 -2023
ADHB dan ADHK.

Sumber: Bulukumba
dalam Angka
Kab. Bulukumba,
2024

Kontribusi PDRB Kabupaten Bulukumba terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sebesar 5.09 persen, dan secara akumulatif rata-rata kontribusi PDRB Kabupaten Bulukumba terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir mencapai persen.

Tabel 2.

Perkembangan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab. Bulukumba Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2023

Tahun	PDRB Sulawesi selatan (Miliar Rp)	PDRB Kab. Bulukumba (Miliar Rp)	% PDRB Kab. Bulukumba terhadap PDRB Prov. Sulsel
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	298.033,80	8.374,05	2,81
2015	340.390,21	9.568,40	2,81
2016	377.110,00	10.769,94	2,86
2017	415.740,00	12.068,74	2,9
2018	462.740,00	13.193,58	2,85
2019	505.578,92	14.214,59	2,81
2020	504.059,37	14.565,49	2,89
2021	545.230,03	15.868,86	2,91
2022	605.148,86	17.233,31	2,85
2023	652.574,05	18.870,56	2,89
Rata-rata			2,85

Sumber: PDRB Kab Bulukumba, menurut Lapangan Usaha 2014-2023

Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai distribusi sumbangan sektor lapangan usaha terhadap total PDRB. Ini dapat diartikan bahwa peranan sektor di setiap usaha dapat dilihat dari struktur ekonomi di wilayah tersebut.

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Bulukumba tidak mengalami pergeseran dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Bulukumba. Sumbangan terbesar pada tahun 2023, dihasilkan oleh beberapa lapangan usaha sebagai berikut:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
2. Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor;
3. Konstruksi;
4. Industri Pengolahan, dan
5. Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Tabel 3.

**Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2019-2023 (%)**

NO (1)	LAPANGAN USAHA (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37.13	36.86	37.38	37,10	37,59
B	Pertambangan dan Penggalian	2.71	2.75	2.64	2,45	2,46
C	Industri Pengolahan	6,85	6,52	6,48	6,68	6,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,12	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	10.18	10.60	10,65	11,03	11,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.19	16.92	16.92	16,93	16,59
H	Transportasi dan Pergudangan	2,39	2,07	2,13	2,31	2,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,76	0,73	0,72	0,80	0,81
J	Informasi dan Komunikasi	3,23	3,54	3,47	3,46	3,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,53	3,76	3,82	4,05	4,08
L	Real Estate	4,35	4,30	4,09	4,05	3,91
M, N	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,39	6,31	6,11	5,64	5,34
P	Jasa Pendidikan	3,01	3,27	3,19	2,95	2,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,31	1,40	1,41	1,44	1,43
R,S,T, U	Jasa Lainnya	0,80	0,79	0,82	0,91	0,94
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: PDRB Kab Bulukumba, menurut Lapangan Usaha 2019-2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Bulukumba tahun 2023 mencapai 4,11 persen, sedangkan tahun 2022 sebesar 3.81 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Jasa Perusahaan sebesar 11.30 persen.

Adapun lapangan usaha lainnya juga mencatat pertumbuhan yang positif walaupun beberapa lapangan usaha pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan tahun lalu, tetapi yang menggembirakan adalah laju pertumbuhan pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh positif sebesar 37.38 persen.

Tabel 4.

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (%)

NO	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,13	-1,12	3,65	0,61	1.07
B	Pertambangan dan Penggalian	3,14	2,09	3,06	-2,31	7.17
C	Industri Pengolahan	11,76	-3,60	5,72	8,41	5.09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,23	3,77	8,91	12,63	10.57
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,72	4,98	0,01	9,89	2.04
F	Konstruksi	3,27	5,11	5,12	7,12	10.77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,93	-1,25	6,51	5,37	4.25
H	Transportasi dan Pergudangan	9,68	-14,41	5,95	10,17	5.57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,23	-1,99	5,88	19,98	7.67
J	Informasi dan Komunikasi	7,66	11,92	4,42	6,79	5.17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,65	9,00	7,54	7,80	7.89
L	Real Estate	2,18	1,03	3,28	6,19	4.49
M, N	Jasa Perusahaan	10,53	-4,26	6,80	-3,11	8.19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,35	-0,43	4,36	-0,41	2.24
P	Jasa Pendidikan	3,31	9,27	4,12	-0,19	3.54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,11	6,31	6,39	10,07	7.28
R,S,T,U	Jasa Lainnya	11,92	-1,21	8,81	17,62	11.64
Produk Domestik Regional Bruto		5,49	0,43	4,76	3,81	4.11

Sumber: PDRB Kab Bulukumba, menurut Lapangan Usaha 2019-2023 BPS 2024

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat di Kabupaten Bulukumba, salah satu indikator yang dapat dipakai adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Pada tahun 2023 PDRB perkapita Kab. Bulukumba mencapai 41.90 juta rupiah, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 38.55 juta rupiah, atau tumbuh sebesar 8.69 persen.

Peningkatan PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bulukumba terlihat sangat cepat, pada tahun 2019 PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bulukumba mencapai 33.96 juta rupiah dan pada tahun 2023 telah meningkat mencapai 41.90 juta rupiah atau meningkat 23.38 persen selama kurun waktu 5 tahun. Dibandingkan dengan PDRB perkapita penduduk Sulawesi Selatan, maka PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bulukumba masih lebih rendah. PDRB per kapita penduduk Sulawesi Selatan sudah mencapai 69.70 juta rupiah pada tahun 2023.

Tabel 5.

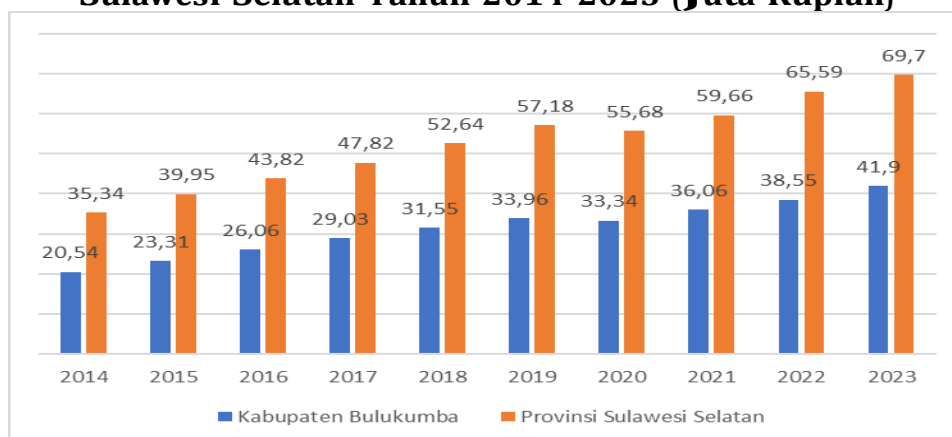
Rata-rata PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2023 (juta Rupiah)

Tahun	Kabupaten Bulukumba	Provinsi Sulawesi Selatan
2014	20,54	35,34
2015	23,31	39,95
2016	26,06	43,82
2017	29,03	47,82
2018	31,55	52,64
2019	33,96	57,18
2020	33,34	55,68
2021	36,06	59,66
2022	38,55	65,59
2023	41,90	69,70

Sumber: PDRB Kab/Kota se Prov. Sulsel menurut Lapangan Usaha 2014-2023, BPS 2024

Gambar 10.

Rata-rata PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2023 (Juta Rupiah)



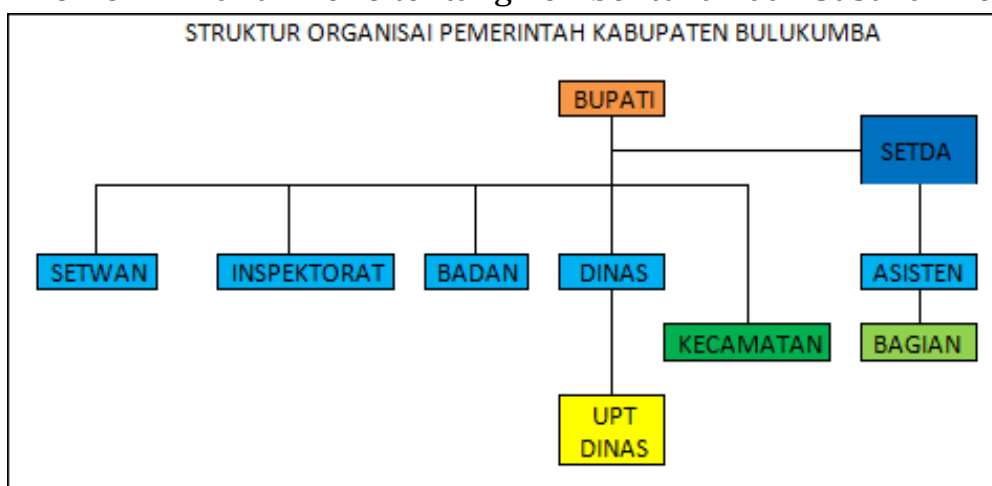
1.7. Struktur Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Perangkat Daerah merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi- fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk menyusun dan menetapkan perangkat daerahnya sesuai kebutuhan.

Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola organisasinya, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dari penyelenggara pemerintahan di dalam merumuskan, merencanakan, dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah ke dalam pola organisasi pemerintah daerah.

Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat



Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat Daerah, 18 (Delapan Belas) Dinas, 5 (lima) Badan, dan kecamatan yang berjumlah 10 (sepuluh) sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah H. A. Sulthan Daeng Radja telah dibentuk sebagai UPT. Adapun bagan struktur organisasi pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah kabupaten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengantugas dan fungsinya.

Sekretariat DPRD

Sekretaris DPRD kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis lingkup Sekretariat Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Sekretariat Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat Daerah;
- d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan dan fungsinya.

Inspektur Daerah

Inspektur Daerah kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasanlainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kabupaten

Kepala Dinas Daerah kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dapatdiuraikan bahwa perangkat daerah terdiri dari 18 (Delapan Belas) Perangkat Daerah berbentuk Dinas yaitu:

1. Dinas Pendidikan danKebudayaan.
2. DinasKesehatan.

3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
4. Dinas Sosial.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
7. Dinas Perikanan.
8. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
10. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah.
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
13. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah.
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
16. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17. Dinas Perhubungan.
18. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Badan Kabupaten

Kepala Badan daerah kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya:

- a. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan 5 (lima) Perangkat Daerah yang berbentuk badan yaitu sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat kabupaten yang dipimpin seorang camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Organisasi kecamatan terdiri atas camat, sekretaris

kecamatan, dan seksi-seksi. Kabupaten Bulukumba terbagi atas 10 kecamatan yang terdiri dari 109 desa dan 27 kelurahan. Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba diatur melalui Peraturan Bupati.

1.8. Sumber Daya Manusia Pemkab Bulukumba

Pemerintah Kabupaten Bulukumba saat ini memiliki kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Tercatat Tahun 2022 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebanyak 6.752 orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 5.853 orang sedangkan Pegawai Pemerintah dengan

Perjajian Kerja (PPPK) sebanyak 899 orang atau PNS berkurang 1 orang atau berkurang sebesar 0,017 persen dari tahun 2021 dengan komposisi laki-laki sebanyak 2.248 orang (38,40 persen) dan Perempuan sebanyak 3.605 orang (61,59 persen). Sedangkan PPPK dengan komposisi laki-laki sebanyak 202 orang (22,46 persen) dan perempuan sebanyak 697 orang (77,53 persen). dibandingkan tahun 2016 yang terdata sebanyak 6.540 orang

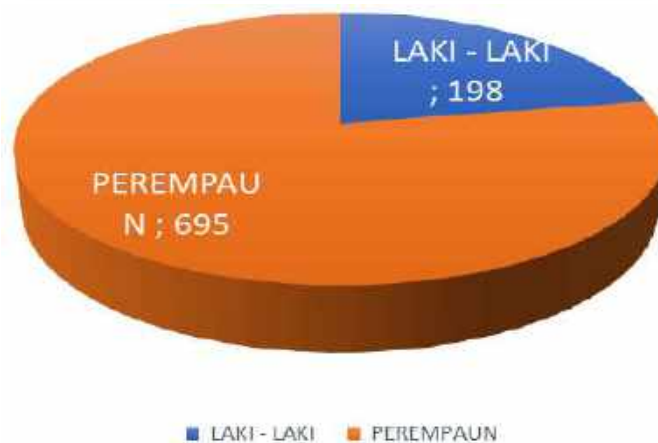
Gambar 11.

Persentase jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab. Bulukumba Tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin.
Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2024



Gambar 12.

Persentase jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) Pemkab. Bulukumba Tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin.
Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2023



Berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S1 (Sarjana) yaitu sebanyak 3.828 orang (65.04 persen), kemudian SLTA sebanyak 679 orang (11.54 persen), kemudian yang ketiga D-I s/d D-IV sebanyak 791 orang (13.44 persen). Selain itu, jenjang pendidikan S2 cukup banyak dengan menempati posisi ke empat yakni sebanyak 536 orang (9.11 persen) dan S3 sebanyak 8 orang (0.14 persen). Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah

Kabupaten Bulukumba memiliki aparatur SDM yang dapat dikatakan baik dari segi tingkat pendidikannya. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) jenjang pendidikan yang ditamatkan S1 (Sarjana) sebanyak 872 orang (97,65 persen) dan DIII (Diploma) sebanyak 21 orang (2,35 persen).

Tabel 6.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemkab. Bulukumba Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Jumlah
1	S-3	8
2	S-2	536
3	S-1	3.828
4	D-I s/d D-IV	791
5	SMU	679
6	SLTP	23
7	SD	21
	Jumlah	5.886

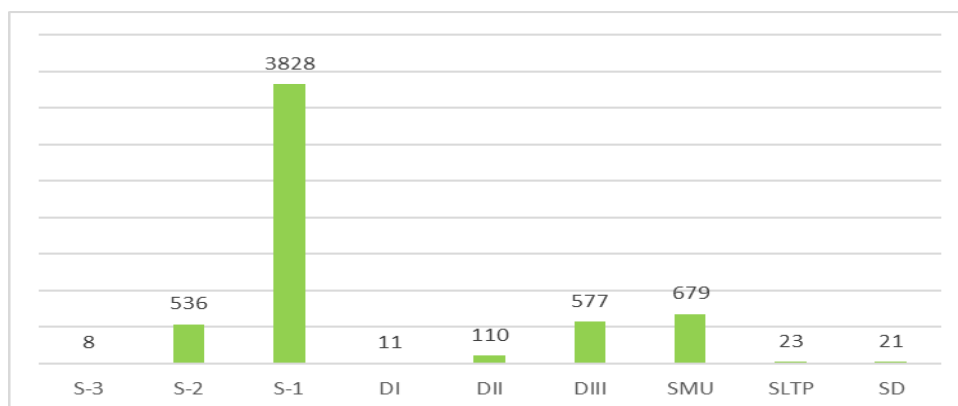
Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2022

Tabel 7.

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) Lingkup Pemkab. Bulukumba Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Jumlah
1	S-1	872
2	DIII	21
	Jumlah	893

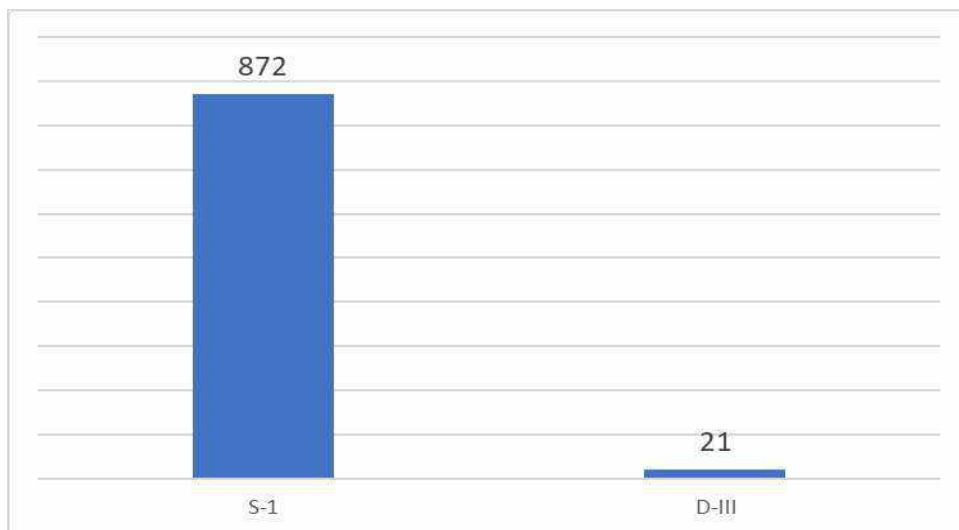
Grafik persentase banyaknya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2023 berdasarkan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan digambarkan sebagai berikut.



Gambar 13.

Persentase jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kab. Bulukumba Tahun 2023 berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 2024



Gambar 14.

Persentase jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) Pemerintah Kab. Bulukumba Tahun 2023 berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan

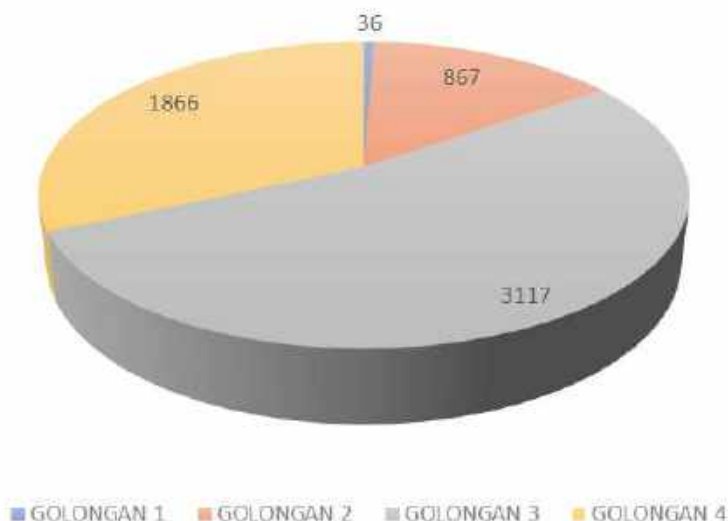
Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 2024

Sementara jika dipilah lagi berdasarkan golongannya, maka jumlah terbesar berada pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III sebanyak 3.117 orang atau 52,96 persen, kemudian golongan IV sebanyak 1.866 orang atau 31,70 persen, selanjutnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II sebanyak 867 orang atau 14,73 persen dan terakhir golongan I sebanyak 36 orang atau 0,61 persen.

Gambar 15.

Persentase jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah

Kabupaten Bulukumba berdasarkan golongan Tahun 2023

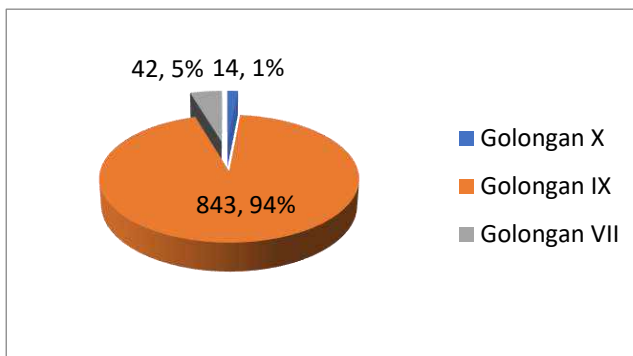


Sumber: Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2022

Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) jika dipilah berdasarkan golongannya maka jumlah terbesar ada pada golongan IX sebanyak 843 orang (93,77 persen) selanjutnya ada pada Golongan VII sebanyak 42 orang (4,67 persen) dan terakhir Golongan X sebanyak 14 orang (155, persen).

Gambar 16.
Persentase jumlah Pegawai
Pemerintah dengan Perjajian
Kerja Kabupaten Bulukumba
berdasarkan Golongan Tahun
2023

Sumber: Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM 2024



Melihat perkembangan pemerintahan yang terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dan kompleks, maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba senantiasa melakukan kegiatan peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara di daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

1.9. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Dalam laporan kinerja ini metode pengukuran dengan membandingkan antara rencana (target) kinerja yang telah ditetapkan/diperjanjikan dengan capaian (realisasi) kinerja yang dicapai pada indikator-indikator yang ada pada setiap sasaran strategis.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, selanjutnya dilakukan analisis dokumen RPJMD, IKU, RKPD, APBD, Renstra, dan Renja perangkat daerah untuk memperoleh gambaran mengenai sasaran strategis yang ditargetkan dan capaian pada tahun kelima pelaksanaan RPJMD.

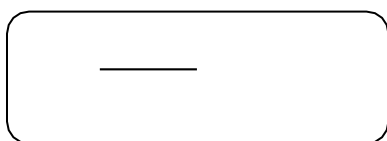
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Rumus 1 :

Digunakan apabila semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik/buruk

Misalnya :

Angka kunjungan wisatawan mancanegara Indeks Pembangunan Manusia



Rumus 2 :

Semakin tinggi/rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk/ baik.

Misalnya :

Angka buta aksara Prevalensi balita gizi buruk

Angka kematian Ibu Melahirkan

Selanjutnya dalam menentukan tingkat keberhasilan dilakukan pembobotan atas pencapaian rata-rata sebagai berikut:

- Tidak Berhasil (Di atas 0% -49,99%)
- Kurang Berhasil (Di atas 50% -79,99%)
- Cukup Berhasil (Di atas 80% - 99,99%)
- Berhasil(100%)
- Sangat Berhasil (Di atas100%)

Selanjutnya capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah/RPJMD, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional bagi target yang mempunyai SPM, kemudian menganalisis penyebab kegagalan/ keberhasilan kinerja serta alternatif solusinya, menganalisis efisiensi penggunaan sumberdaya, dan menganalisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

1.10 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

1. Peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan, pemudaran olahraga untuk SDM yang berkualitas;
2. Penguatan kewirausahaan disertai dengan pemantapan nilai dan semangat kegotongroyongan;
3. Pengembangan sektor unggulan daerah untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat;
4. Pemantapan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba;
5. Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur dasar Pemukiman;
6. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah;
7. Penguatan penanganan dampak sosial dan kesiap-siagaan bencana.

1.1.1 Sistematika Penulisan

Laporan kinerja ini mengomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan/diperjanjikan sebagai tolok ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan dilakukan identifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja di tahun selanjutnya. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Bulukumba tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I - Pendahuluan

disajikan secara singkat penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis (sejarah singkat daerah, kondisi geografis, gambaran demografis, kondisi perekonomian, struktur pemerintah daerah, sumberdaya manusia), serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II - Perencanaan Kinerja

disajikan muatan rencana pembangunan jangka menengah daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk periode 2021-2026 dan penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2022.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis meliputi: perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah/RPJMD, perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional bagi target yang mempunyai SPM, kemudian menganalisis penyebab kegagalan/keberhasilan kinerja serta alternatif solusinya, menganalisis efisiensi penggunaan sumberdaya, dan menganalisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, serta menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

Bab IV -Penutup

diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi di Tahun 2022, serta langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dimasa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 - 2026

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi kepala daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi. RPJMD ini dijabarkan dalam sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, dan program-program strategis pembangunan.

RPJMD Kabupaten Bulukumba, merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memberikan arah yang terukur untuk memudahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunandaerah. RPJMD Kabupaten Bulukumba disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional tahun 2020- 2024. Dengan adanya keterkaitan antar perencanaan yang lebih tinggi, akan mempermudah pengembangan *sharing* pembiayaan dengan pemerintah pusat untuk program-program yang akan dilakukan.

Dalam pengukuran dan evaluasi kinerja kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, digunakan tata cara evaluasi pengukuran kinerja yang dibagi dalam kinerja sektoral dan kinerja agregat. Kinerja sektoral diharapkan mampu menunjukkan tingkat capaian program-program yang dilaksanakan dan diharapkan dengan dicapainya kinerja sektoral ini kinerja agregat dapat juga dicapai. Namun, disadari bahwa pencapaian kinerja agregat tidak semata-mata merupakan kontribusi Pemerintah Kabupaten Bulukumba, tetapi merupakan kontribusi bersama-sama dari masyarakat, dunia usaha, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten sesuai dengan bobot dan perannya masing-masing. Kinerja agregat yang digunakan dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba ini seperti pertumbuhan ekonomi, pergeseran struktur ekonomi, peranan masing-masing sektor ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan sebagainya.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan sumber daya yang dimiliki dan mengupayakan sumber daya lain dalam mengimplementasikan program-program pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan perumusan RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional dan provinsi.

3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Renja Perangkat Daerah (Renja-PD).

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 tahun 2021 tanggal 18 Agustus 2021 adalah: **“Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”**. Dalam rangka mewujudkan visi kabupaten, maka ditetapkan 12 misi Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam masyarakat.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik.
3. Mewujudkan tata kelola pertanian yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan daerah dan ekspor.
4. Meningkatkan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan daerah, nasional dan internasional.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal.
6. Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat.
7. Mengembangkan destinasi wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara .
8. Pembangunan infrastruktur yang merata untuk melancarkan aktivitas masyarakat.
9. Pembangunan dan peningkatan perdagangan dan perindustrian untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah.
10. Membina generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi sportivitas dan profesionalisme.
11. Membangun desa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Penegakan supremasi hukum dan pertahanan dan keamanan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

- ◆ Misi ke -1: Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam masyarakat.

Tujuan	Sasaran
1. terwujudnya kerukunan umat beragama.	1. Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan agama.

- ◆ Misi Ke-2: meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik.

Tujuan	Sasaran
2. Terwujudnya pelayanan prima yang responsive, profesional, transparan dan akuntabel.	2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan modernisasi birokrasi.

- ◆ Misi Ke-3: Mewujudkan tata kelola pertanian yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan daerah dan ekspor.

Tujuan	Sasaran
3. Meningkatkan potensi dan daya saing daerah bidang pertanian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	4. Meningkatnya nilai tambah produk pertanian.

- ◆ Misi Ke-4: Meningkatkan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan daerah, nasional dan internasional.

Tujuan	Sasaran
4. Menciptakan sumber daya manusia yang berjiwa entrepreneur.	5. Meningkatnya produksi hasil perikanan.

- ◆ Misi Ke-5: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal.

Tujuan	Sasaran
5. Terwujudnya SDM yang unggul, dan berkarakter kearifan lokal	6. Meningkatnya kualitas pendidikan

- ◆ Misi Ke -6: Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat.

Tujuan	Sasaran
6. terwujudnya derajat kesehatan masyarakat	7. meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

- ◆ Misi Ke-7: Mengembangkan destinasi wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara.

Tujuan	Sasaran
7. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap keuangan daerah.	8. Meningkatnya daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara.

- ◆ Misi Ke-8: Pembangunan infrastruktur yang merata untuk melancarkan aktivitas masyarakat.

Tujuan	Sasaran
8. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah yang berkualitas	9. Meningkatnya pemenuhan pembangunan infrastruktur wilayah.

- ◆ Misi Ke-9: Pembangunan dan peningkatan perdagangan dan perindustrian untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah.

Tujuan	Sasaran
9. Meningkatkan kualitas perdagangan dan perindustrian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.	10. Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

- ◆ Misi Ke-10: membina generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi sportivitas dan profesionalisme.

Tujuan	Sasaran
10. Meningkatnya kualitas generasi muda yang berkarakter dan berprestasi	11. Meningkatnya produktivitas generasi muda.

- ◆ Misi Ke-11: membangun desa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan	Sasaran
11. Meningkatkan pembangunan desa di segala sektor	12. Meningkatkan kemandirian desa dalam pembangunan daerah melalui pengembangan kawasan perdesaan.

- ◆ Misi Ke-12: Penegakan supremasi hukum dan pertahanan dan keamanan

Tujuan	Sasaran
12. Meningkatkan kenyamanan dan ketertiban masyarakat	13. Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman.

2.1.3 Strategi Pembangunan

Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan pertimbangan aspek efektifitas dan efisiensi.

Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategis yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksud untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis, ini dijalankan melalui program pembangunan daerah dan program prioritas berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui program prioritas masing-masing urusan.

Berdasarkan pemahaman demikian, strategi pembangunan RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Visi: Mewujudkan Masyarakat Produktif yang berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera			
Misi 1: Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam masyarakat;			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3	4
1.	Terwujudnya kerukunan umat beragama	Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama.	Peningkatan fasilitasi dan pembinaan keagamaan serta sarana dan prasarana ibadah
Misi 2: Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
2.	Terwujudnya pelayanan prima yang reponsive, profesional, transparan dan akuntabel.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Meningkatnya kualitas pelayanan dan modernisasi birokrasi	Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh penerapan TIK.
Misi 3: Mewujudkan tata kelola pertanian yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan daerah dan ekspor.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
3.	Meningkatkan potensi dan daya saing daerah bidang pertanian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya nilai tambah produk pertanian.	Mengoptimalkan produksi dan produktifitas pertanian serta peningkatan upaya pendampingan petani oleh

			penyuluh pertanian
Misi 4: Meningkatkan produktifitas sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan daerah, nasional dan internasional.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
4.	Meningkatkan potensi dan daya saing daerah Bidang Perikanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.	Meningkatnya produksi hasil perikanan.	Mengoptimalkan produksi dan nilai tambah produk perikanan
Misi 5: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
5.	Terwujudnya SDM yang unggul, dan berkarakter kearifan lokal	Meningkatnya kualitas pendidikan.	Peningkatan akses kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, dan peningkatan kulaitas guru.
Misi 6: Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
6.	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.	Peningkatan akses, mutu, dan upaya pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kapasitas tenaga medis dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kesehatan
Misi 7: Mengembangkan destinasi wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
7.	Meningkatkan kontribusi sector pariwisata terhadap keuangan daerah.	Meningkatnya daya tarik destinasi wisata dместik dan mancanegara	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD .
Misi 8: Pembangunan infrastruktur yang merata untuk melancarkan aktivitas masyarakat.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
8.	Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah yang berkualitas	Meningkatnya pemenuhan pembangunan infrastruktur wilayah	Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah.
Misi 9: Pembangunan dan peningkatan perdagangan dan perindustrian untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
9.	Meningkatkan kualitas perdagangan dan perindustrian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.	Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya saing industri khususnya industri pengolahan komoditas unggulan wilayah diiringi dengan penguatan dan peningkatan kinerja UMKM

			serta penguatan distribusi perdagangan.
Misi 10: Membina generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi sportivitas dan profesionalisme.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
10.	Meningkatnya kualitas generasi muda yang berkarakter dan berprestasi	Meningkatnya prooduktivitas generasi muda	Peningkatan kualitas sdm kuantitas sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga disertai optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan dan olahraga.
Misi 11: Membangun desa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
11.	Meningkatkan pembangunan desa di segala sektor	Meningkatnya kemandirian desa dalam pembangunan daerah melalui pengembangan kawasan perdesaan	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa didukung oleh peningkatan peran masyarakat desa dan kerjasama antar kawasan perdesaan.
Misi 12: Penegakan supremasi hukum dan pertahanan dan keamanan.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
12.	Meningkatkan kenyamanan dan ketertiban masyarakat	Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Peningkatan ketaatan hukum dan upaya penegakan hukum.

Strategi ini bertujuan mengembangkan kegiatan pembangunan secara menyeluruh, dengan harapan akan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, membuka kesempatan berusaha, penciptaan lapangan kerja, menjunjung nilai-nilai luhur sejarah budaya daerah, dan menciptakan kehidupan yang lebih demokratis.

2.1.4 Arah Kebijakan Daerah dan Program Pembangunan Daerah

Sebagai ukuran tercapainya pembangunan lima tahun mendatang, maka ditetapkan arah kebijakan umum dalam rangka pencapaian sasaran pokok yang kemudian dijabarkan dalam program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Bulukumba, sebagai berikut:

Pembangunan tahun 2022 merupakan tahun Pertama dari periode RPJMD. Fokus kebijakan pembangunan tahun 2022 diarahkan kepada:

1. Pembinaan Ketertiban dan Pengembangan Demokrasi
 - a. Penegakan hukum dan norma sosial;
 - b. Dukungan penyelenggaraan pemilu;
 - c. Pembinaan partai politik;
 - d. Pemberdayaan perempuan;

- e. Pemeliharaan ketertiban dan keamanan;
- f. Penguatan wawasan dan kesatuan bangsa.
2. Pemantapan kehidupan beragama:
 - a. Pemenuhan sarana/ prasarana ibadah;
 - b. Pemeliharaan kerukunan beragama.
3. Pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, dan kesejahteraan sosial.
4. Peningkatan kapasitas infrastruktur daerah:
 - a. Dukungan pembangunan jalur kereta api (Makassar, Bulukumba-Bone);
 - b. Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan;
 - c. Pengembangan kawasan strategis;
 - d. Peningkatan kapasitas pelabuhan;
 - e. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
 - f. Pengembangan perumahan dan pemukiman;
 - g. Pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi;
 - h. Peningkatan kapasitas penanganan bencana.
5. Reformasi birokrasi dan penguatan good governance:
 - a. Peningkatan kompetensi aparatur;
 - b. Penertiban pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 - c. Peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan:
 1. Penanganan dampak lingkungan;
 2. Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
6. Pembangunan bidang kesehatan;
7. Pembangunan bidang pendidikan;
8. Optimalisasi potensi unggulan daerah;
9. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
10. Pembangunan kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan.

2.1 Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan pernyataan pimpinan tertinggi Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk mewujudkan kinerja pada tahun tertentu (untuk kabupaten) dan merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, dengan adanya perjanjian kinerja ini diharapkan akan terwujud komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan pimpinan perangkat daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

2.1.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja untuk tahun 2022 dibuat di awal tahun anggaran dengan berpedoman pada RPJMD, RKPD tahun 2022, IKU dan APBD tahun 2022. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba telah menetapkan perjanjian kinerja sebagai berikut.

♥ **Sasaran 1:**

Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama.

No.	Indikator Kinerja			Target
1	1	1	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	100%
	2	2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	71%
	3	3	Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah	100%
	4	4	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	5 kali
	5	5	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk	2,76%

♥ **Sasaran 2:**

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Pembangunan

No.	Indikator Kinerja			Target
2	1	6	Indeks Reformasi Birokrasi	60,00
	2	7	Skor LPPD/Kategori	3,53
	3	8	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP
	4	9	Persentase SILPA Terhadap APBD	3,00
	5	10	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	0
	6	11	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	21
	7	12	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	19
	8	13	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)	100
	9	14	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	0,42
	10	15	Persentase PAD terhadap Pendapatan	11
	11	16	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Ada
	12	17	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	Ada
	13	18	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	9
	14	19	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	12
	15	20	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	12
	16	21	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	61
	17	22	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	3
	18	23	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	89
	19	24	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	85
	20	25	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	29
	21	26	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	1703
	22	27	Persentase tindak lanjut temuan	79
	23	28	Persentase pelanggaran Pegawai	0,18

No.	Indikator Kinerja			Target
	24	29	Jumlah temuan BPK	6
	25	30	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	Ada
	26	31	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	Ada
	27	32	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	Ada
	28	33	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	100

♥ **Sasaran 3:**

Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi

No.	Indikator Kinerja			Target
3	1	34	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka 3,26
	2	35	Indeks Gini	0,37
	3	36	Persentase Penduduk miskin	6,41
	4	37	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	12,00
	5	38	Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	100
	6	39	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	99,69
	7	40	Persentase PMKS Yang Tertangani	65,25
	8	41	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	91,82
	9	42	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	81,32
	10	43	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	0
	11	44	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	0,02
	12	45	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	3,92
	13	46	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	2,09
	14	47	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	0,23
	15	48	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	0,05
	16	49	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	0,79
	17	50	Rasio Lulusan S1/S2/S3	762,88
	18	51	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	86,22
	19	52	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	1,05
	20	53	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	0,47
	21	54	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	69,00
	22	55	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	780,755

No.	Indikator Kinerja			Target
	23	56	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	25
	24	57	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	100
	25	58	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada
	26	59	Buku "PDRB"	Ada
	27	60	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk,	1
	28	61	Rasio bayi berakta kelahiran,	0,8
	29	62	Rasio pasangan berakta nikah,	0,5
	30	63	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100
	31	64	Cakupan penerbitan KTP-el	100
	32	65	Cakupan penerbitan akte kelahiran	80
	33	66	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer	91,0
	34	67	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0,8
	35	68	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon	84,6
	36	69	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	57,91
	37	70	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	91,33

♥ Sasaran 4:

Meningkatnya nilai tambah produk pertanian.

No.	Indikator Kinerja			Target
4	1	71	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	22,28
	2	72	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	4,37
	3	73	Pertumbuhan Ekonomi	4,25
	4	74	PDRB ADHK	9065,34
	5	75	PDRB Perkapita ADHB	40,92
	6	76	Ketersediaan Pangan Utama	456,15
	7	77	Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari)	13.353,36
	8	78	Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)	404,03
	9	79	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	83,09
	10	80	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB	25,5616
	11	81	Cakupan bina kelompok tani	76,2
	12	82	Jumlah Populasi Ternak	
			<i>Sapi Potong</i>	78.729
			<i>Ayam Ras Pedaging</i>	2.414.546
		<i>Ayam Ras Petelur</i>	709.631	

♥ **Sasaran5:**

Meningkatnya produksi hasil perikanan.

No.	Indikator Kinerja			Target
5	1	83	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	6,75
	2	84	Kontribusi PDRB sector perikanan	13,21
	3	85	Cakupan Produksi perikanan	130
	4	86	Perikanan tangkap	57120
	5	87	Perikanan Budidaya	5176
	6	88	Cakupan Bina Kelompok Perikanan	72,2

♥ **Sasaran 6:**

Meningkatnya kualitas Pendidikan.

No.	Indikator Kinerja			Target
6	1	89	Indeks Pembangunan Manusia	Angka 70,11
	2	90	Indeks Pendidikan	Angka 65,13
	3	91	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
			SD	114,5
			SMP	97,1
			SMA	89
	4	92	Angka Partisipasi Murni (APM)	
			SD	98,69
			SMP	84,85
			SMA	66,32
	5	93	Angka Parsitipasi Sekolah (APS)	
			7-12 Tahun	98,87
			14-15 Tahun	92,24
			16-18 Tahun	75,85
	6	94	Angka Putus Sekolah	
			SD	0
			SMP	0
			SMA	0,14
	7	95	Angka Kelulusan	
			SD	100
			SMP	100
			SMA	100
	8	96	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv	100

No.	Indikator Kinerja			Target
	9	97	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	1:8
	10	98	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	1:7
	11	99	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas	91,53
	12	100	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	3,15
	13	101	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	58,62
	14	102	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	2
	15	103	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	34,67
	16	104	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	45,158
	17	105	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	1,786
	18	106	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	69.006,98
	19	107	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	12287,80
	20	108	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	63,78
	21	109	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	100,00
	22	110	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	1,39

♥ Sasaran 7:

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan.

No.	Indikator Kinerja			Target
7	1	111	Indeks Kesehatan	74,94
	2	112	Angka Harapan Hidup (AHH)	69,15
	3	113	Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup	5
	4	114	Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup	10
	5	115	Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup	0
	6	116	Angka Kematian Ibu	47
	7	117	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	30
	8	118	Rasio Puskesmas Dan Pustu	0,19
	9	119	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,000
	10	120	Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk	0,04
	11	121	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0,09
	12	122	Rasio Tenaga Medis/Penduduk	0,24
	13	123	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	86
	14	124	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100

No.	Indikator Kinerja			Target
	15	125	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	100
	16	126	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta	41
	17	127	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	94
	18	128	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	3
	19	129	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100
	20	130	Angka Kejadian Malaria	0
	21	131	Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi	0
	22	132	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	10
	23	133	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	73
	24	134	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	50
	25	135	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	89

♥ **Sasaran 8:**

Meningkatnya daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara

No.	Indikator Kinerja			Target
8	1	136	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	2,88
	2	137	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	6,11
	3	138	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	395.675
	4	139	Lama Kunjungan Wisata	3
	5	140	PAD Sektor Pariwisata	6

♥ **Sasaran 9:**

Meningkatnya pemenuhan pembangunan infrastruktur wilayah.

No.	Indikator Kinerja			Target
9	1	141	Indeks Daya saing infrastruktur	90
	2	142	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0,70
	3	143	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	0,0000
	4	144	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	100,00
	5	145	Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	81,70
	6	146	Rasio Jaringan Irigasi	0,19
	7	147	Rasio Rumah Layak Huni	0,25
	8	148	Persentase Pemukiman Yang Tertata	74,46
	9	149	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	12,15
	10	150	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	94,08
	11	151	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	84,74

No.	Indikator Kinerja		Target
12	152	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	84,96
13	153	Persentase Areal Kawasan Kumuh	0,00
14	154	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	20,44
15	155	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	28,06
16	156	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	88,05
17	157	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,45
18	158	Penurunan Emisi GRK	462952,25
19	159	Indeks Kualitas Air	58,95
20	160	Indeks Kualitas Udara	84,84
21	161	Indeks Kualitas Tutup Lahan	31,64
22	162	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100,00
23	163	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	1
24	164	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	1
25	165	Penetapan Hak MHA	1
26	166	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	100
27	167	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	100
28	168	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	1
29	169	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	100
30	170	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,	100
31	171	Timbulan Sampah Yang Ditangani	29,18
32	172	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	100,00
33	173	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	24,30
34	174	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	41,28
35	175	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	1,00
36	176	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	33,85
37	177	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	36,62
38	178	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	0,00
39	179	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3,00
40	180	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	12910,7
41	181	Persentase Layanan Angkutan Darat	1,17
42	182	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	100,00
43	183	Pemasangan Rambu-Rambu	68,66
44	184	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	28134
45	185	Rasio Ijin Trayek	0,01

♥ **Sasaran 10:**

Berkembangnya potensi dan daya tarik wisata.

No.	Indikator Kinerja			Target
10	1	186	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	24
	2	187	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	11
	3	188	Persentase koperasi aktif	75,21
	4	189	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	98,97
	5	190	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	0,72
	6	191	Jumlah Pasar	43
	7	192	Cakupan bina kelompok pengrajin	0,18

♥ **Sasaran 11:**

Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas).

No.	Indikator Kinerja			Target
11	1	193	Indeks Pembangunan Pemuda	56,6
	2	194	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	90,7
	3	195	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	3
	4	196	Persentase wirausaha muda	21,57
	5	197	Cakupan Pembinaan Olahraga	41,03
	6	198	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan	52,30
	7	199	Cakupan pembinaan atlet muda	18,60
	8	200	Jumlah atlet berprestasi	3
	9	201	Jumlah prestasi olahraga	19
	10	202	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	28
	11	203	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	88,05

♥ **Sasaran 12:**

Meningkatnya kemandirian desa dalam pembangunan daerah melalui pengembangan kawasan perdesaan.

No.	Indikator Kinerja			Target
12	1	204	Indeks Desa Membangun	0,74
	2	205	Persentase Desa Mandiri	2,75
	3	206	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	100
	4	207	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Pkk	146
	5	208	Persentase Lsm Aktif	100
	6	209	Persentase Pkk Aktif	100
	7	210	Persentase Posyandu Aktif	100
	8	211	Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100
	9	212	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	93

♥ Sasaran 13:

Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman.

No.	Indikator Kinerja			Target
13	1	213	Indeks Rasa Aman	15
	2	214	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	100
	3	215	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp)	0,53
	4	216	Total Fertility Rate (Tfr)	2,50
	5	217	Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	78,58
	6	218	Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	26,42
	7	219	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk	1,00
	8	220	Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan	6
	9	221	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan,	3
	10	222	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	16,85
	11	223	Ratio Akseptor Kb	18,33
	12	224	Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	74,86
	13	225	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	89,79
	14	226	Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	4,45
	15	227	Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11,84
	16	228	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	39,09
	17	229	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	53,50
	18	230	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	100,00
	19	231	Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb	79,78
	20	232	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- Kb	91,16
	21	233	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Di Setiap Kecamatan	10,00
	22	234	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	1,03
	23	235	Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Derah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di B dang Pengendalian Penduduk	100,00

No.	Indikator Kinerja		Target
24	236	Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri	0,25
25	237	Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (Ppkbd) Setiap Desa/Kelurahan	100,00
26	238	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	100,00
27	239	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	65,05
28	240	Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa	100,00
29	241	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Sesual (Ims)	0,00
30	242	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	100,00
31	243	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	38,87
32	244	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	22,79
33	245	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes	0,01
34	246	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,31
35	247	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100,00
36	248	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	0,003
37	249	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100,00
38	250	Persentase Penegakan Perda	100,00
39	251	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	4,36
40	252	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	26,36
41	253	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	84,52
42	254	Rasio KDRT	0,002
43	255	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	97,00
44	256	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100,00

No.	Indikator Kinerja			Target
45	257	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit		100,00
46	258	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak		100,00
47	259	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten		Ada
48	260	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		Ada
49	261	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada

2.2.2 Rencana Anggaran Tahun 2023

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. **1.646.353.865.572,00**. Tahun 2023 Anggaran belanja ini digunakan untuk membiayai Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak terduga, dan Belanja transfer dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 8.
Rencana Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Belanja Daerah		
		Anggaran Pokok		
		(Rupiah)	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	1.072.850.880.759,00	1.012.987.899.391,86	94,42
2	Belanja Modal	392.686.766.898,00	353.682.271.435,65	90,07
3	Belanja tidak terduga	1.133.752.969,00	66.830.500,00	5,89
4	Belanja transfer	179.682.464.946,00	177.166.836.139,00	98,60
Jumlah		1.646.353.865.572,00	1.543.903.837.466,51	

Sumber: BPKPD Kab. Bulukumba, 2024

Alokasi anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba

Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 9.
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun
Anggaran 2023
Berdasarkan Sasaran Strategis Pembangunan Daerah

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama	1.778.856.020	1.570.137.195	88,27
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Pembangunan	197.966.351.615	191.896.054.901	96,93
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	4.619.975.395	4.534.013.738	98,14
4	Meningkatnya nilai tambah produk pertanian	36.613.367.040	34.000.051.499	92,86
5	Meningkatnya produksi hasil perikanan	32.904.846.417	26.921.262.071	81,82
6	Meningkatnya kualitas Pendidikan	123.338.569.302	122.564.009.957	99,37
7	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	250.337.015.352	215.081.189.275	85,92
8	Meningkatnya daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara	4.868.461.350	4.779.533.692	98,17
9	Meningkatnya pemenuhan pembangunan infrastruktur wilayah	211.031.812.083	182.942.270.304	86,69
10	Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, perindustrian, UMKM dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	43.732.566.300	40.873.955.873	93,46
11	Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas)	10.554.578.500	10.221.542.102	96,84
12	Meningkatnya kemandirian desa dalam pembangunan daerah melalui	2.613.691.596	2.507.549.870	95,94

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
	pengembangan kawasan perdesaan			
13	Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	54.607.412.587	50.297.711.207	92,11
	BELANJA YANG MENDUKUNG SASARAN	974.967.503.557	888.189.281.684	91,10
	BELANJA PENDUKUNG	671.386.362.015	655.714.555.782	97,67
	TOTAL BELANJA	1.646.353.865.572	1.543.903.837.467	93,78

Sumber: BPKPD Kab. Bulukumba, 2024

Pada tabel di atas, pada pos belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja program/kegiatan/sub kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan/sub kegiatan utama sebesar Rp. 974.967.503.557 atau sebesar 59,22 persen dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 671.386.362.015 atau 40,78 persen dari total anggaran belanja.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran pembangunan dengan anggaran paling besar adalah **sasaran Meningkatkan pemenuhan pembangunan infrastruktur wilayah** yaitu sebesar Rp. 211.031.812.083 atau 12,81 persen dari belanja, anggaran terbesar pada sasaran ini dialokasikan pada 22 program utama yaitu: Program Pengelolaan Dan Pengembangansistem Air Limbah dengan anggaran sebesar Rp. 960.565.000 atau 0,058 persen, Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan anggaran sebesar Rp. 28.165.000 atau 0,002 persen, Program Penyelenggaraan Penataan ruang dengan anggaran sebesar Rp. 295.132.000 atau 0,018 persen, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan anggaran sebesar Rp. 1.566.392.000 atau 0,095 persen, Program Penyelenggaraan Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 106.391.190.893 atau 6,462 persen, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) dengan anggaran sebesar Rp. 31.215.273.725 atau 1,90 persen, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan anggaran sebesar Rp. 2.432.204.989 atau 0,15 persen, Program Kawasan Permukiman dengan anggaran sebesar Rp. 4.590.800.800 atau 0,28 persen, Program Peningkatan Prasarana,Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) dengan anggaran sebesar Rp. 76.676.800 atau 0,005 persen, Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah dengan anggaran sebesar Rp. 309.144.850 atau 0,019 persen, Program Pengembangan Perumahan dengan anggaran sebesar Rp. 387.662.350 atau 0,024 persen, Program Penataan Bangunan Gedung dengan anggaran sebesar Rp. 43.652.270.035 atau 2,65 persen, Program Pengelolaan Persampahan dengan anggaran sebesar Rp. 12.435.769.091 atau 0,76 persen, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)dengan anggaran sebesar Rp. 81.986.350 atau 0,005 persen, Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 268.192.000 atau 0,016 persen, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau kerusakan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp.

1.698.286.740 atau 0,103 persen, Program Pengendalian Bahan Berbahaya Danberacun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Danberacun (Limbah B3) dengan anggaran sebesar Rp. 35.034.750 atau 0,002 persen, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihandan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 40.339.850 atau 0,002 persen, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup dengan anggaran sebesar Rp. 15.102.000 atau 0,001 persen, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya dengan anggaran sebesar Rp. 162.755.550 atau 0,010 persen, Program Penyelenggaraan Lalu Lintasdandan Angkutan Jalan (Llaj) dengan anggaran sebesar Rp. 4.388.867.310 atau 0,267 persen.

Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah **sasaran Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat** yaitu sebesar Rp. 250.337.015.352 atau 15.21 persen, dan **sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Pembangunan** yaitu sebesar Rp. 197.966.351.615 atau 12.03 persen. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang terkecil adalah **Meningkatnya kualitas Pendidikan**, dengan anggaran sebesarRp 123.338.569.302 atau 7.49 persen dari total anggaran belanja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Bulukumba melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan maupun kegagalan pada tahun 2023.

Ada beberapa kriteria pengukuran yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mengukur capaian kinerja, yaitu:

Untuk mengukur kinerja tahunan digunakan kriteria sebagai berikut:

- Capaian $>100\%$ dengan notifikasi warna biru yang berarti sangat berhasil **(SB)**.
- Capaian = 100% dengan notifikasi warna hijau yang berarti berhasil **(B)**.
- Capaian $80\% \leq 99,99\%$ dengan notifikasi warna kuning yang berarti cukup berhasil **(CB)**.
- Capaian $50\% \leq 79,99\%$ dengan notifikasi warna orange yang berarti kurang berhasil **(KB)**.
- Capaian $\leq 50\%$ dengan notifikasi warna merah yang berarti tidak berhasil **(TB)**.

Untuk mengukur kinerja jangka menengah dengan membandingkan kinerja tahun terakhir RPJMD dengan realisasi sampai dengan tahun berjalan digunakan kriteria sebagai berikut:

- Capaian $\geq 70\%$ dengan notifikasi **I** yang berarti sudah tercapai/*on track/ontrend*.
- Capaian $40\% \leq 69,99\%$ dengan notifikasi **K** kerja keras untuk dapat mencapainya.
- Capaian $0\% \leq 39,99\%$ dengan notifikasi **L** yang berarti sulit untuk dapat dicapai.

3.1 Capaian Kinerja IKU

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2023 ini akan dijelaskan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bulukumba secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
1	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	B
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	71,00	71,00	100,00	B
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60,00	59,46	99,10	CB
4	Skor LPPD/Kategori	Skor	3,53	3,33	94,44	CB
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,26	3,81	116,87	SB
6	Indeks Gini	%	0,37	0,36	98,10	CB
7	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	22,28	24,33	109,20	SB
8	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	4,37	-1,43	-32,72	TB
9	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	6,75	6,89	102,07	SB
10	Kontribusi PDRB sector perikanan	%	13,21	13,15	99,55	CB
11	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,11	73,64	105,03	SB
12	Indeks Pendidikan	Angka	65,13	65,07	99,91	CB
13	Indeks Kesehatan	Angka	74,94	83,09	110,88	SB

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023				
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif	
14	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,15	74,01	107,03	SB
15	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	2,88	2,50	86,81	CB
16	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	6,11	-22,16	-362,68	TB
17	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	90,00	90,00	100,00	B
18	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	24,47	6,54	26,73	TB
19	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	10,84	5,09	46,96	TB
20	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	58,38	56,88	97,43	CB
21	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	27,00	125,00	462,96	SB
22	Indeks Desa Membangun	Angka	0,76	0,76	100,39	SB
23	Persentase Desa Mandiri	%	2,75	21,01	764,00	SB
24	Indeks Rasa Aman	Angka	15,00	14,00	93,33	CB
25	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	B

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 sebanyak 25 indikator, dan capaian indikator kinerja utama tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Sangat berhasil atau >100% (biru) sebanyak 9 indikator.
- Berhasil atau =100% (hijau) sebanyak 4 indikator.

- Cukup berhasil atau $80\% \leq 99,99\%$ (kuning) sebanyak 8 indikator.
- Kurang berhasil atau $50\% \leq 79,99\%$ (orange) sebanyak 0 indikator.
- Tidak berhasil atau $\leq 50\%$ (merah) sebanyak 4 indikator.

Dari 25 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 36,00 persen dengan notifikasi biru dengan kriteria sangat berhasil (SB), 16,00 persen dengan notifikasi hijau dengan kriteria berhasil (B), 32,00 persen dengan notifikasi kuning dengan kriteria cukup berhasil (CB), 0,00 persen dengan notifikasi orange dengan kriteria kurang berhasil (KB), dan 16,00 persen dengan notifikasi merah dengan kriteria tidak berhasil (TB). Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Kabupaten Bulukumba tahun 2023 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

3.2 Capaian Kinerja IKD

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2022 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Meningkatkan hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama

Analisis pencapaian **Sasaran 1: Meningkatkan hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama	1	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100	100	B
	2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	71			B
	3	Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah	%	100	100	100	B
	4	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	5	5	100	B
	5	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk	Angka	2,8			CB
Rata-rata Capaian						99.57	CB

Dari 5 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, tidak terdapat indikator kinerja sasaran mencapai target 100 persen atau sangat berhasil dan 5 indikator kinerja belum mencapai target namun telah tercapai di atas 98 persen atau cukup berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian

sasaran Meningkatkan hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama, telah berhasil melampaui target yaitu rata-rata 99,57 persen.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100	100
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	72	70	71
3	Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah	%	100	100	100
4	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	5	5,00	5,00
5	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk	Angka	2,91	2,60	100

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 5 indikator yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatkan hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama, 1 indikator yang mengalami peningkatan dari tahun lalu dan tahun sekarang yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

	Indikator Kinerja	Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Capaian (%)	Notif
1	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100,00	100,00	😊
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	72	71,00	98,61	😊
3	Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah	%	100	100,00	100,00	😊
4	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	5	5,00	100,00	😊
5	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk	Angka	2,86	2,74	95,69	😊

Pada Sasaran strategis 1, Meningkatkan hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama, terdapat 5 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, dan semua indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/*on track/on trend*.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatkan hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama melalui indikator

Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani pada tahun 2023 baik atau mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen. Indikator sasaran ini merupakan indikator pencapaian yang membutuhkan waktu jangka panjang untuk dapat menuntaskannya.

Kedua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama melalui indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2023 berhasil dengan capaian target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 71 persen. Keberhasilan pencapaian target indikator tersebut didukung dengan adanya kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan Kerukunan Umat Beragama



Ketiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama melalui indikator Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu sebesar 100 persen.

Keempat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama melalui indikator Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen, artinya realisasi Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat tahun 2023 berhasil dan mencapai target yaitu 5 kali dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu sebesar 5 kali.

Kelima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama melalui indikator Rasio tempat ibadah persatuan penduduk dengan capaian tahun 2023 sebesar 97,83 persen, artinya realisasi Rasio tempat ibadah persatuan penduduk tahun 2023 cukup berhasil dan mencapai target yaitu 2,70 angka dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu sebesar 2,8 angka.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya hubungan masyarakat yang

harmonis berlandaskan nilai agama ini adalah sebesar Rp. 1.778.856.020 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.570.137.195 atau 88.27 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama ini adalah sebanyak 5 program, yaitu:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosila dan Budaya
2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
5. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Analisis pencapaian **Sasaran 2: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Notif
				Tar get	Real isasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60,00	59,46	99,10	CB
	2	Skor LPPD/Kategori	Skor	3,53	3,33	94,44	CB
	3	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	%	100	100,00	100,00	B
	4	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	3,00	2,83	105,67	SB
	5	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	%	0	0	100,00	B
	6	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	21	29,88	140,94	SB
	7	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	19	17,35	90,18	CB
	8	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)	%	100	100,00	100,00	B
	9	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	%	0,42	0,42	100,00	B
	10	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11	12,54	116,00	SB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			
				Tar get	Real isasi	Capaian (%)	Notif
	11	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100	110,84	110,84	SB
	12	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100	100,00	100,00	B
	13	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	9	7,50	87,6	CB
	14	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	%	12	2,70	22,39	TB
	15	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	12	16	134,49	SB
	16	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	61	49,74	81,53	CB
	17	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	bulan	3	3,00	100,00	B
	18	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	89	88,32	98,85	CB
	19	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	85	43,85	51,6	KB
	20	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	29	32,00	110,34	SB
	21	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	1703	544	31,94	TB
	22	Persentase tindak lanjut temuan	%	79	88	111,10	SB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			
				Tar get	Real isasi	Capaian (%)	Notif
	23	Persentase pelanggaran Pegawai	%	0,18		0,00	TB
	24	Jumlah temuan BPK	Temuan	6	13	-16,67	TB
	25	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	%	100	100	100,00	B
	26	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	%	100	100	100,00	B
	27	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	%	100	100	100,00	B
	28	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	%	100	100	100,00	B
Rata-rata Capaian						95,25	CB

Dari 28 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 17 indikator kinerja mencapai target di atas 100 persen atau sangat berhasil, 11 indikator kinerja tidak mencapai target. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah cukup berhasil mencapai target yaitu 95,25 persen.










b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	59,46	59,46	59,46
2	Skor LPPD/Kategori	Skor	0,00	3,33	3,33
3	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00
4	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	6,77	2,83	2,83
5	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	%	0,00	0,00	0
6	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	28,05	29,88	29,88
7	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	18,44	17,35	17,35

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
8	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)	%	100,00	100,00	100,00
9	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	%	0,5400	0,42	0,42
10	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11,95	12,54	12,54
11	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPDP	%	100,00	110,84	110,84
12	Penjabaran Konsistensi Program RKPDP Kedalam APBD	%	100,00	100,00	100,00
13	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	5,12	7,50	7,50
14	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	%	1,61	2,70	2,70
15	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	15	16	16
16	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	60,87	49,74	49,74
17	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	bulan	3,00	3,00	3,00
18	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	66,35	88,32	88,32
19	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	29,40	43,85	43,85
20	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	9,28	32,00	32,00
21	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	538	544	544
22	Persentase tindak lanjut temuan	%	88	88	88
23	Persentase pelanggaran Pegawai	%	0,13	0,05	0,01
24	Jumlah temuan BPK	Temuan	5	13	13
25	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	%	100	100	100
26	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPDP Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	%	100	100	100
27	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	%	100	100	100
28	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	%	100	100	100

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 11 indikator yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengalami peningkatan, dan 12 indikator tidak mengalami peningkatan atau sama dengan tahun lalu, dan 9 indikator mengalami penurunan dari kondisi awal.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

	Indikator Kinerja	Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi s/d Tahun 2023	Capaian (%)	Notif
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60,0	58,56	97,61	
2	Skor LPPD/Kategori	Skor	3,6	2,99	83,77	
3	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	%	100	93,33	93,33	
4	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	2,25	4,61	204,89	
5	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	%	0	0,00	0,00	
6	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	22	30,22	137,35	
7	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	20,04	19,30	90,17	
8	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)	%	100	100,00	514,40	
9	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	%	1,22	0,52	84,41	
10	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11,4	11,89	104,33	
11	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPd	%	100	103,61	103,61	
12	Penjabaran Konsistensi Program RKPd Kedalam APBD	%	100	100,00	100,00	
13	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	14,83	6,40	43,18	
14	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	%	15,05	1,44	9,55	
15	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	15,05	12,76	84,78	
16	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	61,55	43,62	70,87	

	Indikator Kinerja	Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi s/d Tahun 2023	Capaian (%)	Notif
17	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	bulan	3	2,03	67,67	☺
18	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	90,31	76,22	84,40	☺
19	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	100	30,62	30,62	☹
20	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	29	26,67	91,95	☺
21	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	1274,88	375,06	29,42	☹
22	Persentase tindak lanjut temuan	%	100	70,44	70,44	☺
23	Persentase pelanggaran Pegawai	%	0	0,06	624,33	☺
24	Jumlah temuan BPK	Temuan	3	10,67	355	☺
25	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	%	100	100,00	100,00	☺
26	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	%	100	100,00	100,00	☺
27	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	%	100	100,00	100,00	☺
28	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	%	100	100,00	100,00	☺

Pada Sasaran strategis 2, Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat 28 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 22 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/*on track/on trend*, dan 2 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 4 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian tahun 2023 sebesar diangka 99.10 artinya realisasi persentase Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 Cukup berhasil atau tidak mencapai target yaitu 59,46 dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama diangka 60,00.

Kedua, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Skor LPPD/Kategori dengan capaian tahun 2023 sebesar 94.44 persen artinya Skor LPPD/Kategori tahun 2023 cukup berhasil mencapai target atau skor 3.33 dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3.53 persen.

Ketiga, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan tahun 2023 berhasil mencapai target atau 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.



Keempat, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase SILPA Terhadap APBD dengan capaian tahun 2023 sebesar 105.65 persen artinya realisasi persentase SILPA Terhadap APBD tahun 2023 sangat berhasil atau melebihi target yaitu 2.83 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3 persen.

Kelima, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana dengan capaian tahun 2023 sebesar 0 persen artinya realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana sampai dengan tahun 2023 berhasil atau sudah mencapai target yaitu 0 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0 persen

Keenam, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase Belanja Pendidikan (20%) dengan capaian tahun 2023 sebesar 140.94 persen artinya realisasi jumlah Persentase Belanja Pendidikan (20%) tahun 2023 sangat berhasil atau melebihi target yaitu 29.88 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 21 persen.

Ketujuh, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase Belanja Kesehatan (10%) dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi jumlah Persentase Belanja Kesehatan (10%) tahun 2023 berhasil atau mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Kedelapan, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak) dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi jumlah Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak) tahun 2023 berhasil atau mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.



Kesembilan, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi jumlah Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa tahun 2023 berhasil atau mencapai target yaitu 0,42 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,42 persen.

Kesepuluh, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan dengan capaian tahun 2023 sebesar 116,00 persen artinya realisasi jumlah Persentase PAD terhadap Pendapatan tahun 2023 sangat berhasil atau mencapai target yaitu 12.54 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 11 persen.



Kesebelas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD tahun 2023 berhasil atau terlaksana yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keduabelas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD tahun 2023 berhasil

atau terlaksana yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Ketigabelas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase implementasi rencana Kelitbangan dengan capaian tahun 2023 sebesar 87.6 persen artinya realisasi jumlah Persentase implementasi rencana Kelitbangan tahun 2023 cukup berhasil atau mencapai target yaitu 7.50 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 9 persen.

Keempatbelas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan dengan capaian tahun 2023 sebesar 22.39 persen artinya realisasi jumlah Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan tahun 2023 tidak berhasil atau terlaksana yaitu 2.70 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 12 persen.

Kelimabelas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah dengan capaian tahun 2023 sebesar 134,49 persen artinya realisasi jumlah Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah tahun 2023 sangat berhasil atau terlaksana yaitu 16,22 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 12,06 persen.

Keenam belas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dengan capaian tahun 2023 sebesar 81,53 persen artinya realisasi jumlah Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah tahun 2023 cukup berhasil yaitu 60,87 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 61 persen.



Ketujuh belas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi jumlah Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan tahun 2023 berhasil atau terlaksana yaitu 3 bulan dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3 bulan.

Kedelapan belas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal dengan capaian tahun 2023 sebesar 98.85 persen artinya realisasi jumlah Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan

Formal tahun 2022 cukup berhasil yaitu 88,32 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 89,35 persen.

Kesembilanbelas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural dengan capaian tahun 2023 sebesar 51,6 persen artinya realisasi jumlah Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural tahun 2023 kurang berhasil yaitu 43,85 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 89,94 persen.

Keduapuluh, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah dengan capaian tahun 2023 sebesar 110,34 jabatan artinya realisasi Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah tahun 2023 sangat berhasil yaitu 32,00 jabatan dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 29 jabatan.

Keduapuluh satu, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah dengan capaian tahun 2023 sebesar 31,94 jabatan artinya realisasi Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah tahun 2023 tidak berhasil yaitu 544 jabatan dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1703 jabatan.

Keduapuluh dua, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase tindak lanjut temuan dengan capaian tahun 2023 sebesar 111,10 persen artinya realisasi Jumlah Persentase tindak lanjut temuan tahun 2023 sangat berhasil atau terlaksana yaitu 88 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 79 persen.

Keduapuluh tiga, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase pelanggaran Pegawai dengan capaian tahun 2023 sebesar 196,63 persen artinya realisasi Jumlah Persentase pelanggaran Pegawai tahun 2023 tidak berhasil atau terlaksana yaitu 0,01 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,18 persen.

Keduapuluh empat, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Jumlah temuan BPK dengan capaian tahun 2023 sebesar -16,67 persen artinya realisasi Jumlah temuan BPK tahun 2023 kurang berhasil atau terlaksana yaitu 13 temuan dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 6 temuan.



Keduapuluh lima, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada tahun 2023 berhasil atau terlaksana yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.



Keduapuluh enam, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada tahun 2023 berhasil atau terlaksana yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keduapuluh tujuh, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda tahun 2023 berhasil atau terlaksana yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keduapuluh delapan, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW tahun 2023 berhasil atau terlaksana yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ini adalah sebesar Rp. 197.966.351.615 dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. 191.896.054.901 dengan persentase 96,93 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan ini adalah sebanyak 12 program yaitu:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Program Kepegawaian Daerah
7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Program Penyelenggaraan Pengawasan
9. Program Perekonomian Dan Pembangunan
10. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
11. Program Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah
12. Program Penelitian Dan pengembangan Daerah

3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi

Analisis pencapaian **Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022			Notif
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,26	3,81	116,87	SB
	2	Indeks Gini	%	0,37	0,361	98,10	CB
	3	Persentase Penduduk miskin	%	6,41	7,22	87,36	CB
	4	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	unit	12,00	12	100,00	B
	5	Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	%	100	100	100,00	B

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022			Notif
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
	6	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	99,69	100	100,31	SB
	7	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	65,25	57,25	87,74	CB
	8	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	91,82	100	108,91	SB
	9	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	81,32	100	122,97	SB
	10	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	%	0	0	0,00	TB
	11	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0,02	0,001	195,00	SB
	12	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	3,92	3,92	100,00	B
	13	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	%	2,09	2,00	95,89	CB
	14	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	0,23	0,37	160,87	SB
	15	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	%	0,05	0	0,00	TB
	16	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	0,79	0,79	100,00	B

17	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 10,000	762,88	160,00	20,97	TB
18	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		86,22	86,22	100,00	B
19	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan		1,05	0	0,00	TB
20	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat		0,47	0,47	100,00	B
21	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	buah	69,00	60,083	87,08	CB
22	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp (juta)	780.755	68.614	8,79	TB
23	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	25	36,94	147,76	SB
24	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	%	100	100	100,00	B
25	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	%	100	100	100,00	B
26	Buku "PDRB"	%	100	100	100,00	B
27	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk,	%	1	0,99	99,00	CB
28	Rasio bayi berakta kelahiran,	%	0,8	0,54	67,50	KB
29	Rasio pasangan berakta nikah,	%	0,5	1	200,00	SB
30	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100	100	100,00	B
31	Cakupan penerbitan KTP-el	%	100	99,26	99,26	CB
32	Cakupan penerbitan akte kelahiran	%	80	98,48	123,10	SB
33	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer	%	91,0	0	0,00	TB

34	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	0,8	1,155	146,15	SB
35	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon	%	84,6	0	0,00	TB
36	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	%	57,91	0	0,00	TB
37	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	%	91,33	0	0,00	TB
Rata-rata Capaian					85,77	CB

Dari 37 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 10 indikator kinerja mencapai target di atas 100 persen atau sangat berhasil, 7 indikator tercapai di atas 80 persen atau cukup berhasil, 10 indikator tercapai sama dengan 100 persen atau berhasil dan 1 indikator tercapai di atas 50 persen atau kurang berhasil serta 9 indikator yang tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi, kurang berhasil yaitu rata-rata 85,77 persen.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,25	3,25	3,81
2	Indeks Gini	%	0,362	0,361	0,361
3	Persentase Penduduk miskin	%	31,31	31,29	7,22
4	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	unit	1,69	13	12
5	Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	%	100	100	100
6	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	26,16	100	100
7	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	20,49	40,73	57,25
8	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	91,49	91,66	100
9	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	79,24	80,44	100
10	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	%	1,82	23,26	0
11	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0,11	0,15	0,001
12	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	1,82	2,68	3,92
13	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	%	1,75	1,29	2,00
14	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	0,25	0,7	
15	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	%	0,08	0,07	0

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
16	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	0,3763	0,69	0,79
17	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 10,000	717,48	3179	160,00
18	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	%	32,45	33,85	86,22
19	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	0,98	1,01	0
20	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	1	1	0,47
21	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	buah	73,71	23,1	60,083
22	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp (juta)	2.215.177,91	414.973.906	68614
23	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	8,7	8,7	36,94
24	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	%	100	100	100
25	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	%	100	100	100
26	Buku "PDRB"	%	100	100	100
27	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk,	%	0,00999	0,01095	0,99
28	Rasio bayi berakta kelahiran,	%	0,007	0,008	0,54
29	Rasio pasangan berakta nikah,	%	0,005	0,005	1
30	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100	100	100
31	Cakupan penerbitan KTP-el	%	99,9	109,55	99,26
32	Cakupan penerbitan akte kelahiran	%	72,47	88,85	98,48
33	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer	%	0	0	0
34	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	0	0	1,15458
35	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon	%	0	0	0
36	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	%	0	0	0
37	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	%	0	0	0

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 37 indikator yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi mengalami peningkatan, 15 indikator mengalami penurunan dari tahun lalu, dan 13 indikator sama dengan tahun lalu. dan 17 indikator mengalami peningkatan dari kondisi awal.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

	Indikator Kinerja	Sat	Target 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian (%)	Notif
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	4	3,25	81,25	😊
2	Indeks Gini	%	0,33	0,36	110,55	😊
3	Persentase Penduduk miskin	%	5,89	31,30	531,48	😊
4	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	unit	11	7,35	66,77	😐
5	Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	%	100	100,00	100,00	😊
6	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	100	63,08	63,08	😐
7	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	48,6	39,01	80,27	😊
8	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	92,19	95,75	103,86	😊
9	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	77,95	88,24	113,20	😊
10	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	%	0	12,54	0,00	😞
11	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0	0,13	0,00	😞
12	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	8,82	2,25	25,54	😞
13	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	%	2,47	1,52	61,53	😐
14	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	0,21	0,48	226,19	😊
15	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	%	0,03	0,08	250,00	😊
16	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	0,91	0,53	58,35	😐
17	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 10,000	813,13	1948,24	239,60	😊
18	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		100	33,15	33,15	😞

	Indikator Kinerja	Sat	Target 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian (%)	Notif
19	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan		1,17	1,00	85,04	😊
20	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat		0,05	1,00	2000,00	😊
21	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	buah	76	48,41	63,69	😐
22	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp (juta)	831,275	1315,08	158,20	😊
23	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	35	8,70	24,86	😞
24	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	%	100	100,00	100,00	😊
25	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	%	100	100,00	100,00	😊
26	Buku "PDRB"	%	100	100,00	100,00	😊
27	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk,	%	1	0,01	1,05	😞
28	Rasio bayi berakta kelahiran,	%	0,8	0,01	0,93	😞
29	Rasio pasangan berakta menikah,	%	0,5	0,01	1,00	😞
30	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100	100,00	100,00	😊
31	Cakupan penerbitan KTP-el	%	100	104,73	104,73	😊
32	Cakupan penerbitan akte kelahiran	%	80	80,66	100,83	😊
33	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer	%	102	0,00	0,00	😞
34	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	0,85	0,00	0,00	😞
35	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon	%	86,7	0,00	0,00	😞
36	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	%	65,87	0,00	0,00	😞
37	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	%	100	0,00	0,00	😞

Pada Sasaran strategis 3, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi, terdapat 37 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 23 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/*on track/on trend*, 7 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi kuning yang berarti butuh kerja keras untuk

mencapainya dan 10 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian tahun 2023 sebesar 116,87 angka artinya realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 3,81 angka dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3,26 angka.

Kedua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Indeks Gini dengan capaian tahun 2023 sebesar 98,10 persen artinya realisasi Indeks Gini tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 0,36 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,37 persen.

Ketiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Persentase Penduduk miskin dengan capaian tahun 2023 sebesar 87,36 persen artinya realisasi Persentase Penduduk miskin tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 7,22 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 6,41 persen.



Keempat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 unit artinya realisasi Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 12 unit dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 12 unit.

Kelima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.



Keenam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial dengan capaian tahun 2023 sebesar 100,31 persen artinya realisasi Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 99,69 persen.



Ketujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Persentase PMKS Yang Tertangani dengan capaian tahun 2023 sebesar 87,74 persen artinya realisasi Persentase PMKS Yang Tertangani tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 57,25 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 65,25 persen.

Kedelapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat dengan capaian tahun 2023 sebesar 108,91 persen artinya realisasi Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 91,86 persen.



Kesembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial dengan capaian tahun 2023 sebesar 122,97 persen artinya realisasi Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 81,32 persen.

Kesepuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun dengan capaian tahun 2023 sebesar 0 persen artinya realisasi Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 23,26 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0 persen.

Kesebelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) dengan capaian tahun 2023 sebesar 195 persen artinya realisasi Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 0,001 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,02 persen.

Keduabelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 3,95 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3,95 persen.

Ketigabelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 95,89 persen artinya realisasi Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 2,00 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 2,09 persen.



Keempatbelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besaran Pemeriksaan Perusahaan dengan capaian tahun 2023 sebesar

160,87 persen artinya realisasi Besaran Pemeriksaan Perusahaan tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 0,37 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,23 persen.

Kelimabelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan dengan capaian tahun 2023 sebesar 0 persen artinya realisasi Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 0 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,05 persen.

Keenambelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 0,79 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,79 persen.



Ketujuhbelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Rasio Lulusan S1/S2/S3 dengan capaian tahun 2023 sebesar 20,97 per 10.000 artinya realisasi Rasio Lulusan S1/S2/S3 tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 160 per 10.000 dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 762,88 per 10.000.

Kedelapanbelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Rasio Daya Serap Tenaga Kerja dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Rasio Daya Serap Tenaga Kerja tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 86,22 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 86,22 persen.

Kesembilanbelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dengan capaian tahun 2023 sebesar 0 persen artinya realisasi Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan tahun 2023 tidak



berhasil mencapai target yaitu 0 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1,05 persen.

Kedua puluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 0,47 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,47 persen.

Kedua puluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) dengan capaian tahun 2023 sebesar 87,08 buah artinya realisasi Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 60 buah dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 69 buah.

Kedua puluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) dengan capaian tahun 2023 sebesar 8,79 persen artinya realisasi Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 68.614 Rp (Juta) dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 780.755 Rp (Juta).

Kedua puluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN dengan capaian tahun 2023 sebesar 147,76 persen artinya realisasi Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 36,94 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 25 persen.

Kedua puluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah, dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah, tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Kedua puluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Buku "Kabupaten Dalam Angka" dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Buku "Kabupaten Dalam Angka" tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keduapuluh enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Buku "PDRB" dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Buku "PDRB" tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keduapuluh tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk, dengan capaian tahun 2023 sebesar 99,00 persen artinya realisasi Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk, tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 0,99 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1,0 persen.



Keduapuluh delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Rasio bayi berakta kelahiran dengan capaian tahun 2023 sebesar 67,50 persen artinya realisasi Rasio bayi berakta kelahiran tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu 0,54 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,8 persen.

Keduapuluh sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Rasio pasangan berakta nikah dengan capaian tahun 2023 sebesar 200,00 persen artinya realisasi Rasio pasangan berakta nikah tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 1 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,5 persen.

Ketigapuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Penerapan KTP Nasional berbasis NIK dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Penerapan KTP Nasional berbasis NIK tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Ketigapuluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Cakupan penerbitan KTP-el dengan capaian tahun 2023 sebesar 99,26 persen artinya realisasi Cakupan penerbitan KTP-el tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 99,26 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.



Ketigapuluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Cakupan penerbitan akte kelahiran dengan capaian tahun 2023 sebesar 123,10 persen artinya realisasi Cakupan penerbitan akte kelahiran tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 98,48 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 80 persen.



Ketigapuluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer dengan capaian tahun 2023 sebesar 0 persen artinya realisasi Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 0 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 87,0 persen.

Ketigapuluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi dengan capaian tahun 2023 sebesar 146,15 persen artinya realisasi Cakupan Layanan Telekomunikasi tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 1,15 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,8 persen.

Ketigapuluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon dengan capaian tahun 2023 sebesar 0 persen artinya realisasi Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 0 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 84,06 persen.

Ketigapuluh enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet dengan capaian tahun 2023 sebesar 0 persen artinya realisasi Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 0 persen

dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 57,91 persen.

Ketigapuluh tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi dengan capaian tahun 2023 sebesar 0 persen artinya realisasi Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 0 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 91,33 persen.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi ini adalah sebesar Rp. 4.619.975.395 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.534.013.738 atau 98.14 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi ini adalah sebanyak 19 program yaitu:

1. Program Rehabilitasi Sosial
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
6. Program Pendaftaran Penduduk
7. Program Pencatatan Sipil
8. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
9. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
10. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
11. Program Penyelenggaraan Statistik sektoral
12. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi ,
13. Program Pelayanan Penanaman Modal
14. Program Penempatan Tenaga Kerja
15. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
16. Program Promosi Penanaman Modal
17. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
18. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

4

Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian

Analisis pencapaian **Sasaran 4**: Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	1	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	22,28	24,33	109,20	SB
	2	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	4,37	-1,43	-32,72	TB
	3	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,25	4,11	96,71	CB
	4	PDRB ADHK	Rp, Miliar	9065,34	9741,4	107,46	SB
	5	PDRB Perkapita ADHB	Rp, Juta	40,92	41,90	102,39	SB
	6	Ketersediaan Pangan Utama	angka	456,15	456,15	100,00	B
	7	Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari)	angka	13.353,36	8.959,00	67,09	KB
	8	Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)	angka	404,03	239,78	59,35	KB
	9	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	%	83,09	93,33	112,32	SB
	10	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB		25,5616	25,1	98,19	CB
	11	Cakupan bina kelompok tani	%	76,2	63,34	83,12	CB
	12	Jumlah Populasi Ternak		3.202.906	2.853.301	87,42	CB
	Sapi Potong	Ekor	78.729	67.808	86,13	CB	
	Ayam Ras Pedaging	Ekor	2.414.546	2.174.800	90,07	CB	
	Ayam Ras Petelur	Ekor	709.631	610.693	86,06	CB	
Rata-rata Capaian						83,52	CB

Dari 12 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, terdapat 4 indikator kinerja mencapai target di atas 100 persen atau sangat berhasil, 10 indikator tercapai sama dengan 100 persen atau berhasil, 4 indikator tercapai diatas 80 persen persen atau cukup berhasil dan 2 indikator tercapai di atas 50 persen atau kurang berhasil serta 1 indikator yang tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian, cukup berhasil melampaui target yaitu rata-rata 83,52 persen.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	24,32	24,42	24,33
2	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	4,76	3,81	-1,43
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,15	3,81	4,11
4	PDRB ADHK	Rp, Miliar	9013,58	9357,11	9741,4
5	PDRB Perkapita ADHB	Rp, Juta	15,87	38,66	41,90
6	Ketersediaan Pangan Utama	angka	368,95	100	456,15
7	Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari)	angka	2.662,51	17.766,98	8.959,00
8	Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)	angka	69,00	919,76	239,78
9	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	%	60	90	93,33
10	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB		26,31	25,48	25,1
11	Cakupan bina kelompok tani	%	26,75	53,35	63,34
12	Jumlah Populasi Ternak		4948,54	5.295.632	2.853.301
	Sapi Potong	Ekor	77,658	71.801	67.808
	Ayam Ras Pedaging	Ekor	3,694,02	4.384.830	2.174.800
	Ayam Ras Petelur	Ekor	1,176,858	839.001	610.693

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 12 indikator yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian 9 indikator mengalami peningkatan dari tahun lalu dan kondisi awal.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja	Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian (%)	Notif
1 Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	22,24	24,36	109,52	
2 Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	18,43	2,38	12,91	
3 Pertumbuhan Ekonomi	%	6	2,69	44,85	

	Indikator Kinerja	Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian (%)	Notif
4	PDRB ADHK	Rp, Miliar	9353,15	9370,70	100,19	😊
5	PDRB Perkapita ADHB	Rp, Juta	46,75	32,14	59,65	😞
6	Ketersediaan Pangan Utama	angka	528,59	308,37	58,34	😐
7	Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari)	angka	32.489,49	9796,16	30,15	😞
8	Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)	angka	1486,92	409,51	27,54	😞
9	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	%	94,3	81,11	86,01	😐
10	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB		24,18	25,63	106,00	😊
11	Cakupan bina kelompok tani	%	89,08	47,81	53,68	😞
12	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	3.467.740	13.097.469,00	377,69	😊
	Sapi Potong	Ekor	80.762	217.267,00	269,02	😊
	Ayam Ras Pedaging	Ekor	2.522.533	10.253.650,00	406,48	😊
	Ayam Ras Petelur	Ekor	864.442	2.626.552,00	303,84	😊

Pada Sasaran strategis 4, Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian, terdapat 12 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 5 indikator sasaran tersebut tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/*on track/on tren*, 4 indikator dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras dan 3 indikator dengan notifikasi merah yang berarti sulit tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB dengan capaian tahun 2023 sebesar 109,20 persen artinya realisasi Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB pada tahun 2023

sangat berhasil dan mencapai target yaitu 24,33 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 22,28 persen.

Kedua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian dengan capaian tahun 2023 sebesar -32,72 persen artinya realisasi Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian pada tahun 2023 tidak berhasil dan mencapai target yaitu -1,43 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 4,37 persen.



Penyebab terjadinya Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian menurun karena adanya alih fungsi lahan pertanian.

Ketiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian tahun 2023 sebesar 96,71 persen artinya realisasi Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 4,11 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 4,25 persen.

Keempat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator PDRB ADHK dengan capaian tahun 2023 sebesar 107,46 Rp, Miliar artinya realisasi PDRB ADHK pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 9741,4 Rp, Miliar dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 9065,34 Rp, Miliar.



Kelima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator PDRB Perkapita ADHB dengan capaian tahun 2023 sebesar 102,39 persen artinya realisasi PDRB Perkapita ADHB pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 41,90 Rp, Juta dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 40,92 Rp, Juta.

Keenam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Ketersediaan Pangan Utama dengan capaian tahun 2023 sebesar 100,00 angka artinya realisasi Ketersediaan Pangan Utama pada tahun 2023 berhasil mencapai target

yaitu 456,15 angka dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 456,15 angka.

Ketujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari) dengan capaian tahun 2023 sebesar 67,09 persen artinya realisasi Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari) pada tahun 2023 sangat berhasil dan mencapai target yaitu di angka 8.959,00 dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu diangka 13.353,36.

Kedelapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari) dengan capaian tahun 2023 sebesar 59,35 angka artinya realisasi Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari) pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu 239,78 angka dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 404,03 angka.



Kesembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) dengan capaian tahun 2023 sebesar 112,32 persen artinya realisasi Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 93,33 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 83,09 persen.

Kesepuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB dengan capaian tahun 2023 sebesar 98,19 persen artinya realisasi Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 25,1 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 25,56 persen.



Kesebelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Cakupan bina kelompok tani dengan capaian tahun 2023 sebesar 83,12 persen artinya realisasi Cakupan bina kelompok tani pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu 63,34 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 76,2 persen.

Keduabelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Jumlah Populasi Ternak (sapi potong, ayam ras pedaging, ayam ras petelur) dengan capaian tahun 2023 sebesar 87,42 ekor artinya realisasi Jumlah Populasi Ternak (sapi potong, ayam ras pedaging, ayam ras petelur) pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 2.853.301 ekor dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3.202.906 ekor.



e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian ini adalah sebesar Rp. 36.613.367.040 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 34.000.051.499 atau 82.86 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian ini adalah sebanyak 10 program yaitu:

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan ketahanan Pangan Masyarakat
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Pengendalian Dan penanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
7. Program Pengawasan Keamanan Pangan
8. Program Penyuluhan Pertanian
9. Program Perizinan Usaha Pertanian

5 Meningkatkan Produksi hasil Perikanan

Analisis pencapaian **Sasaran 5**: Meningkatkan Produksi hasil Perikanan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Sat	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	1	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	6,75	6,89	102,07	SB
	2	Kontribusi PDRB sector perikanan	%	13,21	13,15	99,55	CB

	3	Cakupan Produksi perikanan	%	130	113,4	87,23	CB
	4	Perikanan tangkap	ton	57120	55612	97,36	CB
	5	Perikanan Budidaya	ton	5176	21479,90	414,99	SB
	6	Cakupan Bina Kelompok Perikanan	%	72,2	83,3	115,37	SB
Rata-rata Capaian						152,76	SB

Dari 6 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 3 indikator kinerja sasaran mencapai target rata-rata di atas 152,76 persen atau sangat berhasil, 3 indikator kinerja belum mencapai target dan pencapaian di atas 80 sampai 99 persen atau cukup berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan, sangat berhasil melampaui target yaitu rata-rata 152,76 persen.


b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	8,78	-0,31	6,89
2	Kontribusi PDRB sector perikanan	%	12,9	12,57	13,15
3	Cakupan Produksi perikanan	%	15,14	119,47	113,4
4	Perikanan tangkap	ton	53830	54911	55612
5	Perikanan Budidaya	ton	228,90	168,04	21479,90
6	Cakupan Bina Kelompok Perikanan	%	44,59	51,74	83,3

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 3 indikator yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan, dan 5 indikator mengalami peningkatan dari tahun lalu.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja		Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Capaian (%)	Notif
1	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	13,52	4,24	37,87	☹️
2	Kontribusi PDRB sector perikanan	%	14,24	12,74	90,40	😊
3	Cakupan Produksi perikanan	%	136	67,30	54,20	😐
4	Perikanan tangkap	ton	60187,3	54370,50	91,02	😊
5	Perikanan Budidaya	ton	5176,00	198,47	140,89	😊

6	Cakupan Bina Kelompok Perikanan	%	75,8	48,16	88,47	
---	---------------------------------	---	------	-------	-------	---

Pada sasaran strategis 5, Meningkatnya Produksi hasil Perikanan, terdapat 6 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 4 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/*on track/on trend*, 1 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi kuning yang berarti butuh kerja keras, dan 1 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi merah yang berarti sulit tercapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan melalui indikator Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan dengan capaian tahun 2023 sebesar 102,07 persen artinya realisasi Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 6,89 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 6,75 persen.



Kedua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan melalui indikator Kontribusi PDRB sektor perikanan dengan capaian tahun 2023 sebesar 99,55 persen artinya realisasi Kontribusi PDRB sektor perikanan pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 13,15 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 13,21 persen.

Ketiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan melalui indikator Cakupan Produksi perikanan dengan capaian tahun 2023 sebesar 87,23 persen artinya realisasi Cakupan Produksi perikanan pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 113,4 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 130 persen.



Keempat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan melalui indikator Perikanan tangkap dengan capaian tahun 2023 sebesar 97,36 ton artinya realisasi Perikanan tangkap pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 55.612 ton dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 57.120 ton.

Kelima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Produksi hasil Perikanan melalui indikator Perikanan Budidaya dengan capaian tahun 2023 sebesar 414,99 persen artinya realisasi Perikanan Budidaya pada tahun 2023 tidak berhasil dan mencapai target yaitu 21479,90 ton dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 5176 ton.



Keenam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Produksi hasil Perikanan melalui indikator Cakupan Bina Kelompok Perikanan dengan capaian tahun 2023 sebesar 115,37 persen artinya realisasi Cakupan Bina Kelompok Perikanan pada tahun 2023 kurang berhasil dan mencapai target yaitu 83,3 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 72,2 persen.



e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Produksi hasil Perikanan ini adalah sebesar Rp. 32.904.846.417 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 26.921.262.071 atau 81.82 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Produksi hasil Perikanan ini adalah sebanyak 3 program yaitu:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

6 Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Analisis pencapaian **Sasaran 6** : Meningkatkan Meningkatkan Kualitas Pendidikan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Notif
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,11	73,64	105,03	SB
	2	Indeks Pendidikan	Angka	65,13	65,07	99,91	CB
	3	Angka Partisipasi Kasar (APK)		100,23	93,89	94,19	CB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Notif
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
	SD		%	114,5	100,4	87,65	CB
	SMP		%	97,1	93,24	95,98	CB
	SMA		%	89	88,04	98,92	CB
4	Angka Partisipasi Murni (APM)			83,29	82,81	99,01	CB
	SD		%	98,69	98,86	100,17	SB
	SMP		%	84,85	87,04	102,58	SB
	SMA		%	66,32	62,53	94,29	CB
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS)			88,99	87,28	98,53	CB
	7-12 Tahun		%	98,87	95,28	96,37	CB
	14-15 Tahun		%	92,24	87,04	94,36	CB
	16-18 Tahun		%	75,85	79,53	104,85	SB
6	Angka Putus Sekolah			0,05	2,66	-5412,7	TB
	SD		%	0	4,5	-449800,0	TB
	SMP		%	0	2,5	-249800,0	TB
	SMA		%	0,14	0,97	692,86	SB
7	Angka Kelulusan			100,00	100,00	-492,9	TB
	SD		%	100	100	100,00	B
	SMP		%	100	100	100,00	B
	SMA		%	100	100	100,00	B
8	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv		%	100	100	100,00	B
9	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar		rasio	1:8	1:12	105,88	SB
10	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah		rasio	1:7	1:14	110,45	SB
11	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas		%	91,53	91,42	99,88	CB
12	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya			3,15	3	95,24	CB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
13	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	buah	58,62	78	133,06	SB
14	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu		2	41	2050,00	SB
15	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		34,67	10,67	30,78	TB
16	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah		45,158	71,94	159,31	SB
17	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk		1,786	1,61	90,15	CB
18	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	69.006,98	2324	3,37	TB
19	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	12287,80	16227	132,06	SB
20	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	%	63,78	55,20	86,55	CB
21	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	100,00	100,00	100,00	B
22	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	1,39	44,44	3197,12	SB
Rata-rata Capaian					76,27	KB

Dari 22 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 11 indikator kinerja mencapai target di atas 100 persen atau sangat berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan, dengan predikat Kurang Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 76,27 persen.







b. perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,62	70,34	73,64
2	Indeks Pendidikan	Angka	63,32	63,98	65,07
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)		91,49	94,47	93,89
	SD	%	106,38	100,9	100,4
	SMP	%	81,88	92,03	93,24
	SMA	%	86,20	90,48	88,04
4	Angka Partisipasi Murni (APM)		77,25	88,53	82,81
	SD	%	98,06	98,5	98,86
	SMP	%	74,01	88,09	87,04
	SMA	%	59,69	79	62,53
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS)		87,76	85,47	87,28
	7-12 Tahun	%	106,38	94,45	95,28
	14-15 Tahun	%	81,88	82,42	87,04
	16-18 Tahun	%	75,03	79,53	79,53
6	Angka Putus Sekolah		0,65	0,11	2,66
	SD	%	0,78	0,057	4,5
	SMP	%	1,17	0,15	2,5
	SMA	%	0	0,13	0,97
7	Angka Kelulusan		100,00	97,95	100,00
	SD	%	100	95,76	100
	SMP	%	100	98,68	100
	SMA	%	100	99,42	100
8	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv	%	90,68	85,15	100
9	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	rasio	01:13	01:13	1:12
10	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	rasio	01:11	01:09	1:14
11	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas	%	89,9	92,26	91,42
12	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya		1	2	3

13	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	buah	58	78	78
14	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu		2	2	41
15	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		7,89	6,34	10,67
16	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah		18,52	31,40	71,94
17	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk		0,01	1,61	1,61
18	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	3107,00	27884	2324
19	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	10727,00	15933	16227
20	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	%	25,01	30,47	55,20
21	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	100,00	100,00	100,00
22	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	0,09	0,07	44,44

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 3 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya Kualitas Pendidikan dalam mendorong kualitas Pendidikan mengalami penurunan, 14 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya Kualitas Pendidikan dalam mendorong kualitas Pendidikan mengalami peningkatan, 14 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya Kualitas Pendidikan dalam mendorong kualitas Pendidikan mengalami peningkatan dari tahun lalu dan kondisi awal (2021).

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja		Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Capaian (%)	Notifikasi
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,17	71,20	98,66	
2	Indeks Pendidikan	Angka	68,42	64,12	93,72	
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	104,09	93,28	89,62	
	SD	%	115,47	102,56	88,82	
	SMP	%	104,00	89,05	85,62	
	SMA	%	92,79	88,24	95,10	

	Indikator Kinerja	Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Capaian (%)	Notifikasi
4	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	83,67	82,86	99,03	😊
	SD	%	98,73	98,47	99,74	😊
	SMP	%	85,77	83,05	96,82	😊
	SMA	%	66,51	67,07	100,84	😊
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	89,18	86,84	97,37	😊
	7-12 Tahun	%	98,86	98,70	99,84	😊
	14-15 Tahun	%	92,19	83,78	90,88	😊
	16-18 Tahun	%	76,50	78,03	102,00	😊
6	Angka Putus Sekolah	%	0,04	0,97	2228,72	😊
	SD	%	0	1,55	0,00	😞
	SMP	%	0	0,94	0,00	😞
	SMA	%	0,13013738	0,41	318,59	😊
7	Angka Kelulusan	%	100,00	99,32	99,32	😊
	SD	%	100	98,59	98,59	😊
	SMP	%	100	99,56	99,56	😊
	SMA	%	100	99,81	99,81	😊
8	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv	%	100	91,94	91,94	😊

	Indikator Kinerja	Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Capaian (%)	Notifikasi
9	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	rasio	1:5	0,05	111,79	
10	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	rasio	1:6	0,05	108,08	
11	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas	%	91,4438102	91,19	99,73	
12	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	seni	3	2,00	66,67	
13	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	buah	61	71,33	116,94	
14	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	buah	2	15,00	750,00	
15	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	25,48	8,30	32,58	
16	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	Buku	51,82	54,00	104,21	
17	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	%	3,28	1,08	32,85	
18	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	96069,05	11105,00	11,56	
19	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	14039,80	14295,67	101,82	
20	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	%	92,25	44,49	48,23	
21	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	100,00	100,00	100,00	
22	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	2,18	16,70	764,88	

Pada Sasaran strategis 6, Meningkatnya Kualitas Pendidikan, terdapat 22 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 17 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/on track/on trend, dan 2 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 3 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2023 sebesar 105,03 persen atau realisasi Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 73,07 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 70,11 persen.

Kedua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Indeks pendidikan pada tahun 2023 sebesar 94,19 persen atau realisasi Indeks pendidikan pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 93,89 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,23 persen.

Ketiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2023 sebesar 99,01 persen atau realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 82,81 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 83,29 persen

Keempat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2023 sebesar 99,07 persen atau realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 88,53 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 83,12 persen

Kelima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2023 sebesar 98,53 persen atau realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 87,28 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 88,99 persen.

Keenam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Angka Putus Sekolah pada tahun 2023 sebesar -5412,7 persen atau realisasi Angka Putus Sekolah pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 2,66 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,05 persen.

Ketujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Angka Kelulusan pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Angka Kelulusan pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100,00persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen.

Kedelapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100,00

persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen.

Kesembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar pada tahun 2023 sebesar 105,88 persen atau realisasi Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 1:12 rasio dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1:8 rasio.

Kesepuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah pada tahun 2023 sebesar 110,45 persen atau realisasi Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 1:14 rasio dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1:7 rasio.

Kesebelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas pada tahun 2023 sebesar 99,88 persen atau realisasi Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 91,42 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 91,53 persen.

Kedua Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya pada tahun 2023 sebesar 95,24 persen atau realisasi Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 3 festival dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3,15 festival.



Ketiga Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan pada tahun 2023 sebesar 133,06 persen atau realisasi Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 78 buah dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 58,62 buah.

Keempat Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu pada tahun 2023 sebesar 2050,00persen atau realisasi Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 41 buah dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 2 buah

Kelima Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun pada tahun 2023 sebesar 30,78 persen atau realisasi Jumlah pengunjung

perpustakaan per tahun pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 10,67 buah dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 34,67 buah

Keenam Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah pada tahun 2023 sebesar 159,31 persen atau realisasi Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 71,94 buku dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 45,16 buku

Ketujuh Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk pada tahun 2023 sebesar 90,15 persen atau realisasi Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 1,61 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1,79 persen

Kedelapan Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan per Tahun pada tahun 2023 sebesar 3,37 persen atau realisasi Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 2324 orang dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 69.006,98 orang

Kesembilan Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan pada tahun 2023 sebesar 132,06 persen atau realisasi Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 16.227 judul dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 12287,80 judul.

Kedua Puluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat pada tahun 2023 sebesar 86,55 persen atau realisasi Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 55,20 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 63,78 persen

Kedua Puluh Satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen

Kedua Puluh Dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku pada tahun 2023 sebesar 3197,12persen atau realisasi Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku pada tahun

2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 44,44 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1,39 persen

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan ini adalah sebesar Rp. 123.338.569.302 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 122.564.009.957 atau 99,37 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan ini adalah sebanyak 7 program yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pengembangan Kebudayaan
4. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
6. Program Pengelolaan Arsip

7 Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Analisis pencapaian **Sasaran 7**: Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat , dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Notif
Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1	Indeks Kesehatan	Angka	74,94	74,94	110,88	SB
	2	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,15	74,01	107,03	SB
	3	Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup	Angka	4,57	5,00	90,59	CB
	4	Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup	Angka	9,94	3,00	169,82	SB
	5	Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup	Angka	0,01	0,06	-430,00	TB
	6	Angka Kematian Ibu	Angka	46,71	9,00	180,73	SB
	7	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	%	29,92	2,40	8,02	TB
	8	Rasio Puskesmas Dan Pustu	%	0,19	0,35	184,21	SB
	9	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	%	0,00	0,00	100,00	B

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Notif
	10	Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk	%	0,04	0,01	25,00	TB
	11	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	%	0,09	0,01	14,44	TB
	12	Rasio Tenaga Medis/Penduduk	%	0,24	0,29	120,83	SB
	13	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	86,30	78,80	91,31	CB
	14	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100,00	100,00	100,00	B
	15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100,00	100,00	100,00	B
	16	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta	%	41,34	53,51	129,44	SB
	17	Tingkat Prevalensi Tuberkolosis	Per 1000 Penduduk	93,82	178,00	10,27	TB
	18	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	2,56	5,00	4,69	TB
	19	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100,00	100,00	100,00	B
	20	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 Penduduk	0,24	0,07	170,83	SB
	21	Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi	%	0,01	0,06	-430,00	TB
	22	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	10,40	36,44	350,38	SB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Notif
	23	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	73,17	68,60	93,75	CB
	24	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	50,43	100,00	198,29	SB
	25	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	%	89,19	36,44	40,86	TB
Rata-rata Capaian						65,66	SB

Dari 25 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 7 indikator kinerja mencapai target di atas 100 persen atau Sangat berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan predikat sangat Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 65,22 persen.

b. perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Indeks Kesehatan	Angka	74	74,63	83,09
2	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,1	68,51	74,01
3	Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup	Angka	0	0,009	5,00
4	Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup	Angka	8	2	3,00
5	Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup	Angka	7	0	0,06
6	Angka Kematian Ibu	Angka	146	264	9,00
7	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	%	23	85	2,40
8	Rasio Puskesmas Dan Pustu	%	0,19	2	0,35
9	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	%	0,01	0,002	0,00
10	Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk	%	0,04	0,03	0,01
11	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	%	0,14	0,17	0,01
12	Rasio Tenaga Medis/Penduduk	%	0,26	0,33	0,29
13	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	74	84	78,80
14	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	64	90	100,00

15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	100,00
16	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta	%	34	50	53,51
17	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	121	2	178,00
18	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	6	0	5,00
19	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100,00
20	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 Penduduk	0	0	0,07
21	Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi	%	0	0	0,06
22	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	2	0	36,44
23	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	40	83	68,60
24	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	39	72	100,00
25	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	%	49	0	36,44

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 9 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat mengalami penurunan dari tahun lalu dan 11 kondisi awal (2021).

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2023	Capaian	Notif
1	Indeks Kesehatan	Angka	77,99	74,52	95,55	
2	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,69	70,21	99,32	
3	Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup	Angka	3	1,77	55,20	
4	Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup	Angka	10	4,17	42,60	
5	Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup	Angka	0	2,45	-2254,00	
6	Angka Kematian Ibu	Angka	30	97,29	325,96	

	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2023	Capaian	Notif
7	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	%	38	37,09	96,91	
8	Rasio Puskesmas Dan Pustu	%	0,19	0,76	400,00	
9	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	%	0,00	0,00	118,33	
10	Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk	%	0,04	0,03	69,08	
11	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	%	0,10	0,11	111,78	
12	Rasio Tenaga Medis/Penduduk	%	0,27	0,29	109,48	
13	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	90	78,89	87,62	
14	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	84,80	84,80	
15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100,00	100,00	
16	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta	%	33	45,70	139,75	
17	Tingkat Prevalensi Tuberkolosis	Per 1000 Penduduk	71	100,27	140,62	
18	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	1	3,83	695,94	
19	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100,00	100,00	
20	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 Penduduk	0	0,04	0,00	
21	Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi	%	0	0,03	0,00	
22	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	19	12,92	66,56	
23	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	72	63,86	88,37	

Indikator Kinerja		Satuan	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2023	Capaian	Notif
24	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	45	70,62	156,51	😊
25	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	%	98	28,62	29,16	😞

Pada Sasaran strategis 7, Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat, terdapat 25 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 17 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/on track/on trend, dan 4 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 4 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kesatu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Indeks Kesehatan pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Indeks Kesehatan pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 74,94 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 74,94 persen.



Kedua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Usia Harapan Hidup pada tahun 2023 sebesar 107,03 persen atau realisasi Usia Harapan Hidup pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 74,01 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 69,15 persen.

Ketiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup pada tahun 2023 sebesar 90,59 persen atau realisasi Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 5,00 angka dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 4,57 angka.

Keempat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup pada tahun 2023 sebesar 169,82 persen atau realisasi Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 3 angka dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 9,94 angka.

Kelima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup pada tahun 2023 sebesar -430,00 persen atau realisasi Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,06 angka dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,01 angka.

Keenam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Angka Kematian Ibu pada tahun 2023 sebesar 180,73 persen atau realisasi Angka Kematian Ibu pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 9 jiwa dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 46,71 jiwa.

Ketujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Rasio Posyandu Per Satuan Balita pada tahun 2023 sebesar 8,02 persen atau realisasi Rasio Posyandu Per Satuan Balita pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 2,40 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 29,92 persen.

Kedelapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Rasio Puskesmas Dan Pustu pada tahun 2023 sebesar 184,21 persen atau realisasi Rasio Puskesmas Dan Pustu pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,35 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,19 persen



Kesembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,001 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,001 persen

Kesepuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk pada tahun 2023 sebesar 25 persen atau realisasi Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,01 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,04 persen.

Kesebelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Rasio Dokter Per Satuan Penduduk pada tahun 2023 sebesar 14,44 persen atau realisasi Rasio Dokter Per Satuan Penduduk pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,01 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,09 persen.



Kedua Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Rasio Tenaga Medis/Penduduk pada tahun 2023 sebesar 120,83 persen atau realisasi Rasio Tenaga Medis/Penduduk pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,29 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,24 persen.

Ketiga Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator "Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan pada tahun 2023 sebesar 91.31 persen atau realisasi "Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 78.80 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 86.30 persen.

Keempat Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Kelima belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keenam belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta dengan capaian tahun 2023 sebesar 129.44 persen artinya realisasi Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta pada tahun 2023 sangat berhasil dan mencapai target yaitu 53.51 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 41.34 persen.

Ketujuh belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Tingkat Prevalensi Tuberkulosis dengan capaian tahun 2023 sebesar 10.27 per 1000 penduduk/jiwa artinya realisasi Tingkat Prevalensi Tuberkulosis pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 178.00 per 1000 penduduk/jiwa dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 93.82 per 1000 penduduk/jiwa.

Kedelapan belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis dengan capaian tahun 2023 sebesar 4.69 per 1000 penduduk/jiwa artinya realisasi Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis pada tahun 2023 tidak berhasil dan mencapai target yaitu 5.00 per 1000

penduduk/jiwa dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 2.56 per 1000 penduduk/jiwa.

Kesembilan belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD pada tahun 2023 berhasil dan mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keduapuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Angka Kejadian Malaria dengan capaian tahun 2023 sebesar 170.83 per 1000 penduduk/jiwa artinya realisasi Angka Kejadian Malaria pada tahun 2023 sangat berhasil dan mencapai target yaitu 0.07 per 1000 penduduk/jiwa dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0.24 per 1000 penduduk/jiwa.

Keduapuluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi dengan capaian tahun 2023 sebesar -430.00 persen artinya realisasi Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi pada tahun 2023 tidak berhasil dan mencapai target yaitu 0.06 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0.01persen.

Keduapuluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin dengan capaian tahun 2023 sebesar 350.38 persen artinya realisasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin pada tahun 2023 sangat berhasil dan mencapai target yaitu 36.44 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 10.40 persen.

Keduapuluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 dengan capaian tahun 2023 sebesar 93.75 persen artinya realisasi Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 pada tahun 2023 cukup berhasil dan mencapai target yaitu 68.60 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 73.17 persen.



Keduapuluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin dengan capaian tahun 2023 sebesar 198.29 persen artinya realisasi Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan

Keluarga Miskin pada tahun 2023 sangat berhasil dan mencapai target yaitu 100.00 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 50.43 persen.

Kedua puluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin dengan capaian tahun 2023 sebesar 40.86 persen artinya realisasi Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin pada tahun 2023 tidak berhasil dan mencapai target yaitu 36.44 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 36.44 persen.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah sebesar Rp. 250.337.015.352 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 215.081.189.275 atau 85.92 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat ini adalah sebanyak 5 program yaitu:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Makanan Minuman
4. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

8 Meningkatkan daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara

Analisis pencapaian Sasaran 8: Meningkatnya daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat Uan	Tahun 2023			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NOT
8 Meningkatkan daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara	1 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	2.88	2,5	86,81	CB
	2 Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	6.11	-22,16	-362,68	TB
	3 Jumlah Kunjungan	Orang	395,675	544.139	137,52	SB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat Uan	Tahun 2023			
			TARGET	REAL ISASI	CAP AIAN	NOT
	Wisatawan Mancanegara					
	4 Lama Kunjungan Wisata	Hari	3	2	66,67	KB
	5 PAD Sektor Pariwisata	%	6.11	4,9	80,20	CB
RATA RATA CAPAIAN					1,70	TB

Dari 5 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 1 indikator kinerja mencapai target di bawah 50 persen atau tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah, dengan predikat Cukup Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 1,70 persen.

b. perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 7 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun lalu dan kondisi awal (2023).

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
		2021	2022	2023
1 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	3,41	4,47	2.5
2 Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	5,88	22,48	-22.16
3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	423.605	682.777	544,139
4 Lama Kunjungan Wisata	Hari	4	4	2
5 PAD Sektor Pariwisata	%	4	4	4.9

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja	Satuan	Target (Kondisi Akhir Rpjmd)	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2023	Capaian	Not
1 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	3,79	3.46	91.29	😊
2 Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	7,86	2.07	26.29	😞
3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	488.084	550173.67	113	😊
4 Lama Kunjungan Wisata	Hari	4	3.33	83.33	😊

Indikator Kinerja	Satuan	Target (Kondisi Akhir Rpjmd)	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2023	Capaian	Not
5 PAD Sektor Pariwisata	%	8	4.42	56.26	☹️

Pada Sasaran strategis 8, Meningkatnya daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara , terdapat 5 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 3 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/on track/on trend, dan 1 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 1 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Indeks Daya saing infrastruktur pada tahun 2023 sebesar 86.81 persen atau Indeks Daya saing infrastruktur pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 2.5 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 2,88 persen.



Dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata pada tahun 2023 sebesar angka -362.68 atau realisasi Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar angka -22.16 dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu angka 6.11.



Penyebab terjadinya penurunan capaian indikator dinas pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten bulukumba karna kondisi kunjungan dibulan januari sampai maret mengalami penurunan disebabkan karena kondisi cuaca pada saat itu sangat ekstrim sehingga volume sampa di pantai setiap harinya terdapat sampah kiriman dan berita tersebut tersebar di media sosial

Adanya kegiatan nasional 10 juta bendera dalam Kawasan wisata bira dan pada saat itu wisatawan di gratiskan masuk kekawasan wisata bira beberapa hari selama kegiatan tersebut berlangsung.

Tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara pada tahun 2023 sebesar 137.52 persen atau realisasi Indeks Daya saing infrastruktur pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 544,139 orang dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 395,675 orang.



Empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Lama Kunjungan Wisata pada tahun 2023 sebesar 66.67 persen atau realisasi Indeks Daya saing infrastruktur pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 2 hari dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3 hari .



Lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator PAD Sektor Pariwisata pada tahun 2023 sebesar 80.20 persen atau Indeks Daya saing infrastruktur pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 4.9 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 6.11 persen.

Adanya wisata lain yang tidak memungut retribusi seperti pantai panrang luhu dan marrumasa sehingga wisatawan lebih memilih ketempat tersebut.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, perindustrian, UMKM dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sebesar Rp 4.868.461.350 terealisasi sebesar Rp 4.779.533.692 atau 98,17 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) ini adalah sebanyak 3 program yaitu:

1. Program Peningkatan daya tarik destinasi Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata

3. Program Penembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif

9 Meningkatkan pemenuhan pembangunan infrastruktur wilayah

Analisis pencapaian Sasaran 9: Meningkatkan pemenuhan pembangunan infrastruktur wilayah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023				
			Target	Realisasi	Capaian	Notif	
9 Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	1	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	90	90	100	B
	2	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	0,70	0,43	61,71	KB
	3	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	%	0,001	0,003	259,00	SB
	4	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	%	100,00	98,98	98,98	CB
	5	Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	81,70	80,92	99,05	CB
	6	Rasio Jaringan Irigasi	%	0,19	10,72	5642,11	SB
	7	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,25	0,23	91,52	CB
	8	Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	74,46	4,13	5,55	TB
	9	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	12,15	12,16	100,08	SB
	10	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	94,08	60,72	64,54	KB
	11	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	84,74	88,34	104,25	SB
	12	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	84,96	85,75	100,93	SB
	13	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,00	0,00	100,00	B
	14	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	%	20,44	0,42	2,05	TB
	15	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	28,06	26,18	93,30	CB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023				
			Target	Realisasi	Capaian	Notif	
	16	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	88,05	88,05	100,00	B
	17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63,45	63,74	100,46	SB
	18	Penurunan Emisi GRK	Gg CO2-Eq	462952,25	462952,90	100,00	SB
	19	Indeks Kualitas Air	Poin	58,95	63,74	108,13	SB
	20	Indeks Kualitas Udara	Poin	84,84	93,82	110,58	SB
	21	Indeks Kualitas Tutup Lahan	Poin	31,64	28,89	91,31	CB
	22	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	%	100,00	100,00	100,00	B
	23	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	%	1	1	100,00	B
	24	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	Kelompok	1	1	100,00	B
	25	Penetapan Hak MHA	Kelompok	1	1	100,00	B
	26	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	Kelompok	100	100	100,00	B
	27	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	Kelompok	100	100	100,00	B
	28	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	Kelompok	1	1	100,00	B
	29	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Kelompok	100	100	100,00	B
	30	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin	sekolah	100	100	100,00	B

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Notif
	Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,					
	31 Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	29,18	63,14	216,39	SB
	32 Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	100,00	94,79	94,79	CB
	33 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	%	24,30	75,00	308,64	SB
	34 Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	Ton/Kg	41,28	35,00	84,79	CB
	35 Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	1,00	1	100,00	B
	36 Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	33,85	29	85,35	CB
	37 Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	Dok	36,62	36,62	100,00	B
	38 Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	1	0,00	0,00	0,00	TB
	39 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3,00	3	100,00	B
	40 Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Unit	12910,7	69248,0	536,4	SB
	41 Persentase Layanan Angkutan Darat	%	1,17	22,63	1934,19	SB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023				
			Target	Realisasi	Capaian	Notif	
	42	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	%	100,00	94,72	95	CB
	43	Pemasangan Rambu-Rambu	%	68,66	0	0	TB
	44	Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	Orang/Barang	28134	207744	738	SB
	45	Rasio Ijin Trayek	%	0,01	0,0830	830,00	SB
Rata Rata Capaian						303,49	CB

Dari 44 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 4 indikator kinerja mencapai target di bawah 50 persen atau tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah, dengan predikat Cukup Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 303,49 persen.

b. perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 6 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun lalu dan kondisi awal (2021).

















Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	87	89	90
2	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	0,46	1	0,43
3	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	%	0,003	0,003	0,003
4	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	%	0,00	98,97	98,98
5	Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	82,91	81,16	80,92
6	Rasio Jaringan Irigasi	%	0,93	0,49	10,72
7	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,24	0,44	0,23
8	Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	65,44	58,83	4,13
9	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	11,56	9,41	12,16
10	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	92,42	92,54	60,72
11	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	76,35	64,60	88,34
12	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	84,26	85,48	85,75
13	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	11,08	12,02	0,00
14	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	%	6,02	0,42	0,42
15	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	25,74	25,74	26,18
16	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	75,00	20,00	88,05
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63,22	60,31	63,74

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
18	Penurunan Emisi GRK	Gg CO2-Eq	4638 80,00	46295 2,25	46295 2,90
19	Indeks Kualitas Air	Poin	61,00	55,00	63,74
20	Indeks Kualitas Udara	Poin	84,64	92,13	93,82
21	Indeks Kualitas Tutup Lahan	Poin	23,56	28,89	28,89
22	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	%	95,93	100,00	100,00
23	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	%	1	1	1
24	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	klp	1	1	1
25	Penetapan Hak MHA	klp	1	1	1
26	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	klp	100	100	100
27	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	klp	100	100	100
28	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	klp	1	1	1
29	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	klp	2	100	100
30	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,	sekolah	100	100	100
31	Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	24,95	26,03	63,14
32	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	86,63	73,13	94,79
33	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	%	26,24	74,00	75,00
34	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	Ton/Kg	35,00	35,00	35,00
35	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	1	1	1
36	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	30	30	29
37	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	Dok	32,36	32,36	36,62
38	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	1	0,00	0,00	0,00
39	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3	3	3
40	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Unit	1750 0,0	9125,0	69248, 0
41	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	0,35	1,15	22,63
42	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	%	0	98,67	94,72
43	Pemasangan Rambu-Rambu	%	0	0	0

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
44	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	Orang/Barang	12000	39949	20774
45	Rasio Ijin Trayek	%	0,0001	0,0005	0,0830

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Kondisi Akhir Rpjmd)	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2023	Capaian	Not
1	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	95	88,67	93,33	
2	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	1	0,59	59,50	
3	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	%	0	0,00	103,41	
4	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	%	100	65,98	65,98	
5	Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	84,43	81,66	96,72	
6	Rasio Jaringan Irigasi	%	0,19	4,05	2129,82	
7	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,25	0,30	120,11	
8	Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	83	42,80	51,48	
9	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	13	11,04	82,15	
10	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	95	81,89	86,34	
11	Persentase Rumah Tinggal Bersantasi	%	88	76,43	86,78	
12	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	85	85,16	100,06	
13	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0	7,70	0,00	
14	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	%	87	2,29	2,64	
15	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	32,9232	25,89	78,63	
16	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100,00	61,02	61,02	
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,08	62,42	95,93	
18	Penurunan Emisi GRK	Gg CO2 -Eq	459.259,72	463261,72	100,87	

	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Kondisi Akhir Rpjmd)	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2023	Capaian	Not
19	Indeks Kualitas Air	Poin	59,25	59,91	101,12	
20	Indeks Kualitas Udara	Poin	85,14	90,20	105,94	
21	Indeks Kualitas Tutup Lahan	Poin	37,97	27,11	0,00	
22	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	%	100	98,64	98,64	
23	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	%	1	1,00	100,00	
24	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	Kelompok	1	1,00	100,00	
25	Penetapan Hak MHA	Kelompok	1	1,00	100,00	
26	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	Kelompok	100	100,00	100,00	
27	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	Kelompok	100	100,00	100,00	
28	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	Kelompok	1	1,00	100,00	
29	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Kelompok	100	67,33	67,33	
30	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,	sekolah	100	100,00	100,00	
31	Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	33,87	38,04	112,32	
32	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	100,00	84,85	84,85	
33	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	%	22,16	58,41	263,55	
34	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai	Ton/Kg	48,23	35,00	72,58	

	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Kondisi Akhir Rpjmd)	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2023	Capaian	Not
	Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)					
35	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	2	1,00	50,00	
36	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	38	29,54	77,17	
37	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	Dok	41,34	33,78	0,00	
38	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	1	0,00	0,00	0,00	
39	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3	3,00	100,00	
40	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Unit	10075,1	31957,67	317,19	
41	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	1,03	8,05	780,44	
42	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	%	100	64,46	64,46	
43	Pemasangan Rambu-Rambu	%	76,08	0,00	0,00	
44	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	Orang/Barang	30437	86564,42	284,41	
45	Rasio Ijin Trayek	%	0,02	0,03	170,02	

Pada Sasaran strategis 9, Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah , terdapat 44 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 32 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/on track/on trend, dan 7 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 5 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Indeks Daya saing infrastruktur pada tahun 2023 sebesar angka 100 atau Indeks Daya saing infrastruktur pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar angka 90 dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu angka 90.

Dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik pada tahun 2023 sebesar 62,71 persen atau realisasi Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,43 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,70 persen.



Tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk pada tahun 2023 sebesar 259 persen atau realisasi Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,003 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,001 persen.

Empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) pada tahun 2023 sebesar 98,98 persen atau realisasi Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 98,98 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.



Lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2023 sebesar 99,05 persen atau realisasi Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 80,92 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 81,70 persen.

Enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Rasio Jaringan Irigasi pada tahun 2023 sebesar 5642,11 persen atau realisasi Rasio Jaringan Irigasi pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 10,72 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,19 persen.



Tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2023 sebesar 91,52 persen atau realisasi Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,23

persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,25 persen.

Delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Pemukiman Yang Tertata pada tahun 2023 sebesar 5,55 persen atau realisasi Persentase Pemukiman Yang Tertata pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 4,13 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 74,46 persen.

Sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun 2023 sebesar 100,08 persen atau realisasi Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 12,16 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 12,15 persen.

Sepuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkaupada tahun 2023 sebesar 64,54 persen atau realisasi Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 60,72 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 94,08 persen.

Sebelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi tahun 2023 sebesar 104,25 persen atau realisasi Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 88,34 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 84,74 persen.



Dua belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum pada tahun 2023 sebesar 100,93 persen atau realisasi Persentase Penduduk Berakses Air Minum pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 85,75 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 84,96 persen.

Tiga belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Areal Kawasan Kumuh pada tahun 2023 sebesar 0 persen atau realisasi Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 0 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0 persen.

Empat belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan pada tahun 2023 sebesar 2,05

persen atau realisasi Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan Yang Terjangkau pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,42 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 20,44 persen.

Lima belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Luas Lahan Bersertifikat pada tahun 2023 sebesar 93,30 persen atau realisasi Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 26,18 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 28,06 persen.



Enam belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Penyelesaian Kasus Tanah Negara pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Penyelesaian Kasus Tanah Negara pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 88,05 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 88,05 persen.

Tujuh belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 sebesar 100,46 persen atau realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 63,74 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 63,45 persen.

Delapan belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah Penurunan Emisi GRK pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Penurunan Emisi GRK pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 462952,90 Gg CO₂-Eq dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 462952,25 Gg CO₂-Eq.

Sembilan belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Indeks Kualitas Air pada tahun 2023 sebesar 108,13 poin atau Indeks Kualitas Air pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 63,74 poin persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 58,95 poin.

Dua puluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Indeks Kualitas Udara pada tahun 2023 sebesar 110,58 persen atau realisasi Indeks Kualitas Udara pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 93,82 Poin dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 84,84 Poin.

Dua puluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2023 sebesar 91,31persen atau realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 28,89 Poin dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 31,64 Poin.

Dua puluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 100,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen.

Dua puluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 1 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1 persen.

Dua puluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 1 klp dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1 klp.

Dua puluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Penetapan Hak MHA pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Penetapan Hak MHA pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 1 klp dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1 klp.

Dua puluh enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 klp dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 klp.

Dua puluh tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator

Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 klp dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 klp.

Dua puluh delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 1 klp dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1 klp.

Dua puluh sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 klp dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 klp.



Tiga puluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 sekolah dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 sekolah.

Tiga puluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Timbulan Sampah Yang Ditangani pada tahun 2023 sebesar 216,39 persen atau realisasi Timbulan Sampah Yang Ditangani pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 63,14 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 29,18 persen.

Tiga puluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani pada tahun 2023 sebesar 94,79 persen atau realisasi Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 94,79 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen.



Tiga puluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota pada tahun 2023 sebesar 308,64 persen atau realisasi Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 75,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 24,30 persen.



Tiga puluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri) pada tahun 2023 sebesar 84,79 persen atau realisasi Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri) pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 35,00 Ton/Kg dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 41,28 Ton/Kg.

Tiga puluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001 pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001 pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 1 buah dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1 buah.

Tiga puluh enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan pada tahun 2023 sebesar 85,35 persen atau realisasi Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 29 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 33,85 persen.

Tiga puluh tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan pada tahun 2023 -berhasil mencapai target yaitu sebesar 36,62 dokumen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 36,62 dokumen.

Tiga puluh delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati pada tahun 2023 sebesar 0

persen atau realisasi Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 0 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0 persen.

Tiga puluh sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 3 unit dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3 unit.



Empat puluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Jumlah arus penumpang angkutan Umum pada tahun 2023 sebesar 536,4 persen atau realisasi Jumlah arus penumpang angkutan Umum pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 69248,0 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 12910,7 persen.



Empat puluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Layanan Angkutan Darat pada tahun 2023 sebesar 1934,19 persen atau realisasi Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 22,63 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1,17 persen.

Empat puluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum pada tahun 2023 sebesar 95 persen atau realisasi Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 94,72 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen.

Empat puluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Pemasangan Rambu-Rambu pada tahun 2023 sebesar 0 persen atau realisasi Pemasangan Rambu-Rambu pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 0 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 66.01persen.

Empat puluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum pada tahun 2023 sebesar

738 persen atau realisasi Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 207.744 Orang/Barang dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 28.134 Orang/Barang.

Empat puluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Rasio Ijin Trayek pada tahun 2023 sebesar 830,00 persen atau realisasi Rasio Ijin Trayek pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,0830 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,01 persen.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, perindustrian, UMKM dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sebesar Rp 211.031.812.083 terealisasi sebesar Rp 182.942.270.304 atau 86,69 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) ini adalah sebanyak 15 program yaitu:

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan sistem Air Limbah
2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
3. Program Penyelenggaraan Penataan ruang
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Program Penyelenggaraan Jalan
6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
7. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
8. Program Kawasan Permukiman
9. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
10. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
11. Program Pengembangan Perumahan
12. Program Penataan Bangunan Gedung
13. Program Pengelolaan Persampahan
14. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
15. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
16. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau kerusakan Lingkungan Hidup
17. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan beracun (Limbah B3)

18. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk masyarakat
19. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup
20. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya
21. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)

10 Meningkatkan Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas)

Analisis pencapaian Sasaran 10: Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi , dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2022			
			Tar Get	Real Isasi	Cap Aian	Notif
10 Meningkatkan perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	1 Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	24	6,54	26,73	TB
	2 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	11	5	46,96	TB
	3 Persentase koperasi aktif	%	75,21	67,68	89,99	CB
	4 Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	98,97	97,55	98,57	CB
	5 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0,72	0,45	62,50	KB
	6 Jumlah Pasar	Unit	43	43,00	100,00	B
	7 Cakupan bina klppengrajin	%	0,18	0,57	316,67	SB
Rata Rata Capaian					105.91	SB

Dari 7 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 2 indikator kinerja mencapai target di bawah 50 persen atau tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi , dengan predikat Sangat Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 105.91 persen.

b. perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 3 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya perekonomian

daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun lalu dan kondisi awal (2023).

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	REALISASI		
			2021	2022	2023
1	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	23	12	6,54
2	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	12	7	5
3	Persentase koperasi aktif	%	70,28	67,80	67,68
4	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	97,99	97,99	97,55
5	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0,85	0,28	0,45
6	Jumlah Pasar	Unit	43	40,00	43,00
7	Cakupan bina klp pengrajin	%	0,13	0,56	0,57

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja	Satuan	Target (Kondisi Akhir Rpjmd)	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2023	Capaian	Not
1 Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	26	17,86	67,84	☹️
2 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	10	8,00	78,13	😊
3 Persentase koperasi aktif	%	76,34	68,59	89,84	😊
4 Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	99,85	97,84	97,99	😊
5 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0,8	0,53	65,83	☹️
6 Jumlah Pasar	Unit	43	42,00	97,67	😊
7 Cakupan bina kelompok pengrajin	%	0,224	0,42	187,50	😊

Pada Sasaran strategis 10, Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terdapat 7 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 5 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/on track/on trend, dan 2 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 0 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui indikator Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB pada tahun 2023 sebesar 26,73 persen atau realisasi Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 6,54 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 24,47 persen.



Dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui indikator Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri pada tahun 2023 sebesar 46,96 persen atau realisasi Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 5,09 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 10,84 persen.

Tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui indikator Persentase koperasi aktif pada tahun 2023 sebesar 89,99 persen atau realisasi Persentase koperasi aktif pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 67,68 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 75,21 persen.



Empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui Persentase Usaha Mikro Dan Kecil pada tahun 2023 sebesar 98,57 persen atau realisasi Persentase Usaha Mikro Dan Kecil pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 97,55 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 98,97 persen.

Lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui indikator Cakupan bina klppedagang/usaha informal pada tahun 2023 sebesar 62,50 persen atau realisasi Cakupan bina klp pedagang/usaha informal pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,45 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,72 persen.



Enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui indikator Jumlah Pasar pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 43,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 43 persen.

Tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui indikator Cakupan bina klppengrajin pada tahun 2023 sebesar 316,67 persen atau realisasi Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,57 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,18 persen.



e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, perindustrian, UMKM dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sebesar Rp 43.732.566.300 terealisasi sebesar Rp 40.873.955.873 atau 93.46 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) ini adalah sebanyak 15 program yaitu:

1. Program Hubungan Industri
2. Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam
3. Program Pemberdayaan UMKM
4. Program Pengembangan UMKM
5. Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan
6. Program Perencanaan dan pembangunan industri
7. Program Standarisasi dan perlindungan konsumen
8. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
9. Program Penilaian Kesehatan Ksp /Usp Koperasi

10. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
11. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
12. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
13. Program Pengembangan Ekspor
14. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
15. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

11 Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas)

Analisis pencapaian Sasaran 11: Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas), dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2023				
			Target	Realisasi	Capaian	Notif	
3	4	5	11	12	13	14	
1 1 Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas)	1	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	58,4	56,88	97,43	CB
	2	Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi	%	27,0	125	462,96	SB
	3	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	91	47,17	52,00	KB
	4	Persentase wirausaha muda	%	3,37	25,90	768,55	SB
	5	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	21,57	85,71	397,41	SB
	6	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan	%	41,03	29,31	71,43	KB
	7	Cakupan pembinaan atlet muda	atlet	52,30	73,65	140,82	SB
	8	Jumlah atlet berprestasi	atlet	19	32,00	172,04	SB
	9	Jumlah prestasi olahraga	prestasi	3	6,00	191,42	SB
	10	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	28	28	100	SB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Sat	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Notif
	11	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	88,05	29,30	33,28	TB
Rata Rata Capaian						226,12	SB

Dari 11 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 1 indikator kinerja mencapai target di bawah 50 persen atau tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas), dengan predikat Sangat Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 226,12 persen

b. perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	55,11	56,85	56,88
2	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	18	140	125
3	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	76	89	47,17
4	Persentase wirausaha muda	%	3	3	25,90
5	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	17	85,71	85,71
6	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan	%	29	29	29,31
7	Cakupan pembinaan atlet muda	atlet	26	73,65	73,65
8	Jumlah atlet berprestasi	atlet	11	3	32,00
9	Jumlah prestasi olahraga	prestasi	3	2	6,00
10	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	43	20	28
11	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	25,74	25,74	29,30

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 11 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas), melalui Persentase wirausaha muda mengalami kenaikan dari tahun lalu dan kondisi awal (2021).

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja		Satuan	Target Kondisi Akhir Rpjmd	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2023	Capaian	Notif
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	63,24	56,28	88,99	😊
2	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	36,00	94,33	262,04	😊
3	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	96,07	70,90	73,80	😊
4	Persentase wirausaha muda	%	4,09	10,36	253,30	😊

	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kondisi Akhir Rpjmd	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2023	Capaian	Notif
5	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	20,12	62,86	312,43	
6	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan	%	55,51	29,31	52,80	
7	Cakupan pembinaan atlet muda	atlet	58,68	57,82	98,54	
8	Jumlah atlet berprestasi	atlet	20,00	15,33	76,67	
9	Jumlah prestasi olahraga	prestasi	3,00	3,67	122,22	
10	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100,00	90,79	90,79	
11	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	32,92	26,93	81,79	

Pada Sasaran strategis 11, Meningkatnya Kinerja Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas), terdapat 11 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 10 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/*on track/on trend*, dan 1 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 0 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2023 sebesar 97,43 persen atau realisasi Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 56,88 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 58,4 persen.

Dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi pada tahun 2023 sebesar 462,96 persen atau realisasi Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 123 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 27,0 persen.

Tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif pada tahun 2023 sebesar 52,00 persen atau realisasi Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 47,17 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 90,71 persen.

Empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Persentase wirausaha muda pada tahun 2023 sebesar 768,55 persen atau realisasi Persentase wirausaha muda pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 25,90 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3,37 persen.

Lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Cakupan Pembinaan Olahraga pada tahun 2023 sebesar 397,41 persen atau realisasi Cakupan Pembinaan Olahraga pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 85,71 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 21,57 persen.

Enam pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan pada tahun 2023 sebesar 71,43 persen atau realisasi Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 29,31 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 41,03 persen.

Tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan pada tahun 2023 sebesar 140,82 persen atau realisasi Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 73,65 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 52,30 persen.

Delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Jumlah atlet berprestasi pada tahun 2023 sebesar 172,04 persen atau realisasi Jumlah atlet berprestasi pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 32,00 atlet dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 19 atlet.



Sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Jumlah prestasi olahraga pada tahun 2023 sebesar 191,42 persen atau realisasi Jumlah prestasi olahraga pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 6 prestasi dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3 prestasi.

Sepuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Penyelesaian Kasus Tanah Negara pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Penyelesaian Kasus Tanah Negara pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 28 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 28 persen.

Sebelah, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Persentase Luas Lahan Bersertifikat pada tahun 2023 sebesar 33,28 persen atau realisasi Persentase Luas Lahan Bersertifikat pada tahun

2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 29,30 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 88,05 persen.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) adalah sebesar Rp 10.554.578.500 terealisasi sebesar Rp 10.221.542.102 atau 96.84 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) ini adalah sebanyak 4 program yaitu:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

12 Meningkatnya kemandirian desa dalam pembangunan daerah melalui pengembangan kawasan perdesaan

Analisis pencapaian Sasaran 12: Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan, dapat dijelaskan sebagai berikut:dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan atara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Not
12 Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	1 Indeks Desa Membangun	Angka	0,76	0,763	100,39	SB
	2 Persentase Desa Mandiri	%	2,75	21,01	764,00	SB
	3 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	100	95,4	95,40	CB
	4 Rata-Rata Jumlah KlpBinaan Pkk	%	146	136	93,15	CB
	5 Persentase Lsm Aktif	%	100	91	91,00	CB
	6 Persentase Pkk Aktif	%	100	100	100,00	B
	7 Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100,00	B

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2023				
			Target	Realisasi	Capaian	Not	
	8	Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	100	100	100,00	B
	9	Rata-Rata Jumlah KlpBinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	%	93	100	107,53	SB

Dari 9 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 0 indikator kinerja mencapai target di bawah 50 persen atau tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan dengan predikat Kurang Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 172.39 persen

b. perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Indeks Desa Membangun	Angka	0,720	0,72	0,763
2	Persentase Desa Mandiri	%	0,051	0,12	21,01
3	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	79,39	73,39	95,4
4	Rata-Rata Jumlah KlpBinaan Pkk	%	146	146	136
5	Persentase Lsm Aktif	%	0	90,9	91
6	Persentase Pkk Aktif	%	100	100	100
7	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100
8	Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	100	0	100
9	Rata-Rata Jumlah KlpBinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	%	93	93	100

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 9 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan mengalami peningkatan dari tahun lalu dan mengalami penurunan kondisi awal (2021).

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target kondisi akhir rpjmd	Realisasi kinerja sd tahun 2023	Capaian	Not
12 Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	1 Indeks Desa Membangun	Angka	0,824	0,73	89,12	
	2 Persentase Desa Mandiri	%	9,17	7,06	76,99	
	3 Cakupan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Yang Baik	%	100	82,73	82,73	
	4 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Pkk	%	146	142,67	97,72	
	5 Persentase Lsm Aktif	%	100	60,63	60,63	
	6 Persentase Pkk Aktif	%	100	100,00	100,00	
	7 Persentase Posyandu Aktif	%	100	100,00	100,00	
	8 Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	100	66,67	66,67	
	9 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	%	100	95,33	95,33	

Pada Sasaran strategis 12, Meningkatkan Kinerja Meningkatkan kemandirian desa dalam pembangunan daerah melalui pengembangan kawasan perdesaan terdapat 9 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 7 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/on track/on trend, dan 2 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 0 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Indeks Desa Membangun pada tahun 2023 sebesar 100,39 persen atau realisasi Indeks Desa Membangun pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,763 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,760 persen.

Dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Persentase Desa Mandiri pada tahun 2023 sebesar 764,00 persen atau realisasi Persentase Desa Mandiri pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 21,01 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 2,75 persen.

Tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik pada tahun 2023 sebesar 95,40 persen atau Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 95,4 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Rata-Rata Jumlah KlpBinaan Pkk pada tahun 2023 sebesar 93,15 persen atau Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 136 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 146 persen.

Lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Persentase Lsm Aktif pada tahun 2023 sebesar 91 persen atau realisasi Persentase LSM Aktif pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 91 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Persentase Pkk Aktif pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Persentase Pkk Aktif pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.



Tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Persentase Posyandu Aktif pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Persentase Posyandu Aktif pada tahun 2023 berhasil

mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Rata-Rata Jumlah KlpBinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada tahun 2023 sebesar 107,53 persen atau realisasi Rata-Rata Jumlah KlpBinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 93 persen.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah adalah sebesar Rp Rp 2.613.691.596 terealisasi sebesar Rp Rp 2.507.549.870 atau 95,94 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah ini adalah sebanyak 4 program yaitu:

1. Program Penataan Desa
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan

13 Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman

Analisis pencapaian Sasaran 13: Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	No	Indikator	Sat	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Not
13 Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	1	Indeks Rasa Aman	Angka	15	14	93,33	CB
	2	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	100	100	100	B
	3	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp)	%	0,53	2,76	520,75	SB
	4	Total Fertility Rate (Tfr)	%	2,50	2,19	87,60	CB
	5	Persentase perangkat	%	78,58	75,40	95,95	CB

Sasaran Strategis	No	Indikator	Sat	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Not
		daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB					
	6	Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	26,42	25,92	98,11	CB
	7	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk	%	1	1	100	B
	8	Jumlah Sektor Yang Menyapakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan	sektor	6	6	100	B
	9	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan,	sektor	3	3	100	B
	10	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	%	16,85	2,19	13	TB
	11	Ratio Akseptor Kb	%	18,33	64,48	351,77	SB
	12	Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	74,86	45,70	61,05	KB

Sasaran Strategis	No	Indikator	Sat	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Not
	13	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	89,79	45,7	50,90	KB
	14	Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	4,45	15,34	344,72	SB
	15	Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	11,84	20,92	176,69	SB
	16	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	39,09	60,30	154,26	SB
	17	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	53,50	65	121,50	SB
	18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	%	100	65	65	KB
	19	Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb	%	79,78	12,16	15,24	TB
	20	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- Kb	%	91,16	6,21	6,81	TB
	21	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Di Setiap Kecamatan	%	10	5	50	KB
	22	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	1,03	4,8	466,02	SB
	23	Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Derah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan	%	100	100	100	B

Sasaran Strategis	No	Indikator	Sat	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Not
		Pembangunan Daerah Di Bdadng Pengendalian Penduduk					
	24	Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri	%	0,25	0,01	2,80	TB
	25	Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (Ppkbd) Setiap Desa/Kelurahan	%	100	100	100	B
	26	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100	100	B
	27	Persentase Faskes Dan Jejarinya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	65,05	100	153,73	SB
	28	Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa	%	100	100	100	B
	29	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Sesual (Ims)	%	0,0	0,0	100	B
	30	Cakupan KlpKegiatan Yang Melakukan Pembinaan	%	100	100	100	B

Sasaran Strategis	No	Indikator	Sat	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Not
		Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga					
	31	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	38,87	5,14	13,22	TB
	32	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	22,79	22,10	96,97	CB
	33	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes	%	0,01		0	TB
	34	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,31	0,28	90,32	CB
	35	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100	100	B
	36	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%	03	0256	83,93	CB
	37	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100	100	B
	38	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	B
	39	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	4,36	61,33	1406,65	SB

Sasaran Strategis	No	Indikator	Sat	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Not
	40	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	26,36	17,5	66,39	KB
	41	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%	84,52	97	114,77	SB
	42	Rasio KDRT	%	02	0003	198,50	SB
	43	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	97	70	72,35	KB
	44	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100	B
	45	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit	%	100	100	100	B
	46	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	%	100	100	100	B
	47	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat	%	100	100	100	B

Sasaran Strategis	No	Indikator	Sat	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Not
		Kelengkapan DPRD Kabupaten					
	48	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100	100	100	B
	49	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	%	100	100	100	B
Rata Rata Capaian						142,29	SB

Dari 49 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 6 indikator kinerja mencapai target di bawah 50 persen atau tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan kehidupan beragama dengan predikat Kurang Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 142,29 persen

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis		Indikator	Satuan	Realisasi			
				2021	2022		
13	Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman	1	Indeks Rasa Aman	Angka	14	14	14
		2	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	68,38	51,77	100
		3	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp)	%	0,01	0,74	2,76
		4	Total Fertility Rate (Tfr)	%	2,31	1,99	2,19

Sasaran Strategis		Indikator	Satuan	Realisasi		
				2021	2022	
dan nyaman	5	Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	120,12	59,97	75,40
	6	Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	0,93	1,67	25,92
	7	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk	%	1	1	1
	8	Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan	sektor	6	6	6
	9	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan,	sektor	3	3	3
	10	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	%	114,59	3,78	2,19
	11	Ratio Akseptor Kb	%	1,54	79,60	64,48
	12	Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	56,43	56,34	45,70
	13	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	80,62	0	45,7
	14	Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	0,19	0,21	15,34
	15	Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	1,59	1,45	20,92
	16	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	7,26	7,75	60,30


Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2021	2022		
	17	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	14,75	16,80	65,00
	18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	%	68,97	74,97	65,00
	19	Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb	%	49,90	53,62	12,16
	20	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- Kb	%	99,99	58,94	6,21
	21	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Di Setiap Kecamatan	%	10	10	5
	22	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	0,08	0,035	4,8
	23	Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bdadng Pengendalian Penduduk	%	100	100	100
	24	Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber- Kb Mandiri	%	7,3	6,75	0,01
	25	Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (Ppkbd) Setiap Desa/Kelurahan	%	100	100	100
	26	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100	100
	27	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	5,55	33,76	100,00
	28	Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Di setiap Desa	%	100	100	100
	29	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Sesual (Ims)	%	0	0	0,0
	30	Cakupan KlpKegiatan Yang Melakukan Pembinaan	%	100	100	100









Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi		
			2021	2022	
	Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga				
31	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	37,82	32,20	5,14
32	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	4,94	4,98	22,10
33	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes	%	0,0056	0,0065	
34	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,3	0,3	0,28
35	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100	100
36	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%	0,00273	0,0000 0008	0,0025 6
37	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100,00	100,00
38	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100
39	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	4,04	0	61,33
40	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	3,85	4,2	17,5
41	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%		96	97
42	Rasio KDRT	%	0,00000 004	0,0000 064	0,0000 3
43	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	98	0	70
44	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100
45	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	%	0,895	6,23	100,00

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi		
			2021	2022	
	Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit				
	46 Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	%	100	100	100
	47 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	%	100	100	100
	48 Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100	100	100
	49 Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	%	100	100	100

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 49 indikator yang menunjang pencapaian Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman mengalami peningkatan dari tahun lalu dan kondisi awal (2021).

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian	Notifikasi
13 Terwujudnya tatanan	1 Indeks Rasa Aman	Angka	15	14,00	93,33	





Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian	Notifikasi	
kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	2	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	90,75	73,38	80,86	
	3	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp)	%	90,48	1,17	1,29	
	4	Total Fertility Rate (Tfr)	%	90,48	28,66	31,68	
	5	Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	90,48	92,33	102,05	
	6	Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	89,29	12,65	14,17	
	7	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk	%	1	1,00	100,00	
	8	Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan	sektor	6	6,00	100,00	
	9	Jumlah Kerja Sama	sektor	3	3,00	100,00	


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja sd Tahun 2023	Capaian	Notifikasi
	Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan,					
	10 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	%	11,99	45,85	382,37	😊
	11 Ratio Akseptor Kb	%	23,13	26,50	114,55	😊
	12 Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	74,15	59,03	79,62	😊
	13 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	89,79	49,94	55,62	😐
	14 Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	4,56	6,76	148,49	😊
	15 Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	9,94	11,38	114,48	😊
	16 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	43,29	29,44	68,00	😐
	17 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	73,89	38,51	52,11	😐
	18 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	%	100	71,64	71,64	😊

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian	Notifikasi
	19 Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb	%	92,58	44,53	48,10	
	20 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- Kb	%	100	59,43	59,43	
	21 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Di Setiap Kecamatan	kec	10	8,33	83,33	
	22 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	0,51	2,46	485,52	
	23 Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Derah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bdadng Pengendalian Penduduk	%	100	100,00	100,00	
	24 Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri	%	23,28	11,09	47,62	
	25 Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (Ppkbd) Setiap Desa/Kelurahan	%	100	100,00	100,00	
	26 Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi	%	100	100,00	100,00	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja sd Tahun 2023	Capaian	Notifikasi
	Permintaan Masyarakat					
	27 Persentase Faskes Dan Jejarinya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	100	64,15	64,15	
	28 Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa	%	100	100,00	100,00	
	29 Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (Ims)	%	0	0,00	0,00	
	30 Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100	100,00	100,00	
	31 Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	40,03	42,29	105,64	
	32 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	23,17	16,35	70,55	
	33 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga	%	0,001	0,00	403,33	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian	Notifikasi
	Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes					
	34 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,29	0,29	101,15	😊
	35 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100,00	100,00	😊
	36 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%	0,00311	0,00	85,74	😊
	37 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100,00	100,00	😊
	38 Persentase Penegakan Perda	%	100	100,00	100,00	😊
	39 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	4,2	21,79	518,81	😊
	40 Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	35,58	12,95	36,40	😞
	41 Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%		64,33	0,00	😞
	42 Rasio KDRT	%	0,001	0,11	10734,33	😊
	43 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	97	55,93	0,00	😞
	44 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban	%	100	100,00	100,00	😊

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian	Notifikasi
	Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu					
	45 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit	%	100	36,32	36,32	
	46 Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	%	100	100,00	100,00	
	47 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	%	100	100,00	100,00	
	48 Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi	%	100	100,00	100,00	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian	Notifikasi
	Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)					
	49 Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	%	100	100,00	100,00	

Pada Sasaran strategis 13, Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman terdapat 49 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 34 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/on track/on trend, dan 7 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 8 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran meningkatnya pelayanan kehidupan beragama dapat dijelaskan sebagai berikut

Pertama, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Indeks Rasa Aman pada tahun 2023 sebesar 99.33 Persen, artinya realisasi Indeks Rasa Aman pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 14 angka dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 15 angka.

Kedua, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Ketiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp) pada tahun 2023 sebesar 520,75 persen atau realisasi indikator Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp) pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 2,76 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,53 persen.

Empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Total Fertility Rate (Tfr) pada tahun 2023 sebesar 87,60 Persen atau realisasi Total Fertility Rate (Tfr) pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 2,76 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 2,50 persen.

Lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB pada tahun 2023 sebesar 95,95 persen atau realisasi Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 75,40 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 78,58 persen.



Salah satu prioritas nasional adalah penanganan Stunting dengan melibatkan elemen berbagai sektor. Untuk itu Kampung Keluarga Berkualitas (KB) yang selama ini menjadi program pemerintah diharapkan kegiatannya dikonvergensi untuk penanganan Stunting. Hal ini mengemuka pada kegiatan Penguatan Kemitraan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung KB dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bulukumba. Kampung KB yang terbentuk di Kabupaten Bulukumba baru berjumlah 63 yang ditargetkan 64 Kampung KB.

Enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada tahun 2023 sebesar 98,11 persen atau realisasi Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 25,92 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 26,42 persen.

Tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk pada tahun 2023 berhasil mencapai

target yaitu sebesar 1 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1 persen.

Delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 6 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 6 persen.

Sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan, pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan, pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 3 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3 persen.

Sepuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga pada tahun 2023 sebesar 13 persen atau realisasi Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 2,19 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 16,85 persen.

Sebelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator ratio Akseptor Kb pada tahun 2023 sebesar 351,77 persen atau realisasi ratio Akseptor Kb pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 64,48 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 18,33 persen.

Dua belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 pada tahun 2023 sebesar 61,05 persen atau realisasi Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 45,70 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 74,86 persen.

Tiga belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) pada tahun 2023 sebesar 50,90 persen atau realisasi Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 45,7 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 89,79 persen.

Empat belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Pasangan Usia Subur

(Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun pada tahun 2023 sebesar 344,72 persen atau realisasi Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 15,34 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 4,45 persen.

lima belas , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need) pada tahun 2023 sebesar 176,69 persen atau realisasi Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need) pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 20,92 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 11,84 persen.

Enam belas , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun 2023 sebesar 154,26 persen atau realisasi Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 60,30 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 39,09 persen.

Tujuh belas , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi pada tahun 2023 sebesar 121,50 persen atau realisasi Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 65,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 53,50 persen.

Delapan belas , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita pada tahun 2023 sebesar 65,00 persen atau realisasi Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 65,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen.



Sembilan belas , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb pada tahun 2023 sebesar 15,24 persen atau realisasi Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 12,16 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 79,78 persen.

Dua puluh , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- Kb pada tahun 2023 sebesar 6,81 persen atau Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- Kb pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 6,21 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 91,16 persen.

Dua puluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Di Setiap Kecamatan pada tahun 2023 sebesar 50 persen atau realisasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Di Setiap Kecamatan pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 5 kecamatan dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 10 kecamatan.

Dua puluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa pada tahun 2023 sebesar 466,02 persen atau realisasi Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 4,8 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1,03 persen.

Dua puluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Dua puluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri pada tahun 2023 sebesar 2,80 persen atau realisasi Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,01 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,25 persen.



Dua puluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (Ppkbd) Setiap Desa/Kelurahan pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (Ppkbd) Setiap Desa/Kelurahan pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Dua puluh enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Dua puluh tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Faskes Dan Jejarnya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan pada tahun 2023 sebesar 153,73 persen atau realisasi Persentase Faskes Dan Jejarnya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 65,05 persen.

Dua puluh delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Dua puluh sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (Ims) pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (Ims) pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 0 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0 persen.

Tiga puluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan KlpKegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Cakupan KlpKegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen.

Tiga puluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak pada tahun 2023 sebesar 13,22 persen atau realisasi Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 5,14 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 38,87 persen.

Tiga puluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita pada tahun 2023 sebesar 96,67 persen atau realisasi Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 22,10 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 22,79 persen.

Tiga puluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase

Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes pada tahun 2023 sebesar 0 persen atau realisasi Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 0 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0 persen.

Tiga puluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada tahun 2023 sebesar 90,32 persen atau realisasi Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,28 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,31 persen.

Tiga puluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen.

Tiga puluh enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) pada tahun 2023 sebesar 83,93 persen atau realisasi Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,00256 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,003 persen.

Tiga puluh tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Tiga puluh delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Penegakan Perda pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Persentase Penegakan Perda pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Tiga puluh sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah pada tahun 2023 sebesar 1406,65 atau realisasi Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah pada tahun 2023 sebesar 61,33 sangat berhasil memenuhi target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 4,36 persen.

Empat puluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Proporsi Kursi Yang Diduduki

Perempuan Di DPRD pada tahun 2023 sebesar 66,39 persen atau realisasi Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 17,5persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 26,36 persen.

Empat puluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta pada tahun 2023 sebesar 114,77 persen atau realisasi Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 84,52 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 97 persen.

Empat puluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Rasio KDRT pada tahun 2023 sebesar 198,50 persen atau realisasi Rasio KDRT pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,00003 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,002 persen.

Empat puluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan tahun 2023 72,35 persen atau realisasi Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 70 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 97 persen.

Empat puluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Empat puluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.



Empat puluh enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan

Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Empat puluh tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Empat puluh delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Empat puluh delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman adalah sebesar Rp 54.607.412.587 terealisasi sebesar Rp 50.297.711.207 atau 92,11 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman ini adalah sebanyak 16 program yaitu:

1. Program Penanggulangan bencana
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

4. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha) Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh
6. Program Perlindungan Perempuan
7. Program Perlindungan Khusus Anak
8. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
9. Program Pengarusutamaan Gender Dan pemberdayaan Perempuan
10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
11. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
12. Program Pengendalian Penduduk
13. Program Pembinaan Keluarga Berencana(Kb)
14. Program Pemberdayaan Dan Peningkatankeluarga Sejahtera (Ks)
15. Program Dukungan Pelaksanaan tugas Dan Fungsi DPRD
16. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.

3.3. Realisasi Anggaran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2023 yang dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD tahun 2023.

yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bulukumba Tahun anggaran 2023.

APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2023, secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Garis besar APBD Tahun 202 dan realisasinya berdasarkan data hasil Reviu Inspektorat sebelum audit BPK, adalah sebagai berikut:

TABEL 10
Ringkasan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)
PENDAPATAN	1.557.182.937.302,00	1.501.267.117.490,04	96,41
DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	239.250.000.000,00	187.545.640.141,26	78,39
Pajak Daerah	74.320.354.000,00	44.115.871.619,00	59,36
Retribusi Daerah	29.229.646.000,00	19.281.237.272,00	65,96
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	3.693.669.916,00	73,87
Lain-lain PAD yang Sah	130.700.000.000,00	120.454.861.334,26	92,16
PENDAPATAN TRANSFER	1.317.332.937.302,00	1.313.259.477.348,78	99,69
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.213.921.942.492,00	1.205.838.857.205,00	99,33

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)
Dana Perimbangan	1.104.134.706.492,00	1.096.397.210.005,00	99,30
Dana Insentif Daerah (DID)	10.377.309.000,00	10.377.309.000,00	100,00
Dana Desa	99.409.927.000,00	99.064.338.200,00	99,65
Pendapatan Transfer Antar Daerah	103.410.994.810,00	107.420.620.143,78	103,88
Pendapatan Bagi Hasil	61.493.542.330,00	79.471.013.279,28	129,23
Bantuan Keuangan	41.917.452.480,00	27.949.606.864,50	66,68
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	600.000.000,00	462.000.000,00	77,00
Pendapatan Hibah	600.000.000,00	462.000.000,00	77,00
BELANJA DAERAH	1.646.353.865.572,00	1.543.903.837.466,51	93,78
BELANJA OPERASI	1.072.850.880.759,00	1.012.987.899.391,86	94,42
Belanja Pegawai	628.464.327.812,00	616.860.242.592,00	98,15
Belanja Barang dan Jasa	413.691.046.534,00	366.162.982.994,86	88,51
Belanja Hibah	29.222.015.638,00	28.610.389.839,00	97,91
Belanja Bantuan Sosial	1.473.490.775,00	1.354.283.966,00	91,91
BELANJA MODAL	392.686.766.898,00	353.682.271.435,65	90,07
Belanja Modal Tanah	3.615.900.000,00	3.439.865.700,00	95,13
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.769.372.780,00	63.586.099.794,00	92,46
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.520.737.826,00	142.113.539.674,84	96,33
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	167.080.565.113,00	138.842.685.088,00	83,10
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.618.191.179,00	5.618.145.178,81	100,00
Belanja Modal Aset Lainnya	82.000.000,00	81.936.000,00	99,92
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.133.752.969,00	66.830.500,00	5,89
Belanja Tidak Terduga	1.133.752.969,00	66.830.500,00	5,89
BELANJA TRANSFER	179.682.464.946,00	177.166.836.139,00	98,60
Belanja Bagi Hasil	8.312.174.942,00	6.182.644.939,00	74,38
Belanja Bantuan Keuangan	171.370.290.004,00	170.984.191.200,00	99,77
SURPLUS / DEFISIT	(89.170.928.270,00)	(42.636.719.976,47)	0
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	89.170.928.270,00	89.170.928.271,23	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	89.170.928.270,00	89.170.928.271,23	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	89.170.928.270,00	89.170.928.271,23	100,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	46.534.208.294,76	0

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

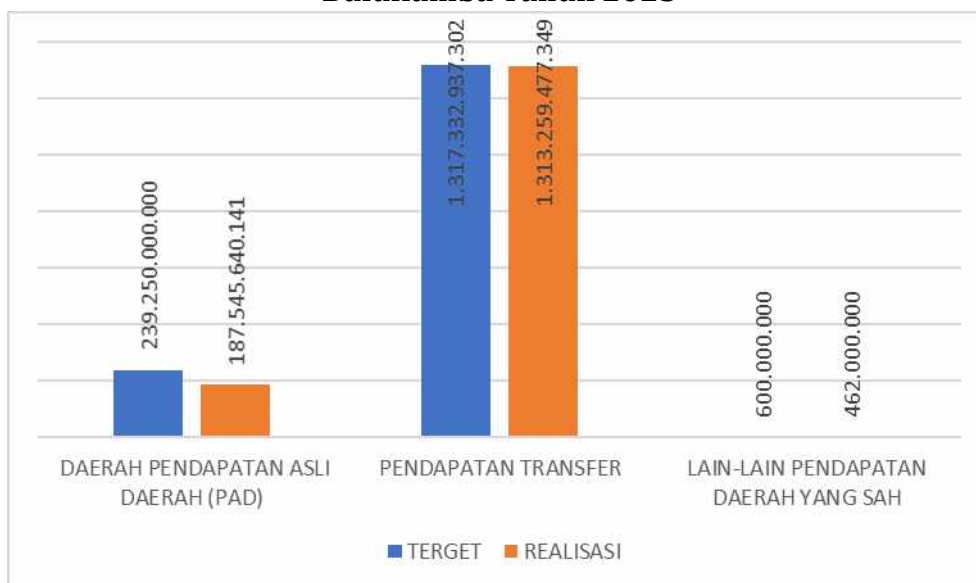
1. Pendapatan

Pendapatan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 1.557.182.937.302,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.501.267.117.490,04 atau 96,41 persen. Target pendapatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Target pendapatan tahun 2022 sebesar Rp 1.464.329.512.889,00 dan di tahun 2022 naik menjadi Rp 1.557.182.937.302,00 atau naik 6.34 persen. Sedangkan realisasi pendapatan mengalami peningkatan yaitu dari Rp 1.375.869.878.068,34 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi Rp 1.501.267.117.490,04 pada tahun 2023 atau meningkat 9.11 persen.

Menurunnya pendapatan ini disebabkan adanya penurunan capaian pada:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 target Rp 239.250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 187.545.640.141,26 atau 78,39 persen. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 169.419.982.130,72 atau 10.69 persen.
2. Pendapatan Transfer ditahun 2023 Rp 1.317.332.937.302 terealisasi sebesar Rp 1.313.259.477.349 atau 99.69 persen, Realisasi Dana Perimbangan ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 1.029.924.838.000,00 atau 98,34 persen.
3. Lain lain pendapatan yang sah tahun 2023 Rp 600.000.000 terealisasi sebesar Rp 462.000.000 atau 77.00. persen Dapat dilihat pada diagram berikut :

Gambar17
Perbandingan antara target dan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023



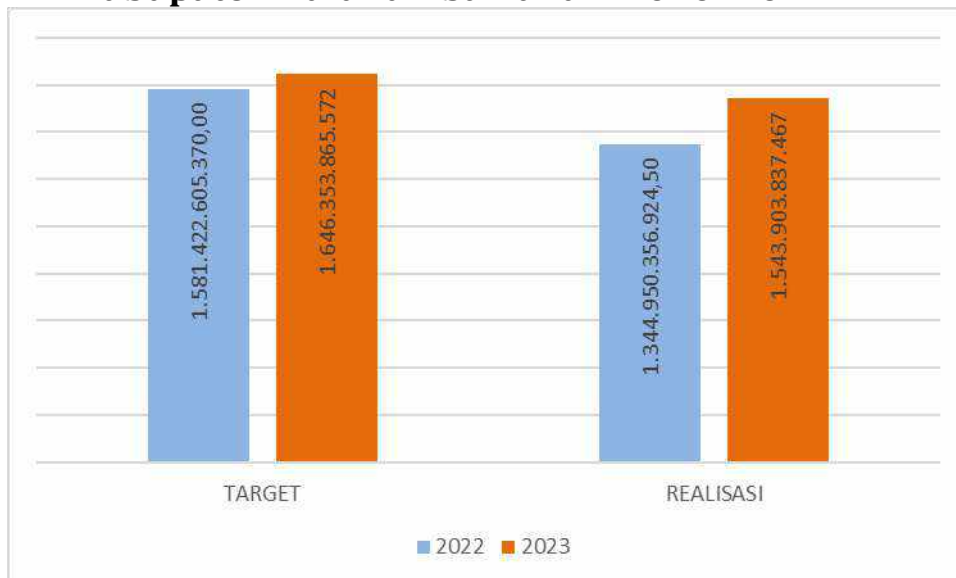
Beberapa upaya Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan pencapaian target dan realisasi pendapatan dengan beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
 - b. Meneliti dan mengkaji potensi, eksplorasi potensi serta penerapan manajemen pengelolaan pendapatan yang efektif.
 - c. Melakukan perbaikan mekanisme pemungutan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.
 - d. Peningkatan koordinasi dalam rangka perolehan dan pengelolaan pendapatan daerah.
 - e. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber-sumber pendapatan daerah.
 - f. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.
 - g. Pemberian *punishment* dan *reward* bagi aparatur pengelola pendapatan daerah.
- 2. Belanja**

Target belanja daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Target belanja tahun 2022 sebesar Rp 1.581.422.605.370,00 dan di tahun 2023 naik menjadi Rp 1.646.353.865.572,00 atau naik 4,10 persen. Sedangkan realisasi belanja mengalami peningkatan yaitu dari Rp 1.355.511.903.577,49 pada tahun 2021 dan turun menjadi Rp 1.344.950.356.924,50 pada tahun 2022 atau turun 0,79 persen.

Gambar 18

Perbandingan antara target dan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020- 2021



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Bulukumba tahun 2022,

Alokasi Anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2023 sebesar Rp 1.646.353.865.572,00 terealisasi sebesar Rp 1.543.903.837.466,51 atau 93,78 persen, dengan rincian sebagai berikut:

belanja operasi sebesar Rp. 1.072.850.880.759,00 terealisasi sebesar Rp 1.012.987.899.391,86 atau 94.42 persen, belanja modal sebesar Rp. 392.686.766.898,00 dan terealisasi sebesar Rp. 353.682.271.435,65 atau 90.07 persen, belanja tak terduga sebesar Rp. 1.133.752.969,00 dan terealisasi sebesar Rp. 66.830.500,00 atau 5.89 persen dan belanja transfer sebesar Rp.179.682.464.946,00 dan terealisasi sebesar Rp. 177.166.836.139,00 atau 98,60 persen.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja keuangan untuk tahun selanjutnya maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan kebijakan sebagai berikut:

- a. Efisiensi dan efektivitas anggaran.
- b. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang mendukung arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023,
- c. Penganggaran program dan kegiatan diprioritaskan untuk pencapaian target indikator kinerja daerah tahun 2023 dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba, serta mendukung pembangunan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan provinsi.
- d. Tolok ukur dan target kinerja belanja daerah pada setiap kegiatan disertai indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- e. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik serta potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan proporsional.

Selanjutnya akan diuraikan realisasi belanja langsung berdasarkan sasaran strategis pembangunan daerah tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel 11.

**Alokasi Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten
Bulukumba Tahun Anggaran 2023
Berdasarkan Sasaran Strategis Pembangunan Daerah**

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama	1.778.856.020	1.570.137.195	88,27
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Pembangunan	197.966.351.615	191.896.054.901	96,93
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	4.619.975.395	4.534.013.738	98,14

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	Meningkatnya nilai tambah produk pertanian	36.613.367.040	34.000.051.499	92,86
5	Meningkatnya produksi hasil perikanan	32.904.846.417	26.921.262.071	81,82
6	Meningkatnya kualitas Pendidikan	123.338.569.302	122.564.009.957	99,37
7	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	250.337.015.352	215.081.189.275	85,92
8	Meningkatnya daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara	4.868.461.350	4.779.533.692	98,17
9	Meningkatnya pemenuhan pembangunan infrastruktur wilayah	211.031.812.083	182.942.270.304	86,69
10	Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, perindustrian, UMKM dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	43.732.566.300	40.873.955.873	93,46
11	Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas)	10.554.578.500	10.221.542.102	96,84
12	Meningkatnya kemandirian desa dalam pembangunan daerah melalui pengembangan kawasan perdesaan	2.613.691.596	2.507.549.870	95,94
13	Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	54.607.412.587	50.297.711.207	92,11
	BELANJA YANG MENDUKUNG SASARAN	974.967.503.557	888.189.281.684	91,10
	BELANJA PENDUKUNG	671.386.362.015	655.714.555.782	97,67
	TOTAL BELANJA	1.646.353.865.572	1.543.903.837.467	93,78

Sumber: Diolah, sekretariat daerah Kab. Bulukumba Tahun 2023

Anggaran belanja daerah sebesar Rp1.646.353.865.572 terealisasi sebesar Rp1.543.903.837.467 atau 93.78 persen dari anggaran. dari besaran belanja daerah tersebut, anggaran yang langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja daerah yang ada dalam RPJMD tahun 2023 sebesar Rp Rp 974.967.503.557 terealisasi

sebesar Rp888.189.281.684 atau 91,10 persen dari anggaran, dan selebihnya merupakan belanja pendukung pada anggaran pokok (program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program dan kegiatan seluruh kecamatan) sebesar Rp 671.386.362.015 terealisasi sebesar Rp 655.714.555.782 atau 97,67 persen dari anggaran.

Untuk keberhasilan pencapaian kinerja dalam rangka mencapai target indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah yang ada dalam RPJMD, maka untuk tahun-tahun mendatang porsi untuk belanja pendukung dapat dibatasi utamanya untuk rekening belanja barang dan jasa yang tidak terlalu penting dan tidak berkontribusi langsung terhadap pencapaian target indikator kinerja yang ada dalam RPJMD, dan selanjutnya anggaran yang dirasionalkan dari belanja pendukung (administrasi umum) ini diprioritaskan untuk mencapai target yang masih belum tercapai di RPJMD.

Secara umum kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian tingkat kinerja dan realisasi keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2023 sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya realisasi target Pendapatan Asli Daerah(PAD).
2. Adanya beberapa kegiatan fisik pada beberapa OPD yang terlambat melakukan proses pekerjaan.
3. Terdapat beberapa OPD yang realisasi fisik masih tinggi dibandingkan dengan realiasi keuangannya.
4. Adanya kegiatan di OPD yang tidak jalan dan mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penyerapan anggaran.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat 5 sasaran strategis yang mencapai hasil di atas 100 persen (sangat berhasil) yaitu sasaran strategis (5),(9),(10),(11),(12),(13); 0 sasaran tercapai dengan predikat berhasil; 4 sasaran tercapai dengan predikat cukup berhasil yaitu sasaran strategis (1), (2), (3), dan (4); dan 3 sasaran tercapai dengan predikat kurang berhasil yaitu sasaran strategis (6), dan (7); Dan 1 sasaran yang tidak berhasil yaitu sasaran strategis (8); Secara kumulatif, rata-rata capaian ke-13 sasaran strategis sebesar 128,83 persen atau dengan predikat Sangat Berhasil.
2. Dari 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD, maka terdapat 9 indikator kinerja yang telah memenuhi kriteria sangat berhasil atau 36 persen, 4 indikator kinerja yang telah memenuhi kriteria berhasil atau 16 persen, 8 indikator kinerja dengan kriteria cukup berhasil atau 32 persen, 4 indikator kinerja dengan kriteria kurang berhasil atau 8 persen dan 4 indikator kinerja lainnya dengan kriteria tidak berhasil atau 16 persen.
3. Dari 261 indikator sasaran strategis tahun 2023 terhadap target jangka menengah didapatkan hasil yaitu 200 indikator sasaran dengan notifikasi hijau (sudah tercapai/on track/on trend) atau 76.63 persen, 40 indikator sasaran dengan notifikasi kuning (butuh kerja keras) atau 15.33 persen, dan 21 indikator sasaran dengan notifikasi merah (sulit tercapai) atau 8.05 persen.
4. Pendapatan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 1.557.182.937.302,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.501.267.117.490,04 atau 96,41 persen. Target pendapatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Target pendapatan tahun 2022 sebesar Rp 1.464.329.512.889,00 dan di tahun 2022 naik menjadi Rp 1.557.182.937.302,00 atau naik 6.34 persen. Sedangkan realisasi pendapatan mengalami peningkatan yaitu dari Rp 1.375.869.878.068,34 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi Rp 1.501.267.117.490,04 pada tahun 2023 atau meningkat 9.11 persen, Target belanja daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Target belanja tahun 2022 sebesar Rp 1.581.422.605.370,00 dan di tahun 2023 naik menjadi Rp 1.646.353.865.572,00 atau naik 4,10 persen. Sedangkan realisasi belanja mengalami peningkatan yaitu dari Rp 1.355.511.903.577,49 pada tahun 2021 dan turun menjadi Rp 1.344.950.356.924,50 pada tahun 2022 atau turun 0.79 persen. Alokasi Anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2023 sebesar Rp 1.646.353.865.572,00 terealisasi sebesar Rp 1.543.903.837.466,51 atau 93.78 persen, dengan rincian sebagai berikut: belanja operasi sebesar Rp. 1.072.850.880.759,00 terealisasi sebesar Rp 1.012.987.899.391,86 atau 94.42 persen, belanja modal sebesar Rp. 392.686.766.898,00 dan terealisasi sebesar Rp. 353.682.271.435,65 atau 90.07 persen, belanja tak terduga sebesar Rp. 1.133.752.969,00 dan terealisasi sebesar Rp. 66.830.500,00 atau 5.89 persen dan belanja transfer sebesar

Rp.179.682.464.946,00 dan terealisasi sebesar Rp. 177.166.836.139,00 atau 98,60 persen.

5. Anggaran belanja daerah sebesar Rp1.646.353.865.572 terealisasi sebesar Rp1.543.903.837.467 atau 93,78 persen dari anggaran. dari besaran belanja daerah tersebut, anggaran yang langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja daerah yang ada dalam RPJMD tahun 2023 sebesar Rp Rp 974.967.503.557 terealisasi sebesar Rp888.189.281.684 atau 91,10 persen dari anggaran, dan selebihnya merupakan belanja pendukung pada anggaran pokok (program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program dan kegiatan seluruh kecamatan) sebesar Rp 671.386.362.015 terealisasi sebesar Rp 655.714.555.782 atau 97,67 persen dari anggaran.

4.2. Rekomendasi tindak lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2023 diantaranya adalah:

1. Tidak tercapainya realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Masih terdapat indikator sasaran yang tidak berorientasi hasil dan tidak menggambarkan output penting terhadap kinerja sasaran yang akan dicapai serta tidak sinkron dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Rendahnya pemanfaatan Sistem Informasi perencanaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah serta rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
4. Terdapat kegiatan fisik dan Pengadaan di beberapa OPD yang realisasi fisiknya dan keuangannya masih rendah.

Dan sebagai tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan fisik terkait proses tender dan percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.
2. Membangun sistem informasi perencanaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang berbasis teknologi serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
3. Akselerasi penetapan perubahan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 untuk menyesuaikan Perangkat Daerah yang telah dibentuk serta perbaikan target dan indikator sasaran yang tidak berorientasi hasil atau tidak menggambarkan output penting yang ingin dicapai.
4. Untuk keberhasilan pencapaian kinerja dalam rangka mencapai target indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah yang ada dalam RPJMD, maka untuk tahun-tahun mendatang porsi untuk belanja pendukung dapat dibatasi utamanya untuk rekening belanja barang dan jasa yang tidak terlalu penting dan tidak berkontribusi langsung terhadap pencapaian target indikator kinerja yang ada dalam RPJMD, dan selanjutnya anggaran yang dirasionalkan dari belanja pendukung (administrasi umum) ini diprioritaskan untuk mencapai target yang masih belum tercapai di RPJMD.

5. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
6. Peningkatan kualitas pelayanan untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KABUPATEN BULUKUMBA

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
1	Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama	1	1	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100
		2	2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	71
		3	3	Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah	%	100
		4	4	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	5
		5	5	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk	Angka	2,81

PROGRAM

ANGGARAN

1	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosila dan Budaya	Rp	100.000.000
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	319.944.500
3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	2.621.264.025
4	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp	1.172.168.820
5	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	55.500.000
6	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		28.125.266.750
TOTAL SASARAN 1		Rp	32.394.144.095

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Pembangunan	1	6	Skor LPPD/Kategori	Skor	3,54
		2	7	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	%	100
		3	8	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	2.75
		4	9	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	%	0
		5	10	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	21.61
		6	11	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	19,64
		7	12	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)		Tepat Waktu
		8	13	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa		0,82
		9	14	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11,37
		10	15	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100
		11	16	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100
		12	17	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	10.86
		13	18	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	%	12,93
		14	19	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	12,93

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		
		15	20	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	61,17
		16	21	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	bulan	3,00
		17	22	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	89,67
		18	23	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	91.14
		19	24	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	29,00
		20	25	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	1564,07
		21	26	Persentase tindak lanjut temuan	%	94.32
		22	27	Persentase pelanggaran Pegawai	%	0,091
		23	28	Jumlah temuan BPK	Temuan	5,00
		24	29	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	Ada/ Tidak Ada	Ada
		25	30	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	Ada/ Tidak Ada	Ada

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
		26	31	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	Ada/ Tidak Ada	Ada
		27	32	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	%	100,00

PROGRAM

ANGGARAN

1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	561.880.150
2	Program koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	552.296.600
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	190.801.168.799
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	907.396.900
5	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	251.161.900
6	Program Kepegawaian Daerah	Rp	322.253.800
7	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	1.187.768.550
8	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	3.324.596.000
9	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp	516.972.450
10	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	1.420.501.000
11	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	879.324.800
12	Program Penelitian Dan pengembangan Daerah	Rp	1.633.270.900
	TOTAL SASARAN 2	Rp	202.358.591.849

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	1	33	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,26-4,00
		2	34	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	unit	12
		3	35	Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	%	100
		4	36	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	100
		5	37	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	59.70
		6	38	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	91.96
		7	39	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	80.08
		8	40	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	%	0,00
		9	41	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0,02

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
		10	42	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	5.32
		11	43	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	%	2,24
		12	44	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	0,22
		13	45	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	%	0,04
		14	46	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	0,83
		15	47	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 10,000	781.46
		16	48	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		93.18
		17	49	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan		1,09
		18	50	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat		0,48
		19	51	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	buah	72
		20	52	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp (juta)	797.595
		21	53	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	30

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
		22	54	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	%	100
		23	55	Buku "Kabupaten Dalam Angka"		Ada
		24	56	Buku "PDRB"		Ada
		25	57	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk,		1
		26	58	Rasio bayi berakta kelahiran,		0,8
		27	59	Rasio pasangan berakta nikah,		0,5
		28	60	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		100
		29	61	Cakupan penerbitan KTP-el		100
		30	62	Cakupan penerbitan akte kelahiran		80
		31	63	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer		95

PROGRAM

ANGGARAN

1	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	154.179.500
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	672.060.000
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp	569.706.000
4	Program Penanganan Bencana	Rp	576.735.000

5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	63.986.500
6	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	592.039.450
7	Program Pencatatan Sipil	Rp	242.199.800
8	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	46.256.950
9	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	294.880.000
10	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		
11	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	Rp	30.480.050
12	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	127.432.450
13	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	10.162.000
14	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	9.124.875
15	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	602.839.800
16	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	849.999.750
TOTAL SASARAN 3			3.560.093.375

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
4	Meningkatnya nilai tambah produk pertanian	1	68	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	8,14
		2	69	Ketersediaan Pangan Utama	angka	486,30
		3	70	Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari)	angka	18.297,29
		4	71	Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)	angka	670,64
		5	72	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	%	87,24
		6	73	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB		24,78
		7	74	Cakupan bina kelompok tani		82,64
		8	75	Jumlah Populasi Ternak		
				<i>Sapi Potong</i>	Ekor	79.853
				<i>Ayam Ras Pedaging</i>	Ekor	2.474.006
				<i>Ayam Ras Petelur</i>	Ekor	791.040

PROGRAM

ANGGARAN

1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	207.218.500
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	162.088.000
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	447.524.000

4	Program Pengendalian Danpenanggulangan Bencana Pertanian	Rp	293.050.000
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	5.076.425.500
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	10.760.861.000
7	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	11.000.000
8	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	617.494.000
9	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp	18.674.000
	TOTAL SASARAN 4	Rp	17.594.335.000

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
5	Meningkatnya produksi hasil perikanan	1	76	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	7,66
		2	77	Kontribusi PDRB sector perikanan	%	13,55
		3	78	Cakupan Produksi perikanan	%	131
		4	79	Perikanan tangkap	ton	58.142,7
		5	80	Perikanan Budidaya	ton	5176
		6	81	Cakupan Bina Kelompok Perikanan	%	73,5

PROGRAM	ANGGARAN
1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 5.617.991.500
2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 916.096.750
3 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 108.800.500
TOTAL SASARAN 5	Rp 6.642.888.750

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
6	Meningkatnya kualitas Pendidikan	1	82	Indeks Pendidikan	Angka	66,21
		2	83	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
				SD	%	114,89
				SMP	%	99,43
				SMA	%	90,26
		3	84	Angka Partisipasi Murni (APM)		
				SD	%	98,70
				SMP	%	85,19
				SMA	%	66,39
		4	85	Angka Partisipasi Sekolah (APS)		
				7-12 Tahun	%	98,87
				14-15 Tahun	%	92,22
				16-18 Tahun	%	76,09
		5	86	Angka Putus Sekolah		
				SD	%	0
				SMP	%	0
		SMA	%	0,13		

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		
		6	87	Angka Kelulusan		
				SD	%	100
				SMP	%	100
				SMA	%	100
		7	88	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-iv	%	100
		8	89	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	rasio	1:7
		9	90	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	rasio	1:7
		10	91	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas	%	91,50
		11	92	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya		3
		12	93	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan		59
		13	94	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu		2
		14	95	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		31,27
		15	96	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah		46,90
		16	97	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk		2,21
		17	98	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	75.968
		18	99	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	12.872

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
		19	100	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	%	71,81
		20	101	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	100.00
		21	102	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	1,59

PROGRAM

ANGGARAN

1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	145.697.213.388
2	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rp	521.889.100
3	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	22.540.266.050
4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	906.708.500
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp	199.999.850
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	830.139.850
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	461.303.000
8	Program Pengelolaan Arsip	Rp	32.410.700
9	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Rp	12.756.500
10	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rp	42.297.000
	TOTAL SASARAN 6	Rp	171.244.983.938

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
7	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	1	103	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,63
		2	104	Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup		4,00
		3	105	Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup		9,89
		4	106	Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup		0,00
		5	107	Angka Kematian Ibu		41,09
		6	108	Rasio Posyandu Per Satuan Balita		32,70
		7	109	Rasio Puskesmas Dan Pustu		0,19
		8	110	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk		0,002
		9	111	Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk		0,04
		10	112	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk		0,096
		11	113	Rasio Tenaga Medis/Penduduk		0,250
		12	114	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	87,35
		13	115	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100
		14	116	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100
		15	117	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta	%	38,5

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
		16	118	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	86,315
		17	119	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	1,89
		18	120	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100
		19	121	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 Penduduk	0
		20	122	Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi	%	0
		21	123	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	12,96
		22	124	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	72,83
		23	125	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	48,46
		24	126	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	%	92,40

PROGRAM		ANGGARAN
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 94.317.392.395
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 1.279.203.875
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Makanan Minuman	Rp 567.679.050
4	Program Penunjang Urusanpemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 125.877.597.855
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 250.349.700
TOTAL SASARAN 7		Rp 222.292.222.875

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
8	Meningkatnya daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara	1	127	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	6,76
		2	128	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	429.291
		3	129	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2-4
		4	130	PAD Sektor Pariwisata	%	6,76

PROGRAM		ANGGARAN
1	Program Peningkatan daya tarik destinasi Pariwisata	Rp 726.000.000
2	Program Penembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	Rp 372.000.000
TOTAL SASARAN 8		Rp 1.098.000.000

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
9	Meningkatnya pemenuhan pembangunan infrastruktur wilayah	1	131	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	92
		2	132	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	0,779
		3	133	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk		0,0030
		4	134	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	%	100
		5	135	Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	82,61
		6	136	Rasio Jaringan Irigasi		0,17
		7	137	Rasio Rumah Layak Huni		0,250
		8	138	Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	77,36
		9	139	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	12,63
		10	140	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	94,37
		11	141	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	85,97
		12	142	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	85,02
		13	143	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0
		14	144	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan		37,37
		15	145	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	29,56

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			TARGET	
	No	Indikator	Uraian	Unit	Nilai
	16	146	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100,00
	17	147	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63,45
	18	148	Indeks Kualitas Air	Poin	58,95
	19	149	Indeks Kualitas Udara	Poin	84,84
	20	150	Indeks Kualitas Tutup Lahan	Poin	33,75
	21	151	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	%	100
	22	152	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	%	1
	23	153	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	Kelompok	1
	24	154	Penetapan Hak MHA	Kelompok	1
	25	155	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	Kelompok	100
	26	156	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	Kelompok	100
	27	157	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	Kelompok	1
28	158	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Kelompok	Ada	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
		29	159	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,	sekolah	100
		30	160	Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	30,92
		31	161	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	100
		32	162	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	%	23,51
		33	163	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	Buah	43,85
		34	164	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	%	2
		35	165	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	35,49
		36	166	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	Dok	38,37
		37	167	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati		0
		38	168	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		3
		39	169	Jumlah arus penumpang angkutan Umum		11.862
		40	170	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	1,12
		41	171	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	%	100,00
		42	172	Pemasangan Rambu-Rambu		71,77

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			TARGET
		43	173	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
	44	174	Rasio Ijin Trayek	0,012

PROGRAM	ANGGARAN
1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan sistem Air Limbah	Rp 599.108.000
2 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 77.732.500
3 Program Penyelenggaraan Penataanruang	Rp 200.099.500
4 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 1.861.068.560
5 Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 58.264.518.504
6 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rp 14.586.055.560
7 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 2.342.657.024
8 Program Kawasan Permukiman	Rp 14.617.330.050
9 Program Peningkatan Prasarana,Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Rp 31.100.000
10 Program Pengembangan Perumahan	Rp 302.241.050
11 Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 7.902.773.000
12 Program Pengelolaan Persampahan	Rp 6.421.471.750
13 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 308.731.787

PROGRAM		ANGGARAN	
14	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	719.962.000
15	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Danberacun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Danberacun (Limbah B3)	Rp	85.229.000
16	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Rp	257.634.000
17	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup	Rp	4.855.000
18	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya	Rp	37.602.000
19	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)	Rp	1.004.490.000
TOTAL SASARAN 9		Rp	109.624.659.285

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
10	Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, perindustrian, UMKM dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	1	175	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	10,63
		2	176	Persentase koperasi aktif	%	75,63
		3	177	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	99,50
		4	178	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		0,76
		5	179	Jumlah Pasar	Unit	43
		6	180	Cakupan bina kelompok pengrajin		0,20

PROGRAM		ANGGARAN	
1	Program Pengembangan UMKM	Rp	24.000.000
2	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Rp	53.392.642.000
3	Program Perencanaan dan pembangunan industri	Rp	2.031.822.000
4	Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Rp	114.467.600
5	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	11.171.000
6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp	40.701.000
7	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	485.921.700
TOTAL SASARAN 10		Rp	56.100.725.300

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
11	Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas).	1	181	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	27
		2	182	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	92,50
		3	183	Persentase wirausaha muda		3,61
		4	184	Cakupan Pembinaan Olahraga		21,03
		5	185	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan		45,86

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
		6	186	Cakupan pembinaan atlet muda		55,30
		7	187	Jumlah atlet berprestasi		19
		8	188	Jumlah prestasi olahraga		3
		9	189	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100,00
		10	190	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	29,56

PROGRAM

ANGGARAN

1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	379.095.675
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp	6.236.319.750
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		100.000.000
4	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		3.753.019.950
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp	10.068.000
	TOTAL SASARAN 11	Rp	10.478.503.375

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
12	Meningkatnya kemandirian desa dalam pembangunan daerah melalui pengembangan kawasan perdesaan.	1	191	Persentase Desa Mandiri	%	4,59
		2	192	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	100
		3	193	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Pkk	%	146
		4	194	Persentase Lsm Aktif	%	100
		5	195	Persentase Pkk Aktif	%	100
		6	196	Persentase Posyandu Aktif	%	100
		7	197	Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	100
		8	198	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	%	93

PROGRAM

ANGGARAN

1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp	29.999.700
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	1.742.579.750
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	337.670.500
TOTAL SASARAN 12		Rp	2.110.249.950

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA				TARGET	
13	Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman.	1	199	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	89,66	
		2	200	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp)	%	0,52	
		3	201	Total Fertility Rate (Tfr)	%	2,56	
		4	202	Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	82,98	
		5	203	Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	42,62	
		6	204	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk	%	1	
		7	205	Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan		1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	
		8	206	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan,		1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM	
		9	207	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	%	15,37	
		10	208	Ratio Akseptor Kb	%	19,97	
		11	209	Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49	%	74,59	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
		12	210	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)		89,79
		13	211	Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	4,49
		14	212	Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	11,21
		15	213	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	40,64
		16	214	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	60,17
		17	215	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	%	100
		18	216	Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb	%	84,30
		19	217	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- Kb	%	100
		20	218	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Di Setiap Kecamatan	%	10
		21	219	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	0,79
		22	220	Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Derah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bdang Pengendalian Penduduk	%	100
		23	221	Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri	%	0,24

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
		24	222	Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (Ppkbd) Setiap Desa/Kelurahan	%	100
		25	223	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100
		26	224	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	100
		27	225	Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa	%	100
		28	226	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Sesual (Ims)	%	0
		29	227	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100
		30	228	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	39,30
		31	229	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	22,93
		32	230	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes	%	0,01
		33	231	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		0,30
		34	232	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
		35	233	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota		0,00307
		36	234	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100
		37	235	Persentase Penegakan Perda	%	100
		38	236	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	4,3
		39	237	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	29,07
		40	238	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%	85,32
		41	239	Rasio KDRT		0,001
		42	240	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	97,10
		43	241	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu		100
		44	242	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit		100
		45	243	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak		100

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET
		46	244	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada
		47	245	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada
		48	246	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada

PROGRAM	ANGGARAN
1 Program Penanggulangan bencana	Rp 658.074.000
2 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 2.928.447.850
3 "Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan	Rp 3.157.036.500
4 Penyelamatan Non Kebakaran"	Rp 169.513.000
5 Program Perlindungan Perempuan	Rp 236.487.000
6 Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 100.000.000
7 Program Pengarusutamaan Gender Dan pemberdayaan Perempuan	Rp 150.000.000
8 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 150.000.000

PROGRAM		ANGGARAN
9 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp	502.061.600
10 Program Pengendalian Penduduk	Rp	4.968.961.900
11 Program Pembinaan Keluarga Berencana(Kb)	Rp	2.453.100.000
12 Program Pemberdayaan Dan Peningkatankeluarga Sejahtera (Ks)	Rp	9.704.141.950
13 Program Dukungan Pelaksanaan tugas Dan Fungsi DPRD	Rp	9.674.019.524
TOTAL SASARAN 13	Rp	34.851.843.324

Bulukumba, Januari 2024

